

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
Jalan Ustadz Uzair Yachya No. 1 Telp. (0254) 206 111 Fax. (0254) 227117 Serang – Banten 42117

NOTA DINAS

Nomor: PR0304/B/Bbws3/2026/38

Yth. : Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Dari : Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehubungan Dengan Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
BBWS Cidanau Ciujung Cidurian,


Dedi Yudha Lesmana

Tembusan:

1. Direktur Sistem Strategi dan Infrastruktur SDA,
2. Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BBWS Cidanau Ciujung Cidurian,
3. Para Kepala Bidang dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian.

KATA PENGANTAR



Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T.
Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2025. Laporan ini disusun berdasarkan hasil kegiatan pada Satker Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Satker Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian/unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan Unit Eselon II, menyusun Laporan Kinerja dengan tujuan memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja instansi pada tahun anggaran selanjutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan upaya perwujudan dari pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat digunakan oleh pihak yang berwenang dalam menilai kinerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian pada Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa dalam Laporan Kinerja ini masih terdapat kegiatan yang belum tercapai sesuai dengan rencana. Harapan kami semoga tahun-tahun selanjutnya kami akan dapat terus melakukan perbaikan kinerja sehingga *output* dari penetapan kinerja dapat tercapai.

Serang, 15 Januari 2026
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Cidanau-Ciujung-Cidurian,






RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran keberhasilan kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran demi mencapai Sasaran Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Meningkatnya Ketersediaan Air melalui Infrastruktur Sumber Daya Air.

A. Capaian Kinerja

Capaian Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian pada tahun 2025 terdiri atas 13 indikator Sasaran Program yang secara ringkas adalah sebagai berikut: Sasaran Program Teknis 1: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional, melalui pencapaian 9 (sembilan) indikator sebagai berikut:

1. Kapasitas tampungan air 59,99 m³/kapita,
2. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk 52,78%
3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi 61,55%
4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk 15,59%
5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi 0,032 USD/m³
6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air 0,02%
7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air 80%
8. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas 4,06 %
9. Persentase kondisi keandalan daerah irigasi 0,44 %



Sasaran Program Teknis 2: mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi, melalui pencapaian 4 (Empat) indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Pelaksanaan kepatuhan intern Direktorat Jenderal SDA 88,51%
2. Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran Direktorat Jenderal SDA 54,13 %
3. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA 100 %
4. Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA 53 nilai


B. Capaian Keuangan

Pada awal Tahun 2025, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mendapat alokasi DIPA sebesar Rp 856.674.938.000. Berdasarkan jenis belanja porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 739.633.312.000 atau 86,34%. Berdasarkan sumber dana, porsi Rupiah Murni (RPM) sebesar Rp. 382.006.629.000 atau 44,59%, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 55,41%, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 0,00%. Penyerapan anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian lebih tinggi dari tahun 2024. Pada tahun 2025, BBWS cidanau Ciujung Cidurian mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 1.524.568.370.000, atau sebesar 97,06% dari total pagu akhir BBWS C3. Dari realisasi penyerapan anggaran di atas terdapat sisa anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar Rp46.214.863.000, (2,94%).

C. Kendala dan Permasalahan

Berikut ini adalah kendala secara umum yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2025:

1. lambatnya penerbitan NOL (*No Objection Letter*), sehingga proses penandatanganan kontrak terlambat,
2. Terlambatnya pelaksanaan pekerjaan dikarenakan :
 - Lamanya proses Pengadaan Barang dan Jasa (Lelang)
 - Belum selesainya proses pelaksanaan pembebasan lahan
 - Sulitnya mendapatkan ketersediaan bahan material

- 
- Musim hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan dilapangan
3. Durasi waktu pekerjaan sangat singkat sebab intruksi pelaksanaan baru diberikan Ketika hampir di akhir tahun

D. Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi kendala selama pelaksanaan serta mengantisipasi kendala serupa di tahun anggaran selanjutnya, direkomendasikan langkah - langkah antisipatif Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran rencana program dan kegiatan lebih dini.
2. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan penyerapan anggaran untuk pekerjaan tahun mendatang.
3. Mempercepat pembentukan struktur organisasi pada unit kesatkeran pada setiap awal tahun.
4. Mengeluarkan petunjuk teknis untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukannya, seperti Manual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
5. Mempercepat penyusunan dan penempatan personil pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.
6. Mengirimkan personil dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan.
7. Menambah personil pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, agar tidak terjadi beban kerja berlebih/overload



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	6
1.4 SARANA DAN PRASARAN	38
1.5 ISU STRATEGIS.....	40
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN	53
BAB II PERENCANAAN KINERJA	54
2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2025	54
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	70
2.3 METODE PENGUKURAN	77
2.4 TARGET TAHUN 2025 MENURUT RENSTRA 2020-2025.....	86
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	91
3.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA	91
3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	95
3.3 ANALISI PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI	109
3.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN	130
3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	145
3.6 ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA 146	
BAB IV PENUTUP.....	156
1.1 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	156
1.2 PERMASALAHAN, KENDALA, DAN HAMBATAN	156
1.3 REKOMENDASI DAN LANGKAH TINDAK LANJUT PERBAIKAN	157
LAMPIRAN.....	158



DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Status Kepegawaian di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	29
Tabel 2 - Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	30
Tabel 3 - Data SDM yang Diikutsertakan dalam Diklat Tahun 2025.....	32
Tabel 4 - Komposisi SDM Berdasarkan Gender	34
Tabel 5 - Komposisi SDM Berdasarkan Golongan	35
Tabel 6 - Sebaran SDM Berdasarkan Rentang Usia.....	36
Tabel 7 - Sarana dan Prasarana.....	38
Tabel 8 - Luas dan Wilayah Administratif DAS WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	41
Tabel 9 - Topografi/ketinggian WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	44
Tabel 10 - Kelerengan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	44
Tabel 11 - Penggunaan Lahan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	46
Tabel 12 – Nomenklatur Kegiatan di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian 2025-2029.....	68
Tabel 13 - Kriteria Penilaian Kinerja.....	77
Tabel 14 – Tabel Capaian Kinerja	77
Tabel 15 – Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat AKuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	79
Tabel 16 - Cara Pengukuran Sasaran Strategis Ditjen SDA	80
Tabel 17 - Target Tahun 2025 pada Renstra 2020-2025.....	88
Tabel 18 – Lembar Hasil Evaluasi implementasi SAKIP BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2024.....	92
Tabel 19 – Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi implementasi SAKIP BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2024	92
Tabel 20 – Tabel Hubungan SP,IKSP, SK, dan IKSK pada capaian Kinerja BBWS C3 TA 2025	96
Tabel 21 - capaian kinerja Indikator Sasaran Program	101
Tabel 22 - Perbandingan Capaian Kinerja TA 2025 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023, 2024	110
Tabel 23 - Capaian Kinerja TA 2025.....	113
Tabel 24 - Capaian Kinerja Tahun 2024.....	120
Tabel 25 - Capaian Kinerja Tahun 2025.....	120
Tabel 26 - Perbandingan Target Renstra dengan Capaian Tahun 2023.....	122
Tabel 27 - Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Capaian Tahun 2025	124
Tabel 28 – Capaian Kinerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025.....	127
Tabel 29 – Capaian Kinerja BBWS Ciliwung Cisdane TA 2025	128



Tabel 30 - Rekapitulasi Perubahan DIPA Satuan Kerja/SNVT TA 2025.....	131
Tabel 31 - Perubahan DIPA Tahun 2025.....	139
Tabel 32 – Capaian DIPA Akhir Tahun 2025 pada BBWS C3	140
Tabel 33 – Daftar Kegiatan dari Pemanfaatan Sisa Lelang (PSL) Tahun 2025 di lingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	140
Tabel 34 - Progres Penyerapan Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2025.....	144
Tabel 35 – Penyesuaian Perencanaan Kinerja	153



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Struktur Organisasi BBWS C3 Tahun Anggaran 2025 (Struktural).....	8
Gambar 2 - Struktur Organisasi BBWS C3 Tahun Anggaran 2025 (Fungsional)	9
Gambar 3 - Struktur Organisasi Satker BBWS C3	23
Gambar 4 - Struktur Organisasi SNVT PJSA C3	24
Gambar 5 - Struktur Organisasi SNVT PJPA C3	26
Gambar 6 - Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS C3	25
Gambar 7 - Struktur Organisasi Satker OPSDA C3	27
Gambar 8 - Struktur Organisasi SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS C3	28
Gambar 9 - Status SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2023.....	29
Gambar 10 - Status Kepegawaian SDM untuk Setiap Satker Tahun 2023	30
Gambar 11 - Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Gambar 12 - Komposisi SDM Berdasarkan Gender.....	34
Gambar 13 - Komposisi SDM Berdasarkan Golongan.....	35
Gambar 14 - Komposisi SDM Berdasarkan Rentang Usia.....	36
Gambar 15 - Sarana Alat Berat	39
Gambar 9 - Wilayah Administrasi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	41
Gambar 10 - Peta DAS WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	43
Gambar 11 - Peta Topografi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	45
Gambar 12 - Peta Kelas Kemiringan Lahan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.....	45
Gambar 13 - Peta Penggunaan Lahan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2022	47
Gambar 21 - Perjanjian Kinerja Awal BBWS C3 Tahun 2025	73
Gambar 22 - Perjanjian Kinerja Akhir BBWS C3 Tahun 2025	76
Gambar 23 - Sandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2025	123
Gambar 24 - Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025	123
Gambar 25 – Perjanjian Kerja Akhir BBWS Citarum TA 2025.....	125
Gambar 26 – Perjanjian Kerja Akhir BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025.....	126
Gambar 27 - Postur DIPA Awal Tahun 2025	130
Gambar 28 - Postur DIPA Akhir Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Gambar 29 - Kurva-S Rencana dan Realisasi Fisik BBWS C3 Tahun 2025	142
Gambar 30 - Kurva-S Rencana dan Realisasi Keuangan BBWS C3 Tahun 2025.....	143
Gambar 31 - Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	148
Gambar 32 - Pembahasan Internal Laporan Kinerja (LAKIP) TA 2025	148



Gambar 33 - Workshop Penyusunan LAKIP, PK dan resntra TA 2025-2029 Dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025..... 149

Gambar 34 - Workshop penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) TA 2025..... 150

Gambar 35 - Monitoring progres pekerjaan dengan laporan monev bulanan pada Aplikasi E-sakip Kemenetrian PUPR..... 151

Gambar 36 - Komitmen Manajemen Risiko BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025 154

Gambar 36 - Komitmen Manajemen Risiko BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025 155



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Hal ini turut diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWS C3) selaku Entitas Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian wajib menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan pelaksanaan penggunaan anggaran organisasinya. Penyusunan Laporan Kinerja ini nantinya akan mendorong terciptanya sistem akuntabilitas kinerja organisasi sebagai salah satu syarat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya (*good governance*).

Menurut Peraturan Menteri di atas, Laporan Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sedangkan dalam penyusunannya, Laporan Kinerja setiap instansi memiliki prinsip untuk:


- a. Fokus pada realisasi pencapaian kinerja organisasi terhadap target yang ditetapkan;
- b. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan/permasalahan; dan
- c. Memuat evaluasi dan analisis.



Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian turut andil dalam melaksanakan program-program strategis ketahanan pangan dan ketahanan air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sesuai dengan bimbingan dan binaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja, sebagai berikut:


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum ;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas



Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sistem Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 529);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat no 13 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2025-2029
14. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2025 adalah sebagai berikut: (1) untuk memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan (2) sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kondisi ini diperlukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Tahun 2025 BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR. Laporan ini sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan BBWS Cidanau-Ciujung-



Cidurian, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian sebagai BBWS Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku, serta pengelolaan drainase utama perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan dan evaluasi, penyelenggaraan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. penyusunan studi kelayakan, perencanaan dan fasilitasi pengadaan tanah, dan perencanaan teknis atau desain pengembangan sumber daya air
- d. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- g. pengelolaan drainase utama perkotaan;
- h. Pengelolaan Sistem Hidrologi;



- i. Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- j. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- k. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- l. penyusunan dan penyiapan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis dalam perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- m. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis untuk pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur sungai;
- n. penyusunan dan pelaksanaan kajian penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
- o. fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai;
- p. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- q. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku Unit Akuntansi Wilayah;
- r. pelaksanaan pemungutan, penerimaan dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air (BJPSDA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Penyusunan Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja Balai, dan Penilaian Mandiri *River Basins Organizations*.
- t. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air.
- u. Pelaksanaan dan koordinasi Pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangan, serta koordinasi administrasi penerapan system pengendalian intern balai; dan
- v. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai serta komunikasi public dan layanan umum.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian sebagai BBWS Tipe A yang terdiri atas susunan berikut ini.

A. Jabatan Struktural

1. Bagian Umum dan Tata Usaha;
2. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber daya Air;
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan, dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun Anggaran 2025, terdapat penetapan pengangkatan Ketua Tim Pelaksana Urusan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Nomor 68/KPTS/D/2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagian Umum dan Tata Usaha
 - Pelaksana Urusan Kepegawaian, Pengelolaan Arsip dan Layanan Umum;
 - Pelaksana Urusan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Barang Persediaan Bencana dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - Pelaksana Urusan Hukum dan Komunikasi Publik.
2. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air
 - Pelaksana Urusan Perencanaan Umum;
 - Pelaksana Urusan Penyusunan Program dan Anggaran.
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
 - Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Jaringan Sungai dan Pantai;
 - Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Jaringan Bendungan dan Danau.
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
 - Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Jaringan Irigasi dan Rawa;

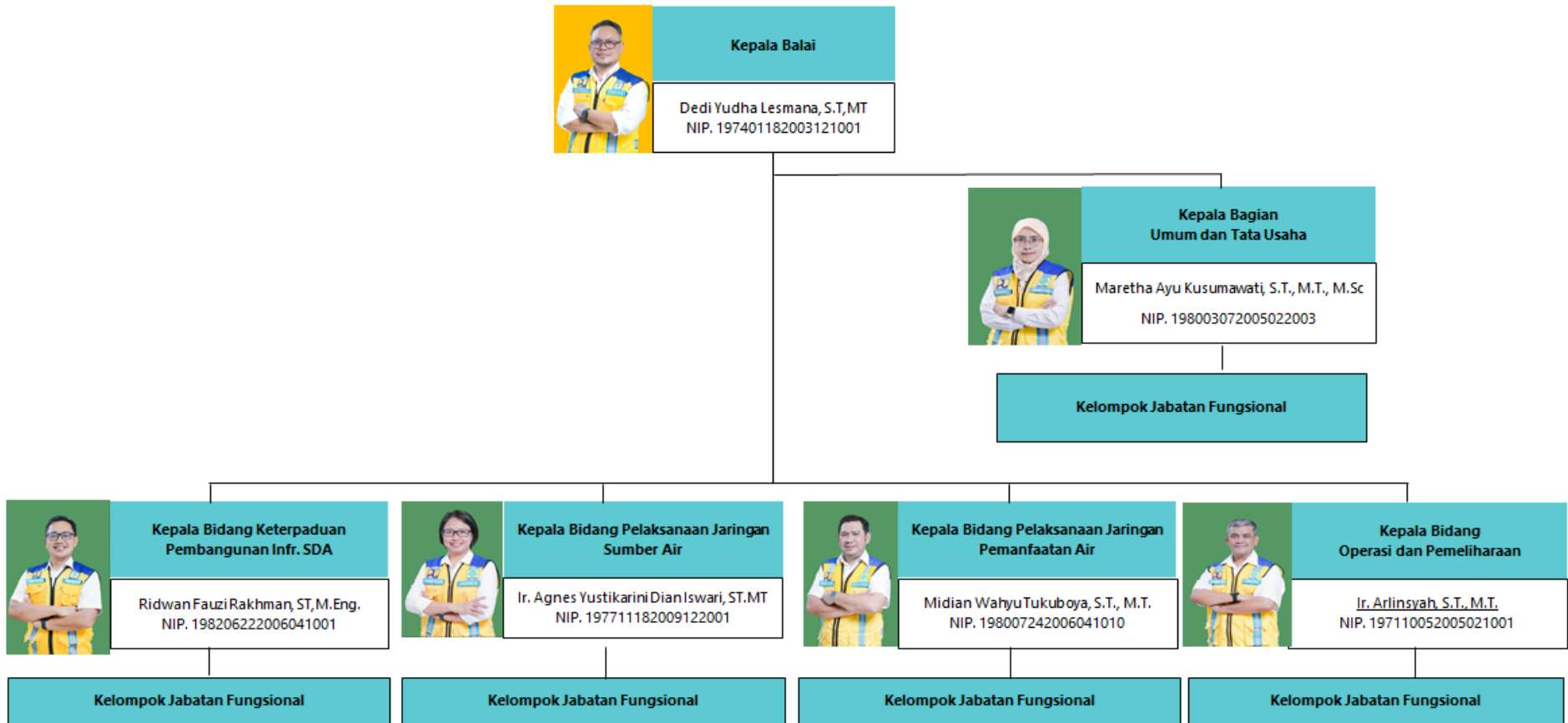


- Pelaksana Urusan Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku.
- 5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
 - Pelaksana Urusan Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan;
 - Pelaksana Urusan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.

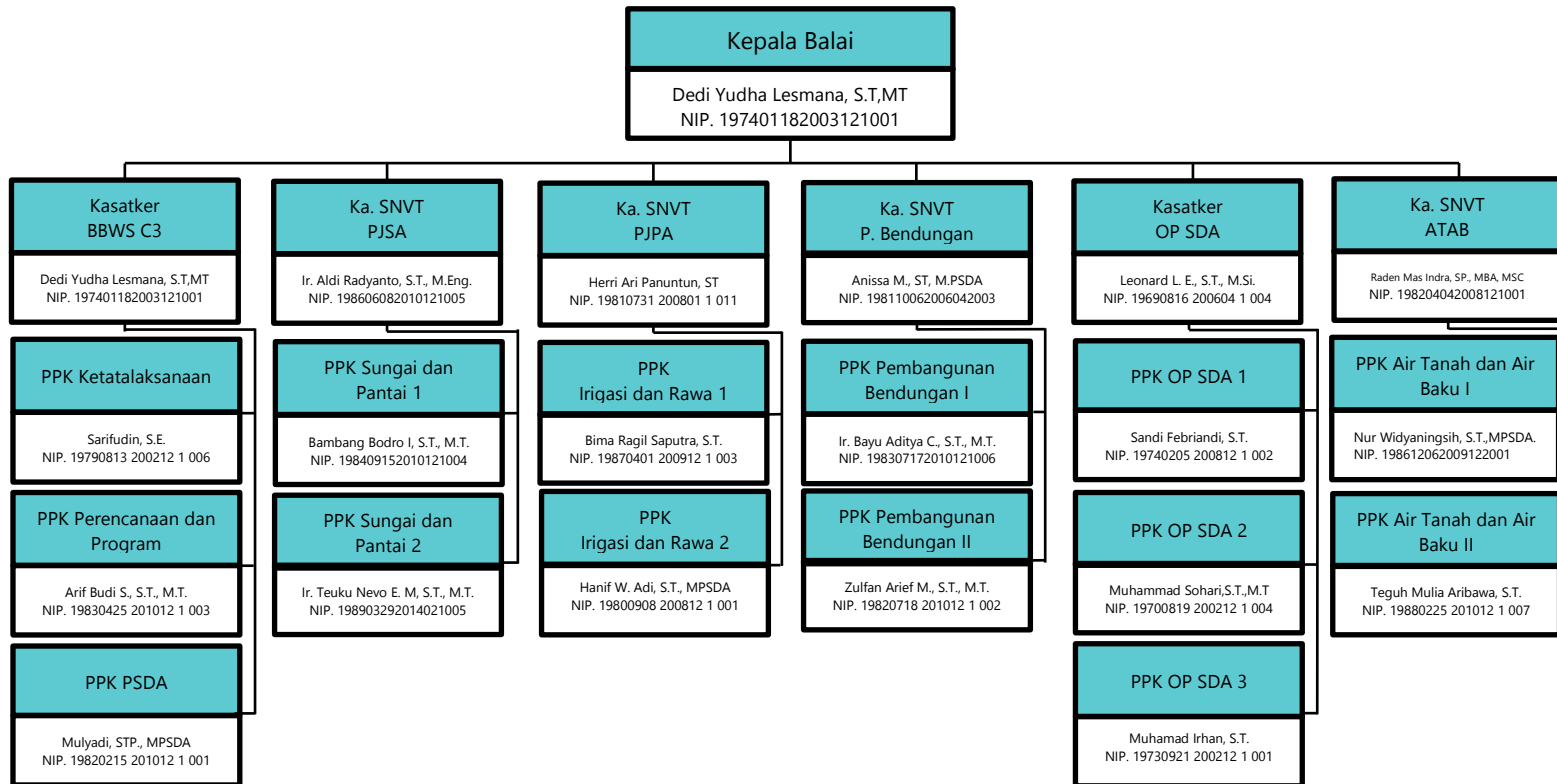
B. Jabatan Fungsional

1. Kepala Satuan Kerja BBWS C3
 - Pejabat Pembuat Komitmen Ketatalaksanaan;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Program;
 - Pejabat Pembuat Komitmen PSDA.
2. Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian
 - Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai 1;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai 2.
3. Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian
 - Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Rawa 1;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Rawa 2.
4. Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
 - Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Bendungan;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan;
 - Pejabat Pembuat Komitmen Danau, Situ dan Embung.
5. Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan SDA Cidanau-Ciujung-Cidurian
 - Pejabat Pembuat Komitmen OP - SDA 1;
 - Pejabat Pembuat Komitmen OP - SDA 2;
 - Pejabat Pembuat Komitmen OP - SDA 3.
6. Kepala SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian
 - -Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku I;
 - -Pejabat Pembuat Komitmen Air Tanah dan Air Baku II.

Struktur Organisasi Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 1.1** dan **Gambar 1.2** berikut ini.



Gambar 1 - Struktur Organisasi BBWS C3 Tahun Anggaran 2025 (Struktural)



Gambar 2 - Struktur Organisasi BBWS C3 Tahun Anggaran 2025 (Fungsional)





1.3.1 Rincian Tugas Jabatan Struktural

A. Bagian Umum dan Tata Usaha

Bagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan Balai Besar Wilayah Sungai dan menyelenggarakan fungsi:


- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, pengelolaan kepegawaian, dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan reformasi birokrasi di balai;
- b. penyusunan rencana dan pengelolaan urusan kas dan perbendaharaan, administrasi dan akuntansi keuangan;
- c. penyusunan administrasi dan fasilitasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
- d. pelaksanaan komunikasi publik dan layanan hukum;
- e. penatausahaan, pengelolaan, administrasi, dan akuntansi barang milik/kekayaan negara, pengamanan fisik barang/kekayaan milik negara, dan pengelolaan kekayaan negara lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait penanganan bencana;
- g. pelaksanaan koordinasi administrasi penerapan system pengendalian intern balai;
- h. pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga.

Susunan organisasi Bagian Umum dan Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA

Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA mempunyai tugas melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur SDA dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pemberian masukan atas rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota/provinsi;


- 
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi kelayakan kegiatan, lingkungan dan perencanaan pengadaan tanah;
 - d. penyusunan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - e. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja;
 - f. pelaksanaan koordinasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hidrologi dan kualitas air serta sistem informasi dan data sumber daya air;
 - i. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi atas pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko; dan
 - j. pelaksanaan penyusunan penilaian mandiri River Basin Organization

Susunan organisasi Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan Sumber Daya Air dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, rencana teknik dan pengawasan bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
- c. pelaksanaan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;


- 
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi prasarana jaringan sumber air di bidang sungai, pantai, drainase utama perkotaan, bendungan, danau, situ, dan tampungan air lainnya; dan
 - h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengamanan pantai strategis

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaringan Pemanfaatan Air dan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, rencana teknik dan pengawasan bidang irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi air tanah, air baku, embung dan tampungan air lainnya beserta sarana dan prasarananya;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan konstruksi dan nonkonstruksi;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air;
- g. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan prasarana irigasi dan rawa strategis, prasarana air tanah, air baku, embung strategis, dan tampungan air lainnya; dan
- h. koordinasi dan fasilitasi pemberian bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana jaringan sumber air di bidang irigasi, rawa,




tambak, air tanah, air baku serta konservasi air tanah, air baku, embung dan tampungan air lainnya beserta sarana dan prasarananya.

Susunan organisasi Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan BBWS dan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- b. koordinasi dan fasilitasi persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- c. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang/jasa;
- e. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana alam;
- g. fasilitasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di waduk;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan system peringatan dini sumber daya air;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana alokasi air tahunan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penyusunan kajian dan fasilitasi penetapan garis sempadan sungai, garis sempadan danau, garis sempadan situ, garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan mata air, garis sempadan waduk, garis sempadan embung, dan garis sempadan rawa;
- k. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- 
- l. pelaksanaan penyusunan klarifikasi teknis dan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air;
 - m. pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis pemanfaatan irigasi dan pengalihan alur sungai;
 - n. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air; dan
 - o. pelaksanaan pemungutan, penerimaan, dan penggunaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Susunan organisasi Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.


1.3.2 Rincian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Fungsional

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi fungsional yang ada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.


A. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Tugas Kepala Satuan Kerja:

1. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
2. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
3. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Mengawasi pelaksanaan anggaran sesuai DIPA.
5. Menyampaikan laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
7. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

- 
8. Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk *softcopy* kepada Sekretaris Jenderal melalui Pusdatin dan dalam bentuk *hardcopy* kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I.
 9. Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan apabila diperlukan.
 10. Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
 11. Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.
 12. Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker di bawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/*output* yang telah ditetapkan.
 13. Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker sesuai kebutuhan, yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya.
 14. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penanda tangan SPM.
 15. Menandatangani Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
 16. Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
 17. Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.


Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja adalah:

- 
1. Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA.
 2. Bertanggung jawab atas semua penerimaan/pengeluaran Satuan Kerja yang membebani APBN.
 3. Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut. (Dalam hal merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen).
 4. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.
 5. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara Satker.
 6. Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.
 7. Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan Langsung/Pelaksana Program.

B. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran

Tugas Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran adalah:

1. Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja.
2. Memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi *check list* kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP.
3. Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
5. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

- 
6. Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank).
 7. Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan).
 8. Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum kadaluwarsa).
 9. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 10. Menandatangani dan menerbitkan SPM dalam rangkap 6 (enam) dengan ketentuan:
 11. Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar.
 12. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
 13. Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akuntansi/Verifikasi Keuangan.
 14. Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen.
 15. Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 16. Menyampaikan SPM yang telah ditandatangani ke KPPN terkait.
 17. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikan kepada Kepala Satker selaku Atasan Langsung.

Tanggung jawab Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran:


1. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan dan tujuan pengeluaran.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.



C. Bendahara Pengeluaran

Tugas Bendahara Pengeluaran adalah:

1. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran.
2. Menyiapkan rincian jumlah pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Rugi Uang Persediaan (SPP-GUP) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
3. Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
4. Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang pembayarannya melalui rekening Bendahara.
5. Melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusan (brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian Negara.
6. Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
7. Melakukan pembayaran melalui Uang Persediaan atas persetujuan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk belanja Barang (52); Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh



Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas.

8. Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Anggaran/Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
9. Menerima dan menyetor ke rekening kas negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.
10. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.
11. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara kepada:
 - a. KPPN setempat;
 - b. BPK RI;
 - c. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.


Tanggung jawab Bendahara Pengeluaran adalah:


1. Bertanggung jawab atas pengelolaan Uang Persediaan.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
3. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.

D. Pejabat Pembuat Komitmen

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
3. Menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.

- 
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kasatker.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan.
 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan.
 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 10. Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan.
 11. Menetapkan tim pendukung apabila diperlukan.
 12. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzing) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan.
 13. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa apabila diperlukan.
 14. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
 15. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kasatker.
 16. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan Berita Acara Penyerahan melalui Kasatker.
 17. Menandatangani pakta integritas.
 18. Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA sesuai kegiatannya masing-masing berdasarkan persetujuan Kasatker.
 19. Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (lembur, honor, vakasi), Surat Perintah Tugas (SPT) atas persetujuan Atasan Langsung untuk Pejabat Eselon IV dan staf serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) berdasarkan SPT yang telah diperlukan.
 20. Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya yang akan dilaksanakan secara swakelola.

- 
21. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.
 22. Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satuan Kerja, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola.
 23. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran.
 24. Mengajukan tagihan/perintah pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan.
 25. Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker selaku Atasan Langsungnya.
 26. Menyusun usulan Rencana kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.


Tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja atas realisasi keuangan dan hasil/*output* kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA serta mutu hasil/*output* sesuai yang direncanakan.
3. Bertanggung jawab kepada Kasatker.

E. Penanggung Jawab Unit Akuntansi

Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) memiliki tugas:

1. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SNVT sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

- 
3. Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT.

Penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) memiliki tugas:

1. Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satker sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu.
3. Menyampaikan laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) beserta Arsip Data Komputer.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
2. Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT.

1.3.3 Struktur Organisasi Satker BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

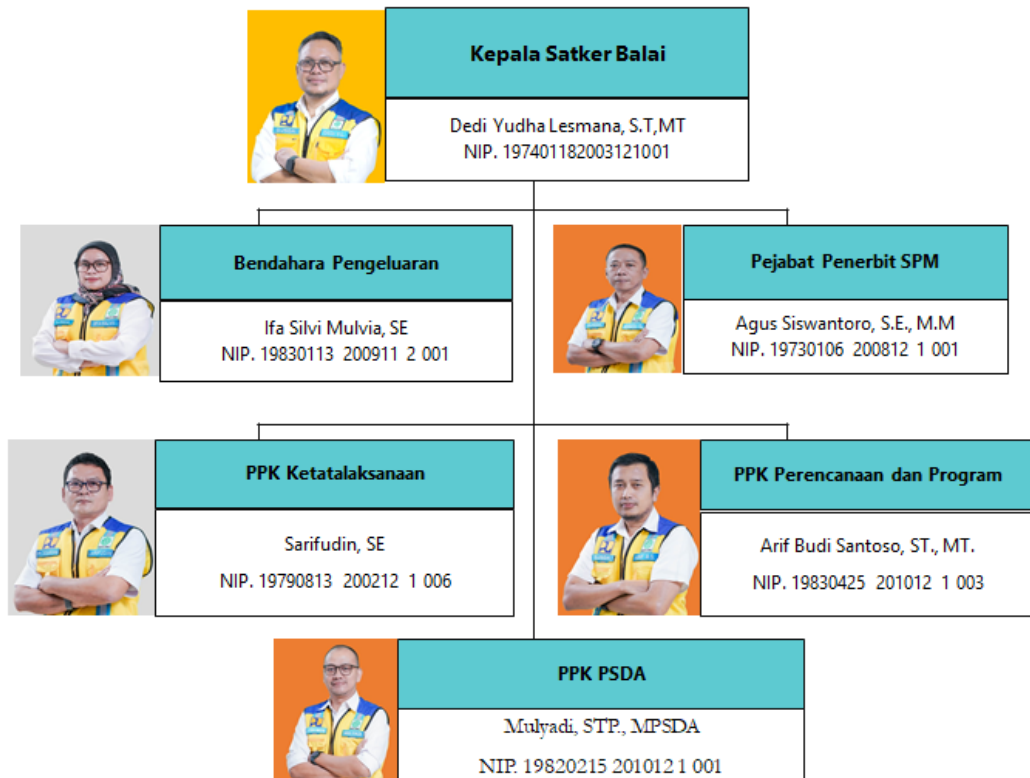
Satker BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala Satker
2. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. UAKPA dan UAKPB

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari:

- PPK Ketatalaksanaan;
- PPK PSDA;
- PPK Perencanaan dan Program.

Rincian struktur organisasi fungsional pada Satker BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 3** sebagai berikut:



Gambar 3 - Struktur Organisasi Satker BBWS C3

1.3.4 Struktur Organisasi SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian

SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

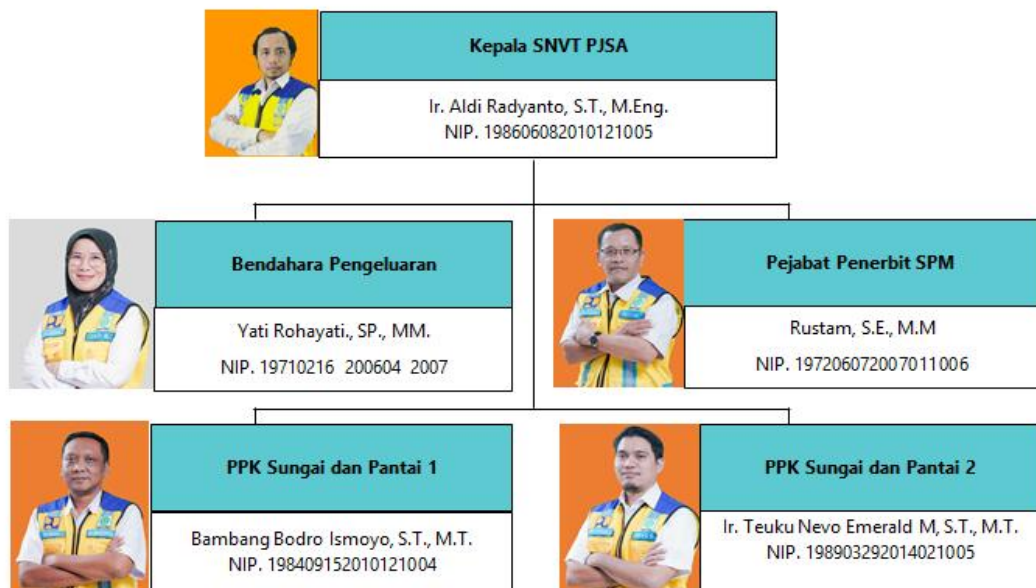
1. Kepala SNVT
2. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. UAKPA dan UAKPB

5. Koordinator Teknik

6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari :

- PPK Sungai dan Pantai I;
- PPK Sungai dan Pantai II.

Rincian struktur organisasi fungsional pada SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 4** sebagai berikut:



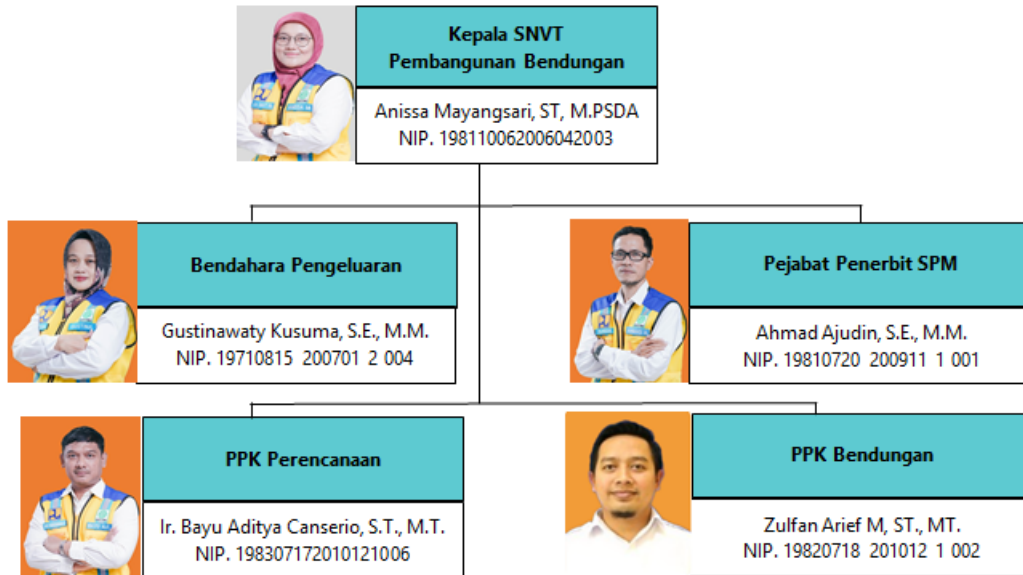
Gambar 4 - Struktur Organisasi SNVT PJSA C3

1.3.5 Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari :
 - PPK Perencanaan Bendungan;
 - PPK Bendungan.

Rincian struktur organisasi fungsional pada SNVT Pembangunan Bendungan Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 6** sebagai berikut:



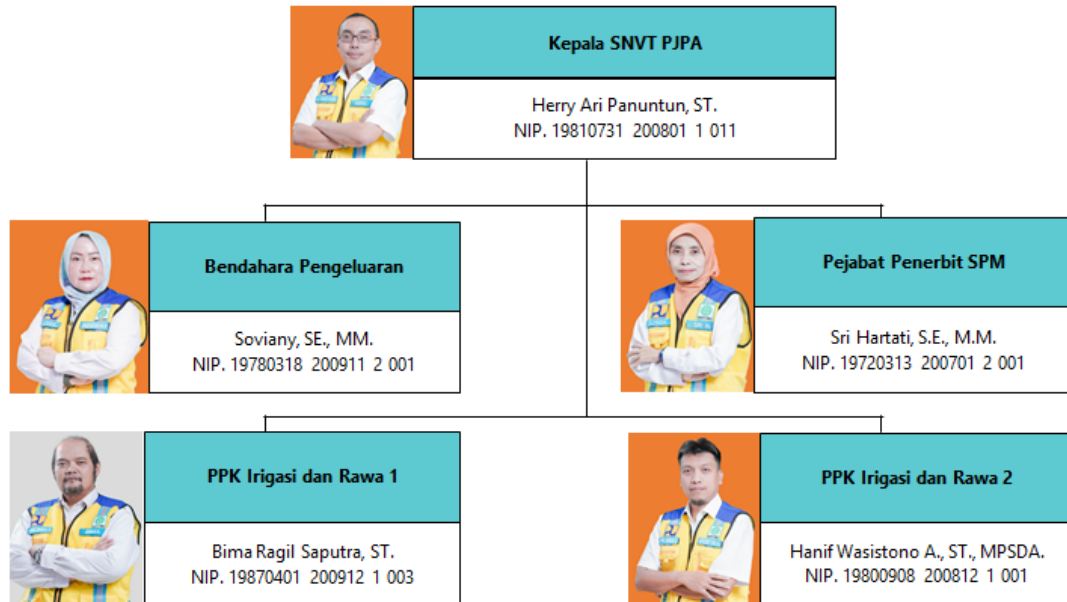
Gambar 5 - Struktur Organisasi SNVT Pembangunan Bendungan BBWS C3

1.3.6 Struktur Organisasi SNVT PJPA Cidanau-Ciujung-Cidurian

SNVT PJPA Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala SNVT
2. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. Koordinator Pelaksana Teknik
5. Koordinator Pelaksana Administrasi
6. UAKPA dan UAKPB (Petugas BMN)
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari :
 - PPK Irigasi dan Rawa 1;
 - PPK Irigasi dan Rawa 2;

Rincian struktur organisasi fungsional pada SNVT PJPA Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 5** sebagai berikut:



Gambar 6 -Struktur Organisasi SNVT PJPA C3

1.3.7 Struktur Organisasi Satker OP SDA Cidanau-Ciujung-Cidurian

Satker OP SDA Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala Satker
2. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari :
 - PPK OP SDA 1;
 - PPK OP SDA 2;
 - PPK OP SDA 3.

Rincian struktur organisasi fungsional pada Satker OP SDA Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 7** sebagai berikut:



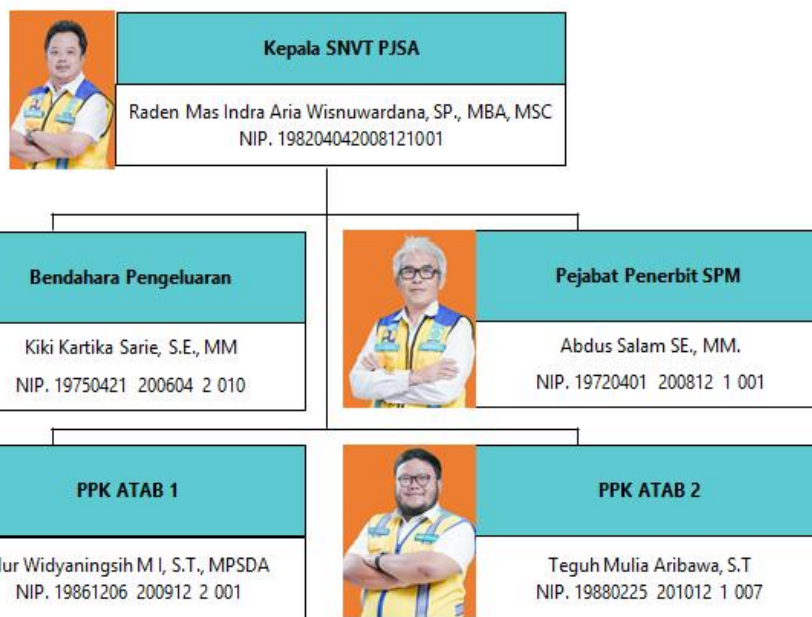
Gambar 7 - Struktur Organisasi Satker OPSDA C3

1.3.8 Struktur Organisasi SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran bidang sumber daya air dan terdiri dari:

1. Kepala Satker
2. Petugas yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
3. Bendahara Pengeluaran
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari :
 - PPK Air Tanah dan Air Baku I;
 - PPK Air Tanah dan Air Baku II.

Rincian struktur organisasi fungsional pada SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 8** sebagai berikut:



Gambar 8 - Struktur Organisasi SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS C3

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset dan unsur utama yang dibutuhkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan, target, sasaran serta menjaga eksistensi organisasi itu sendiri. Pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, peran SDM dalam pelaksanaan manajemen organisasi antara lain sebagai pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan. Peran SDM tersebut dapat menentukan keberhasilan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian dalam membangun infrastruktur sumber daya air yang andal serta keberhasilan dalam mewujudkan *good governance*.

1.3.9 SDM Berdasarkan Penempatan dan Status Kepegawaian

Pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, terdapat 6 (enam) Satuan Kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari balai yaitu: Satker Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, Satker Operasi & Pemeliharaan Sumber Daya Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau-Ciujung-Cidurian, SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dan SNVT Air Tanah Dan Air Baku BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

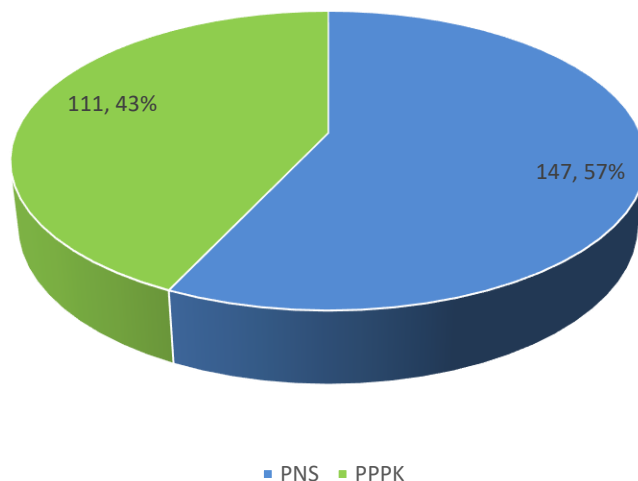
Tabel 1 - Status Kepegawaian di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

NO.	SATKER/SNVT	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH (ORANG)
		PNS	PPPK	
1.	Balai & Struktural	80	62	142
2.	PJSA	13	4	17
3.	PJPA	15	5	20
4.	Pembangunan Bendungan	9	4	13
5.	OPSDA	19	33	52
6.	ATAB	11	3	14
	Total	147	111	258

Sumber: Data Kepegawaian, 2025

Total SDM sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang yang disebutkan di atas terdiri dari 147 (seratus empat puluh tujuh) orang PNS, 111 (seratus sebelas) orang PPPK. Sebaran SDM menurut status kepegawaian untuk setiap Satuan Kerja di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian disajikan pada tabel dan diagram berikut:

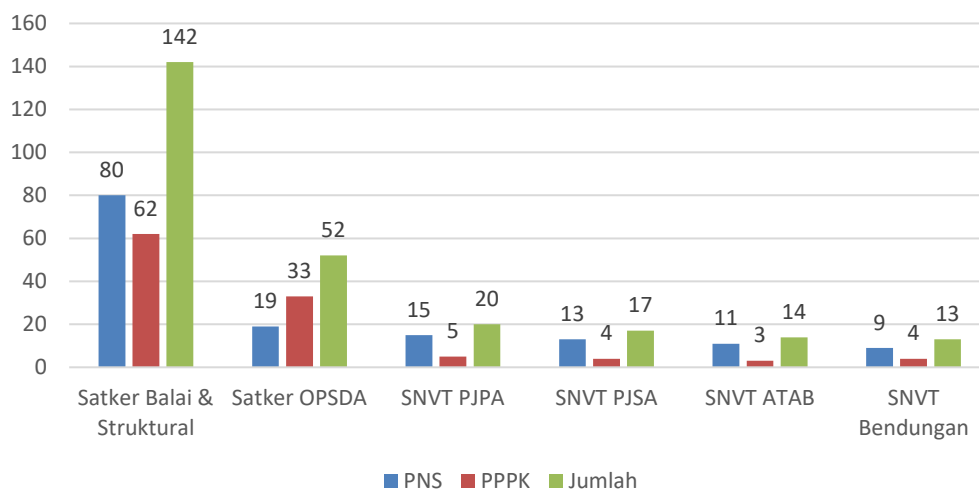
**Distribusi Pegawai BBWS C3 Menurut Status Kepegawaian
(Total = 258 Org)**



Gambar 9 - Status SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2025

Penempatan SDM tersebut sudah memperhatikan jumlah kebutuhan SDM untuk setiap Satker. Melihat data di atas, jumlah SDM yang paling banyak terdapat pada Satker Balai dan Satker OPSDA.

GRAFIK REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN UNIT KERJA TAHUN 2025



Gambar 10 - Status Kepegawaian SDM untuk Setiap Satker Tahun 2023

1.3.10 SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

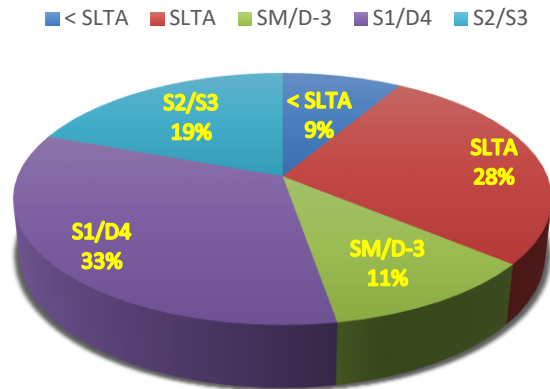
SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam, mulai dari lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga paling tinggi yaitu lulusan Sarjana Strata-2 (S2). Sebaran pendidikan untuk SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 2 - Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	ASN		JUMLAH
	PNS	PPPK	
< SLTA	2	20	22
SLTA	28	43	71
SM/D-3	17	12	29
S1/D4	50	36	86
S2/S3	50	0	50
	Total		258

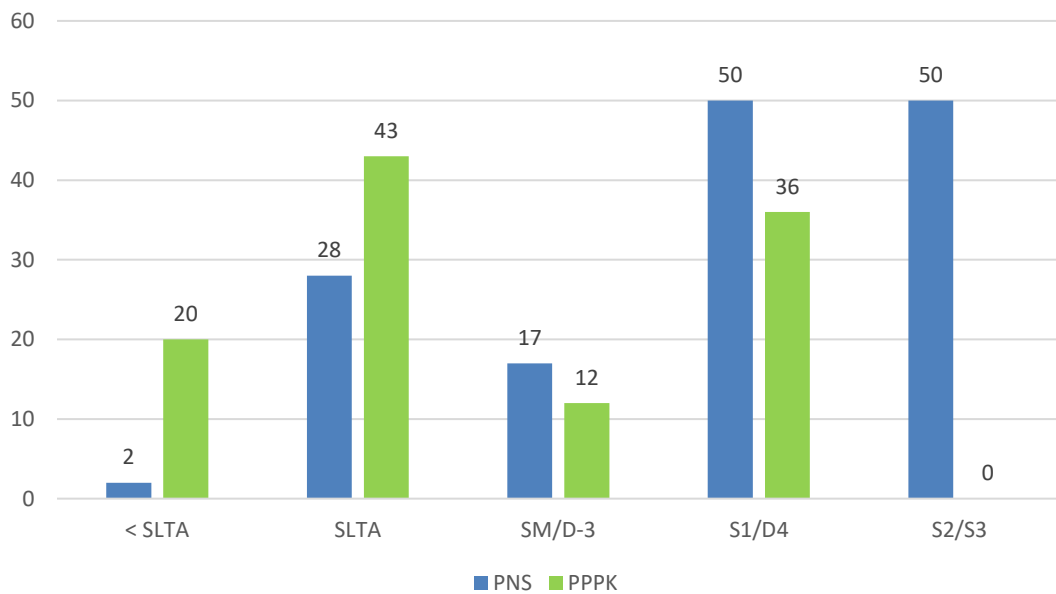
Sumber: Data Kepegawaian, 2025

Distribusi Pegawai Menurut Pendidikan (Total = 258 Org)



Gambar 11 - Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 12 – Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian didominasi oleh lulusan S1 sejumlah 86 (Delapan puluh enam) pegawai (33%) dan terbanyak kedua adalah lulusan SMA sejumlah 71 (Tujuh puluh satu) pegawai (28%).

Dalam setiap tahunnya, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian telah mengikutsertakan pegawai baik yang berstatus PNS maupun Non PNS dalam berbagai diklat dan bimbingan teknis yang diadakan oleh BPSDM, Ditjen SDA maupun instansi

lainnya. Pada tahun 2025, pegawai ASN yang berstatus PPPK juga diikuti dalam berbagai diklat dan bimbingan teknis. Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah SDM yang telah diikutsertakan dalam kegiatan diklat selama tahun 2025.

Tabel 3 - Data SDM yang Diikutsertakan dalam Diklat Tahun 2025

NO	TANGGAL DIKLAT	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH PESERTA
TRIWULAN I			
1	Maret	Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu	3
2	Maret	Pelatihan Perencanaan Teknis Sungai	1
3	Maret	Pelatihan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	1
4	Maret	Geographic Information System (GIS)	1
5	Maret	Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern Angkatan II	1
6	Maret	Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
7	Maret	Pelatihan Manajemen Risiko	2
8	Maret	Pelatihan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha	1
9	Maret	Manajemen Rantai Pasok	1
TRIWULAN II			
10	April	Pelatihan Perencanaan Teknis Sungai	3
11	May	Pelatihan Pilar Pengelolaan Sumber Daya Air	1
12	June	e-Learning Pejabat Inti Satuan Kerja (PISK) Manajemen Angkatan V	1
13	July	E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI)	17
14	Mei	Pelatihan Perencanaan Teknis Air Tanah	1
15	Mei	Workshop Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang SDA sesuai SE Ditjen Bina Konstruksi No 30 Tahun 2025	3
16	Juni	Pelatihan Pengantar Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tingkat Lanjut	1
17	Juni	Pelatihan Pilar Pengelolaan Sumber Daya Air	1
18	Juni	Pelatihan Teknologi Sistem Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	1



NO	TANGGAL DIKLAT	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH PESERTA
19	Juni	Coaching Clinic dan Rapat Koordinasi Nasional Laboratorium Lingkungan Seluruh Indonesia	1
20	Juni	Bimbingan Teknis Sekretariat TKPSDA WS TA 2025	1
21	Juni	Pelatihan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia	2
TRIWULAN III			
22	Juli	Pelatihan PBJP bagi PPK Tipe C (PBJ Level-2)	6
23	Juli	Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	2
24	Juli	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	6
25	Juli	Pemahaman dan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapain (SMAP) ISO 37001:2025	14
26	Juli	PELATIHAN AUDIT INTERNAL SMAP – ISO 37001:2025	8
27	September	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level I	3
28	October	Pelatihan Persiapan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Karian	18
29	November	PJJ PPK	5
30	December	Sertifikasi Kompetensi Pejabat Fungsional Analisis SDM Aparatur	2
31	January	Peningkatan Kompetensi Teknis Pengajar Bidang SDA	3
TRIWULAN IV			
32	Oktober	Pelatihan Perencanaan Teknis Air Tanah	1
33	Oktober	Bimbingan Teknis Penyusunan Neraca Air	1
34	Oktober	Pelatihan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi	2
35	Oktober	Pelatihan Teknis JF Bidang Keuangan APBN	1
36	Oktober	Pengembangan Kapasitas Pemimpin Masa Depan	1
37	Oktober	IWRM Training - Part of The Blue Deal Programme	1

NO	TANGGAL DIKLAT	DIKLAT YANG DIKUTI	JUMLAH PESERTA
38	Oktober	Uji Sertifikasi PBJP bagi PPK Tipe C (PBJ Level-2)	6
39	November	Pelatihan Teknis JF Bidang Keuangan APBN	2
40	December	Pelatihan Bela Negara CPNS	6
41	Desember	1. Bimbingan Teknis Kebijakan AHSP, SIPASTI, E-Katalog, dan TKDN	1
Total Peserta Pelatihan			134

Sumber: Data Kepegawaian, 2025

1.3.11 SDM Berdasarkan Gender

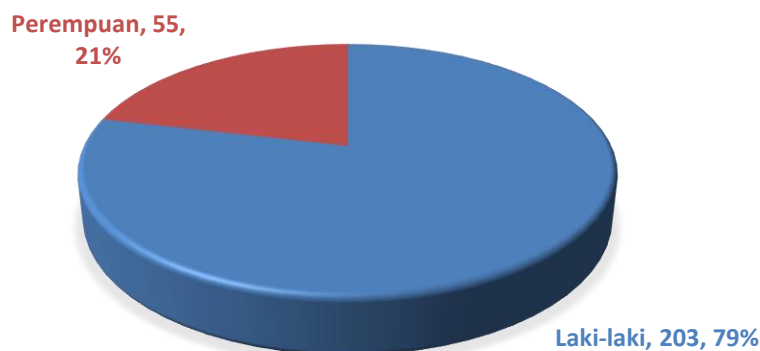
Berdasarkan gender, dari 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang pegawai, sebanyak 203 (dua ratus tiga) pegawai berjenis kelamin pria dan sebanyak 55 (lima puluh lima) pegawai berjenis kelamin wanita.

Tabel 4 - Komposisi SDM Berdasarkan Gender

JENIS KELAMIN (GENDER)	JUMLAH
Pria	203
Wanita	55

Sumber: Data Kepegawaian, 2025

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



Gambar 13 - Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Dari data di atas terlihat bahwa gender yang ada di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian didominasi oleh pria sebanyak 203 (dua ratus tiga) orang (79%). Jumlah pria yang lebih dominan ini antara lain disebabkan oleh kebutuhan pegawai pria untuk melaksanakan pekerjaan fisik/lapangan.

1.3.12 SDM Berdasarkan Golongan

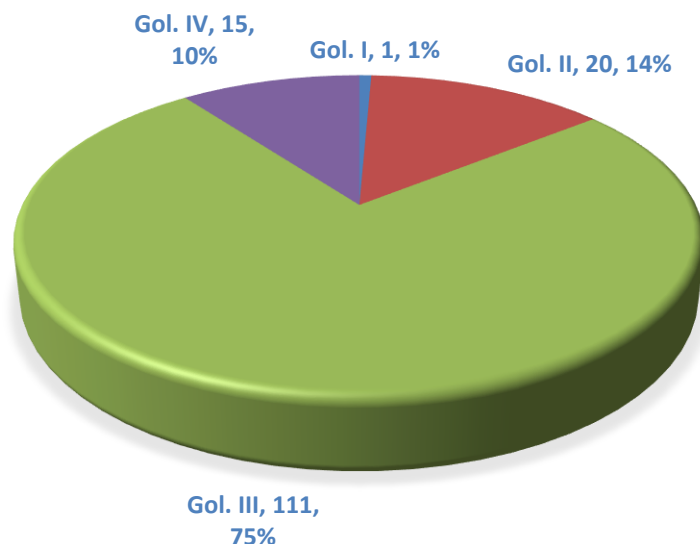
Berdasarkan golongannya, SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian terdiri dari golongan I, II, III dan IV. Pengelompokan SDM berdasarkan golongan tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut ini.

Tabel 5 - Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	A	B	C	D	JUMLAH
I	-	-	1	-	1
II	1	1	7	11	20
III	30	29	19	33	111
IV	13	2	-	-	15
Total					<u>147</u>

Sumber: Data Kepegawaian, 2025

Komposisi SDM Berdasarkan Golongan



Gambar 14 - Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

1.3.13 SDM Berdasarkan Tingkat Usia

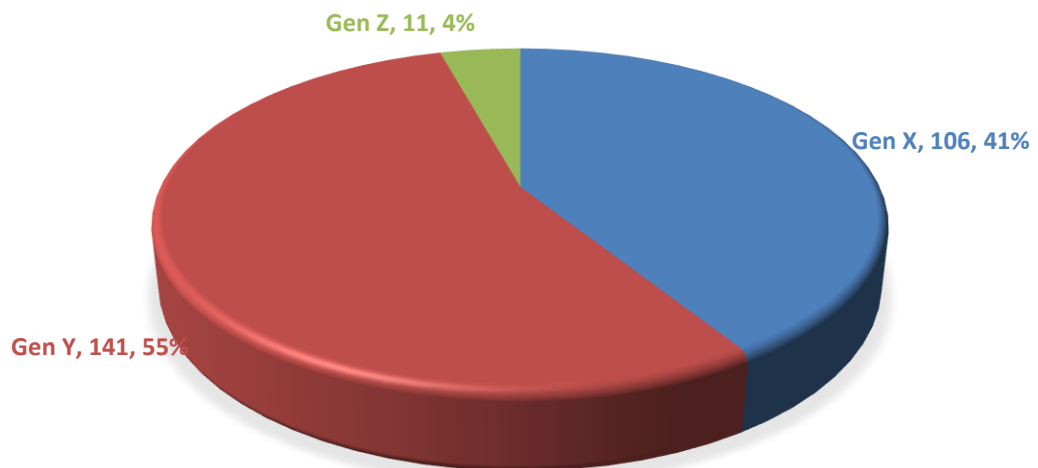
SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian bila kategorikan dari rentang usianya, terlihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 6 - Sebaran SDM Berdasarkan Rentang Usia

TINGKAT USIA	ASN		JUMLAH
	PNS	PPPK	
Gen X	80	26	106
Gen Y	60	81	141
Gen Z	7	4	11
	Total		258

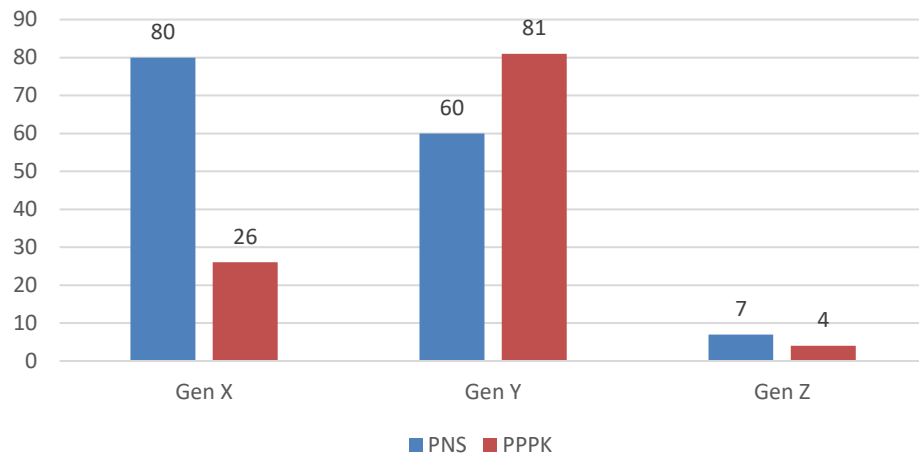
Sumber: Data Kepegawaian, 2025

Distribusi Non-pns Berdasarkan Kelompok Umur



Gambar 15 - Komposisi SDM Berdasarkan Rentang Usia

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENERASI



Gambar 16 - Komposisi SDM Berdasarkan Rentang Usia

Berdasarkan tabel dan **Gambar 15 dan 16** dapat dilihat bahwa sebanyak 41% SDM di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian masuk dalam kategori gen Y dengan rentang usia antara 45-60 tahun, 55% berusia masuk dalam kategori gen X dengan rentang usia 29 kurang dari 44 tahun, dan 4% berusia masuk dalam kategori gen Z dengan rentang usia maksimal 28 tahun. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada rentang usia produktif. Usia tersebut memungkinkan pemaksimalan pencapaian kinerja yang sudah ditargetkan. Akan tetapi, persentase pegawai dalam rentang usia tua juga cukup besar. Hal tersebut menunjukkan adanya *gap* yang cukup jauh antara pegawai senior dengan pegawai yang berada di usia produktif. Untuk mengatasi potensi masalah yang dapat timbul akibat *gap* tersebut, diperlukan *sharing knowledge*/alih pengetahuan yang tepat dari pegawai senior ke generasi muda.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, kinerja BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian akan dipengaruhi oleh dukungan SDM yang ada di dalamnya. Hal-hal yang perlu dijadikan perhatian dalam hal pengelolaan SDM antara lain:

1. Penempatan pegawai yang tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan kompetensi.
2. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan dengan pengikutsertaan pegawai (PNS maupun Non PNS) ke dalam diklat dan *training* yang sesuai

dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kinerja.

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Selain SDM, sarana dan prasarana merupakan unsur penting yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dalam rangka mewujudkan infrastruktur SDA yang berkualitas. Secara definisi, sarana adalah segala sesuatu yang DIPakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang berupa penunjang utama dari terselenggaranya suatu proses pembangunan/proyek.

Berikut adalah beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Tabel 7 - Sarana dan Prasarana

NO.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH (Unit)	KONDISI
1.	Bangunan Gedung		
	Kantor Permanen	14	Baik
	Bengkel/ Hanggar Permanen	3	Baik
	Laboratorium Permanen	2	Baik
	Pendidikan Permanen	6	Baik
	Tempat Ibadah Permanen	4	Baik
	Tempat Olahraga	3	Baik
	Gudang tertutup	5	Baik
	Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen	1	Baik
	Pos Jaga Permanen	32	Baik
	Flat/ Rumah Susun Permanen	1	Baik
	Instalasi Lainnya	3	Baik
	Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	3	Baik
	Tempat Kerja Lainnya Permanen	6	Baik
2.	Kendaraan Dinas Operasional (KDO)		
	Kendaraan Roda 4	31	21 Baik, 10 Rusak Berat
	Kendaraan Roda 2	87	34 Baik, 53 Rusak Berat
	Perahu Motor Tempel/ <i>Speed Boat</i>	12	10 Baik, 2 Rusak Ringan
	Kendaraan Bermotor Roda tiga	64	Baik
	Truck Ponton dengan Trailer	1	Baik
	Micro Bus (Penumpang 15 s/d 29 org)	2	Baik
3.	Peralatan dan Mesin		
	PC Unit	59	44 Baik, 5 Rusak Ringan
	<i>Laptop/Net Book/Note Book</i>	113	112 Baik, 1 Rusak Ringan
	<i>Pompa Centrifugal</i>	69	Baik
4.	Alat Berat		
	a. <i>Excavator</i>		

NO.	SARANA/PRASARANA	JUMLAH (Unit)	KONDISI
	Standard PC 200 Caterpillar	1	Baik
	Standard PC 200 Pindad	2	Baik
	Long Arm 210 Sumitomo	1	Baik
	Floating Excavator Amphibi Sumitomo	2	Baik
	Mini PC 50 Yanmar	1	Baik
	Long Arm Samsung	1	Rusak Ringan
	Crawler Excavator Degline Grandex	1	Rusak berat
b.	Alat Angkut		
	Trailer Hino	1	Baik
	Trailer Isuzu	1	Baik
	Dump Truck Hino	1	Baik
	Dump Truck Hyundai	1	Baik
	Engkel Isuzu	1	Baik
	Mobile Pump Hino	1	Baik
c.	Dredger		
	Cutter Section Damen	3	Baik
d.	Perahu		
	Perahu Karet Acisa	2	Baik
	Mesin Perahu Honda 2Hp	2	Baik

Sumber: Data BMN, 2023

Terlihat pada **Gambar 15**, terdapat sarana berupa alat berat yang selain berfungsi untuk pemeliharaan rutin infrastruktur SDA yang ada di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian, juga disiagakan untuk menghadapi bencana banjir maupun kekeringan.



Gambar 17 - Sarana Alat Berat



1.5 ISU STRATEGIS

1.5.1 Gambaran Umum Wilayah Sungai 3 Ci

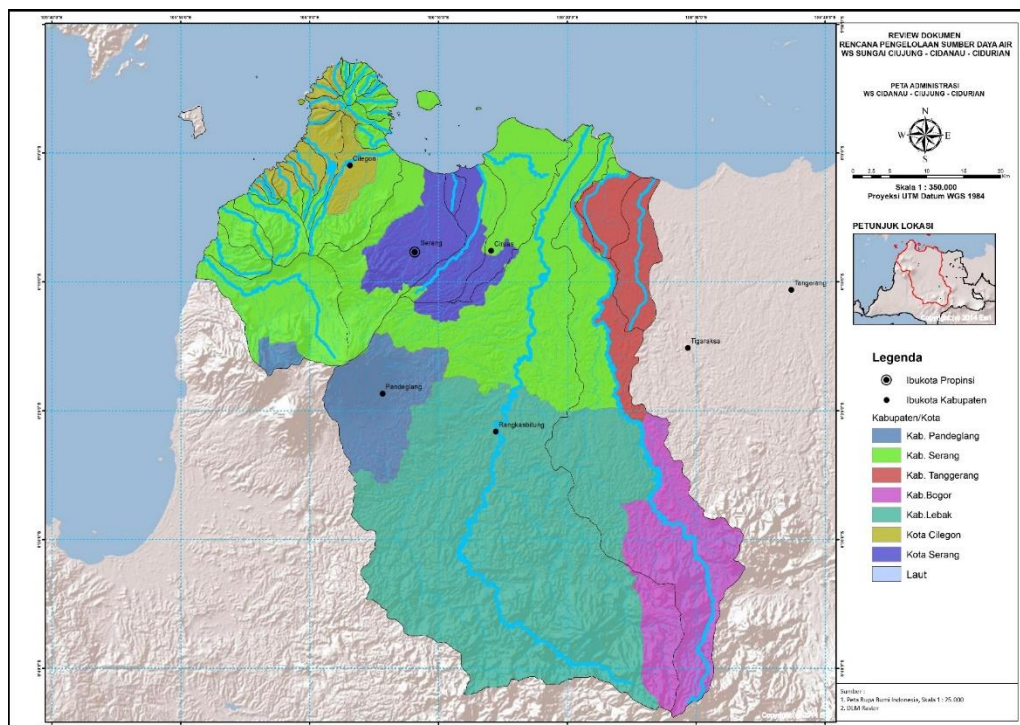
Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang selanjutnya disebut dengan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dengan luas 4.206,76 km² terbagi menjadi 37 DAS besar dan kecil. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Banten serta 1 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

- I. Provinsi Banten
 - a. Kota Serang
 - b. Kota Cilegon
 - c. Kabupaten Serang
 - d. Kabupaten Tangerang
 - e. Kabupaten Pandeglang
 - f. Kabupaten Lebak
- II. Provinsi Jawa Barat
 - a. Kabupaten Bogor

Potensi air yang ada di Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terutama berasal dari 3 Sungai besar yaitu Sungai Cidanau, Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian. Sedangkan secara geografis WS Cidanau-Ciujung-Cidurian terletak pada posisi antara 60° 43' 55.5"LS sampai 50° 52' 24.7"LS dan antara 105° 51' 1.2 "BT sampai 106° 3' 58.3"BT dan berada dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Wilayah Administrasi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian dapat dilihat pada **Gambar 9**. Batasan Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian secara hidrologis:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan WS Ciliwung-Cisadane (WS C2)



Gambar 18 - Wilayah Administrasi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Sumber: Permen PUPR No. 4 th 2015, Bappeda Prov. Banten, 2021

Tabel 8 - Luas dan Wilayah Administratif DAS WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

KODE	NAMA DAS	KABUPATEN/ KOTA	LUAS(Km ²)	%
020	Das Bojonegara	Kabupaten Serang	1,99	0,05
021	Das Candi	Kabupaten Serang	3,88	0,09
016	Das Caringin	Kabupaten Serang	3,10	0,07
025	Das Cibako	Kabupaten Serang	12,16	0,29
027	Das Cibanten	Kabupaten Serang	126,21	3,03
030	Das Cibunar	Kabupaten Serang	132,69	3,18
009	Das Cicendo	Kabupaten Serang	5,70	0,14
001	Das Cidanau	Kabupaten Serang	204,74	4,91
032	Das Cidurian	Kabupaten Serang	148,00	3,55
010	Das Cigeblak	Kabupaten Serang	0,33	0,01
026	Das Cigisik	Kabupaten Serang	81,48	1,95
008	Das Cigobang	Kabupaten Serang	6,75	0,16
024	Das Cikaidu	Kabupaten Serang	10,83	0,26
002	Das Cikalahi	Kabupaten Serang	34,81	0,83
022	Das Cikebel	Kabupaten Serang	9,51	0,23
011	Das Cikebeletes	Kabupaten Serang	9,92	0,24
023	Das Cikubang	Kabupaten Serang	5,38	0,13
004	Das Cilegok	Kabupaten Serang	55,95	1,34
018	Das Cinangka	Kabupaten Serang	8,58	0,21

KODE	NAMA DAS	KABUPATEN/ KOTA	LUAS(Km ²)	%
013	Das Cinangsi	Kabupaten Serang	1,24	0,03
015	Das Cipetey	Kabupaten Serang	1,43	0,03
017	Das Ciraginggang	Kabupaten Serang	3,66	0,09
033	Das Cirumpak	Kabupaten Serang	6,30	0,15
031	Das Ciujung	Kabupaten Serang	432,53	10,37
029	Das Ciwaku	Kabupaten Serang	32,96	0,79
007	Das Kalimalang	Kabupaten Serang	0,50	0,01
006	Das Kopo Masjid	Kabupaten Serang	2,09	0,05
003	Das Runteun Girang	Kabupaten Serang	33,11	0,79
005	Das Setu Lor	Kabupaten Serang	2,34	0,06
019	Das Sumur	Kabupaten Serang	5,91	0,14
036	Das Panjang	Kabupaten Serang	6,54	0,16
037	Das Sangiang	Kabupaten Serang	6,73	0,16
035	Das Tunda	Kabupaten Serang	2,83	0,07
030	Das Cibunar	Kota Serang	22,45	0,54
029	Das Ciwaku	Kota Serang	79,05	1,90
027	Das Cibanten	Kota Serang	132,39	3,17
031	Das Ciujung	Kota Serang	25,62	0,61
028	Das Cirangrang	Kota Serang	13,35	0,32
025	Das Cibako	Kota Cilegon	0,54	0,01
012	Das Cibatu	Kota Cilegon	6,85	0,16
009	Das Cicendo	Kota Cilegon	7,66	0,18
010	Das Cigeblak	Kota Cilegon	20,25	0,49
026	Das Cigisik	Kota Cilegon	53,43	1,28
008	Das Cigobang	Kota Cilegon	11,73	0,28
024	Das Cikaidu	Kota Cilegon	1,25	0,03
011	Das Cikebeletes	Kota Cilegon	31,52	0,76
013	Das Cinangsi	Kota Cilegon	8,18	0,20
015	Das Cipetey	Kota Cilegon	7,63	0,18
014	Das Cisalak	Kota Cilegon	8,12	0,19
007	Das Kalimalang	Kota Cilegon	4,91	0,12
006	Das Kopo Masjid	Kota Cilegon	2,36	0,06
005	Das Setu Lor	Kota Cilegon	1,59	0,04
027	Das Cibanten	Kabupaten Pandeglang	0,38	0,01
001	Das Cidanau	Kabupaten Pandeglang	22,99	0,55
031	Das Ciujung	Kabupaten Pandeglang	222,41	5,33
032	Das Cidurian	Kabupaten Tangerang	69,25	1,66
034	Das Cipayeun	Kabupaten Tangerang	99,48	2,39
033	Das Cirumpak	Kabupaten Tangerang	60,06	1,44
032	Das Cidurian	Kabupaten Bogor	317,62	7,62
031	Das Ciujung	Kabupaten Bogor	91,12	2,18
032	Das Cidurian	Kabupaten Lebak	203,24	4,87
031	Das Ciujung	Kabupaten Lebak	1.245,22	29,86
Jumlah			4.170,85	100,00

Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) DAS yang terbagi atas 3 (tiga) DAS utama, yaitu DAS Cidanau, DAS Ciujung, dan

DAS Cidurian, 31 (tiga puluh satu) DAS menengah dan kecil serta 3 (tiga) DAS Pulau. Luas tiap DAS dapat direkap pada **Tabel 8** dan **Gambar 10**.

1) DAS Cidanau

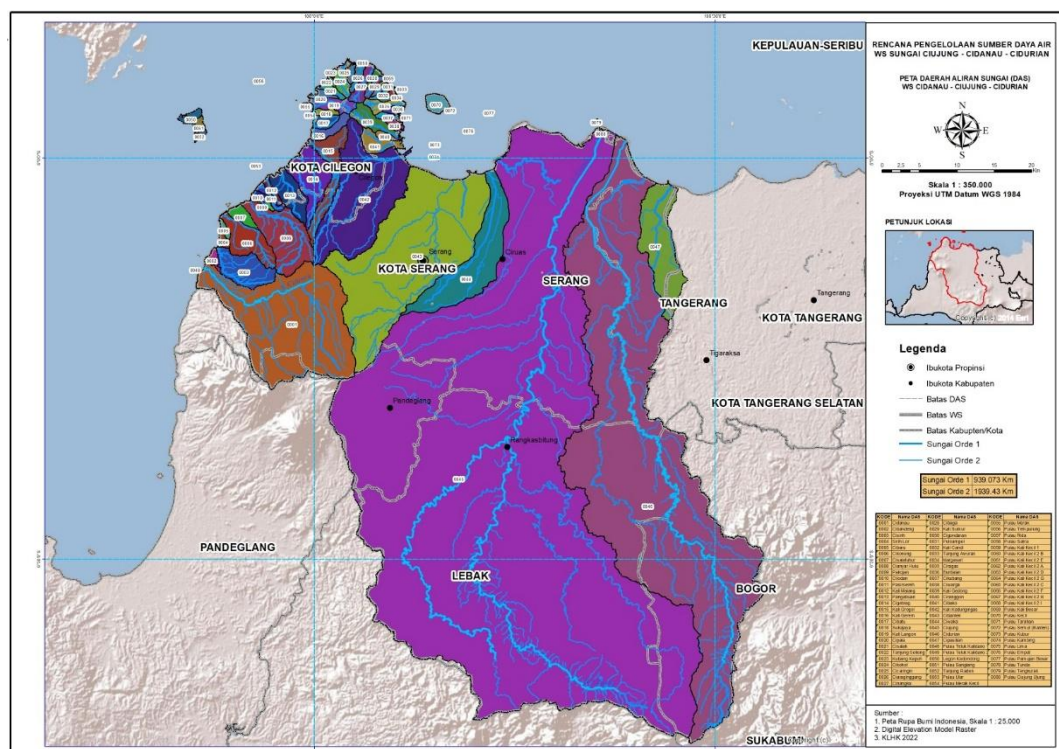
Secara administratif DAS Cidanau terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang Provinsi Banten. Luas DAS Cidanau $\pm 227,73$ km², dengan panjang sungai utamanya $\pm 22,70$ Km.

2) DAS Ciujung

DAS Ciujung terletak di Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang di Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Luas DAS Ciujung $\pm 2.016,9$ km², dengan panjang sungai utamanya $\pm 128,00$ Km.

3) DAS Cidurian

DAS Cidurian terletak di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak di Provinsi Banten dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Luas DAS Cidurian $\pm 738,11$ km², dengan panjang sungai utamanya $\pm 70,90$ Km.



Gambar 19 - Peta DAS WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah 2022

Secara umum kondisi topografi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian di dominasi daerah ketinggian antara 0-750 dpl yaitu mencapai 93,56 %, sedangkan daerah dengan ketinggian di atas 1.000 mdpl sebesar 6,44%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel pada Tabel 2.3. dan Gambar 2.3. di bawah ini.

Tabel 9 - Topografi/ketinggian WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

No.	Ketinggian (mdpl)	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	0 - 50	1.599,68	38,03
2	50 - 150	1.264,25	30,05
3	150 - 300	565,62	13,45
4	300 - 500	278,49	6,62
5	500 - 750	227,80	5,42
6	750 - 1000	118,45	2,82
7	1000 - 1250	71,38	1,70
8	1250 - 1500	56,56	1,34
9	> 1500	24,52	0,58
Total		4.206,76	100,00

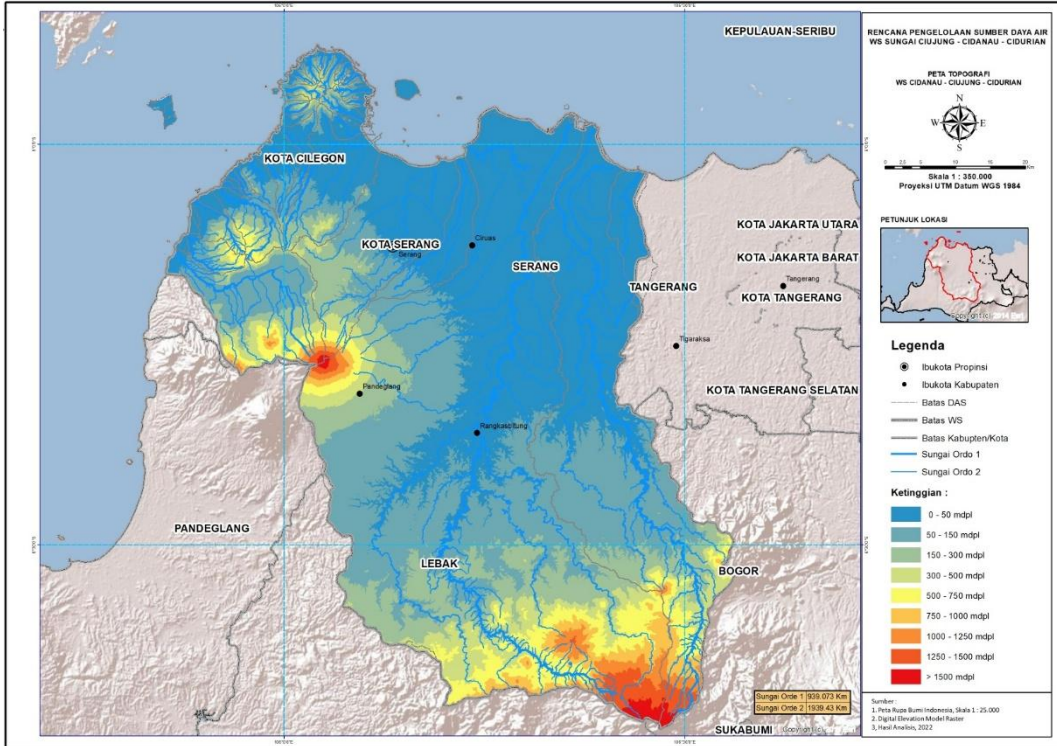
Sumber: Analisis DEMNAS, 2022

Sedangkan kemiringan lahan (Kelerengan) lahan dapat dilihat pada **Tabel 3** dan **Gambar 12** di bawah.

Tabel 10 - Kelerengan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

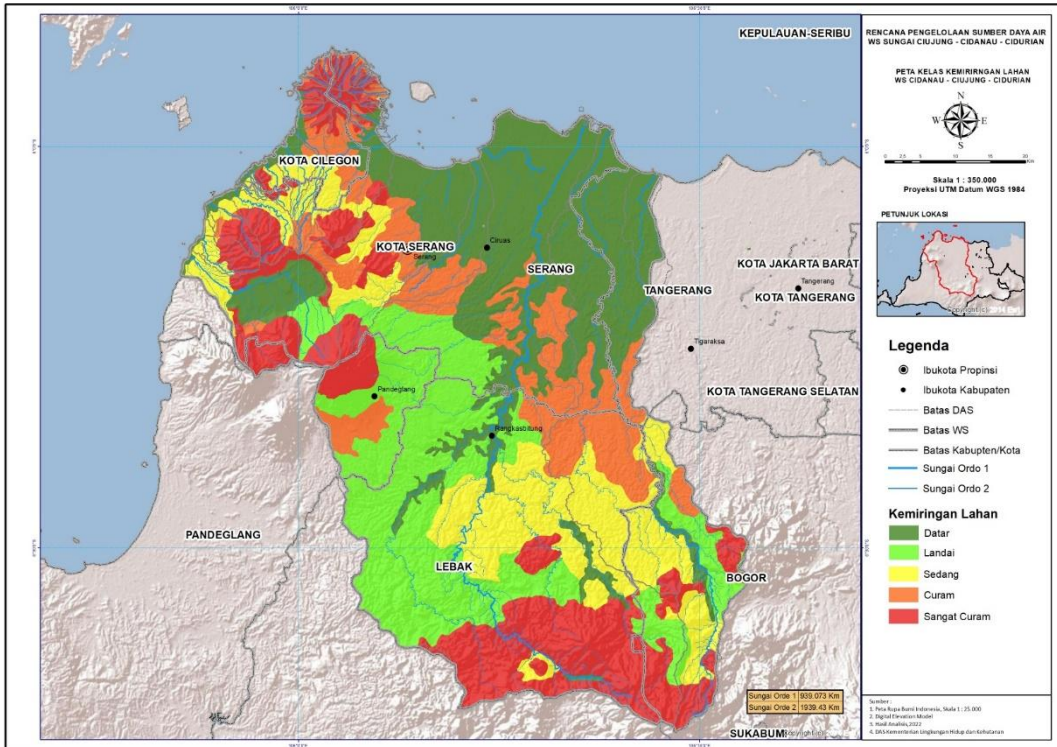
No	Lereng	Keterangan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	<8 %	Datar	2.744,23	65,23
2	8-15%	Landai	827,20	19,66
3	16-25%	Agak Curam	467,33	11,11
4	26-40%	Curam	157,93	3,75
5	>40%	Sangat Curam	10,06	0,24
Total			4.206,76	100,00

Sumber: Analisis DEMNAS, 2022



Gambar 20 - Peta Topografi WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Sumber: Digital Elevation Model Nasional, diolah 2022



Gambar 21 - Peta Kelas Kemiringan Lahan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

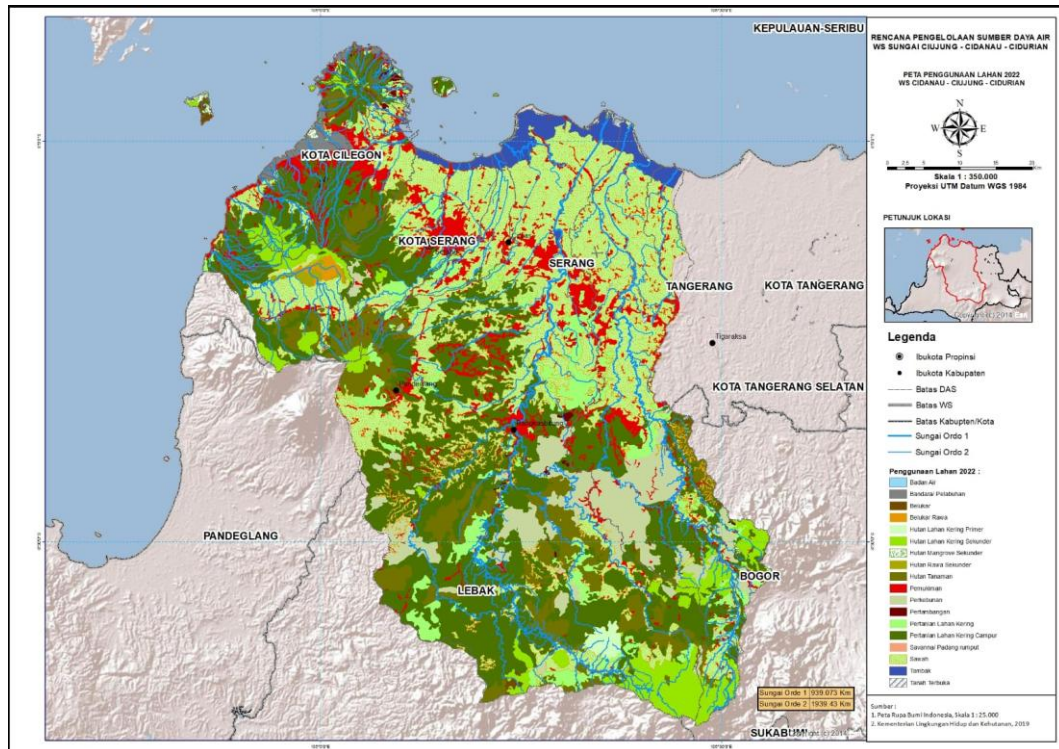
Sumber: Digital Elevation Model Nasional, diolah 2022

Penggunaan lahan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian secara umum terdiri dari lahan sawah (lahan basah) dan lahan non-sawah (lahan kering). Lahan non-sawah terdiri dari lahan untuk bangunan dan pekarangan, lahan untuk tegalan, ladang, kebun, lahan untuk kolam (empang, tambak), lahan untuk tanaman kayu-kayuan, lahan untuk hutan rakyat, perkebunan, lahan untuk hutan negara, lahan untuk industri. Luasan masing-masing lahan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 11 - Penggunaan Lahan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian

No	Penggunaan Lahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Badan Air	4,95	0,12
2	Bandara/ Pelabuhan	30,51	0,73
3	Belukar	6,95	0,17
4	Belukar Rawa	11,38	0,27
5	Hutan Lahan Kering Primer	18,05	0,43
6	Hutan Lahan Kering Sekunder	242,59	5,77
7	Hutan Mangrove Sekunder	7,15	0,17
8	Hutan Rawa Sekunder	9,06	0,22
9	Hutan Tanaman	346,29	8,23
10	Pemukiman	401,72	9,55
11	Perkebunan	295,14	7,02
12	Pertambangan	8,91	0,21
13	Pertanian Lahan Kering	263,43	6,26
14	Pertanian Lahan Kering Campur	1272,64	30,25
15	Savanna/ Padang rumput	0,56	0,01
16	Sawah	1189,12	28,27
17	Tambak	94,33	2,24
18	Tanah Terbuka	3,97	0,09
	Total	4.206,76	100,00

Sumber: Peta Tutupan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022



Gambar 22 - Peta Penggunaan Lahan WS Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2022

Sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diolah 2022 Isu Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air


A. Isu-Isu Strategis Nasional

Kesepakatan *Sustainable Development Goals* (SDG's) tujuan ke-6, menargetkan pada tahun 2030 akses layanan air bersih dan sanitasi mencapai 100 %. Sementara itu, tingkat layanan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi di Provinsi Banten saat ini (2021) sebesar 82,89%. Dengan sisa waktu 8 tahun untuk meningkatkan tingkatan layanan menjadi 100% merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

1. Ketahanan Air

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan pada 17 November 2020 menargetkan secara nasional membangun 57 Bendungan dengan kapasitas 14,7 Milyar m³, baru terealisasi 13,8 Milyar m³ pada tahun 2019. Di samping itu ditargetkan membangun 2.500 buah embung.

Saat ini, WS Cidanau-Ciujung-Cidurian telah memiliki 2 (dua) buah bendungan, yaitu Bendungan Karian dan Sindangheula dengan kapasitas tampungan efektif sebesar 216,66 juta m³. Potensi bendungan yang masih memungkinkan



dibangun di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian ada 5 (lima) buah, yaitu Waduk Cidanau, Pasir Kopo, Tanjung, Cilawang dan Bojong Manik dengan kapasitas tampungan efektif total sebesar 296,06 juta m³.

Target SDG's tujuan ke-6 (enam), yaitu akses air minum dan sanitasi layak pada tahun 2030 adalah 100% terlayani. Cipta Karya menargetkan 100% terlayani pada tahun 2019. Realisasi capaian SDG's tujuan ke-6 di Kota Serang untuk layanan air bersih sebesar 98,38%, sedangkan untuk akses sanitasi layak sebesar 90,76%. Capaian SDG untuk Kabupaten dan Kota di WS C3 lainnya adalah sebagai berikut :

- Kota Cilegon : air minum layak = 98,72 %, sanitasi layak = 97,07 % (BPS Provinsi Banten : Provinsi Banten dalam angka 2023)
- Kabupaten Serang: air minum layak = 92,33 %, sanitasi layak = 80,34 % (BPS Provinsi Banten : Provinsi Banten dalam angka 2023)
- Kabupaten Lebak: air minum layak = 73,32 %, sanitasi layak = 56,82% (BPS Provinsi Banten : Provinsi Banten dalam angka 2023)
- Kabupaten Pandeglang : air minum layak = 82,01 %, sanitasi layak = 49,11% (BPS Provinsi Banten : Provinsi Banten dalam angka 2023)
- Kabupaten Tangerang : air minum layak = 97,97 %, sanitasi layak = 85,89% (BPS Provinsi Banten : Provinsi Banten dalam angka 2023)
- Kabupaten Bogor : air minum layak = 91,83 %, sanitasi layak = 63,91% (BPS Kab. Bogor : Kab. Bogor dalam angka 2023)

2. Kedaulatan Pangan

Pada tahun 2021 Produksi Padi Provinsi Banten ± 1,63 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), mengalami penurunan 1,53% dari tahun 2020 (1,65 juta ton). Kebutuhan pangan penduduk pada tahun 2021 sebesar ± 0,92 Jt ton GKG, dengan demikian terjadi Surplus, sehingga mampu menyumbang kebutuhan pangan bagi daerah lain. Kebutuhan pangan pada 20 tahun ke depan akan mencapai ±1,33 juta ton GKG. Dengan demikian bila produksi beras bisa dipertahankan tetap selama 20 tahun ke depan masih akan surplus ± 272 ribu ton GKG.



3. Perubahan Iklim Global

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada *Assessment Report* yang ke-6 (*Sixth Assessment Report (AR6) of the IPCC*), telah membuat proyeksi risiko pada jangka pendek (2021-2040), antara lain pemanasan jangka pendek dan peningkatan frekuensi, tingkat keparahan, dan durasi peristiwa ekstrem akan menempatkan banyak ekosistem darat, air tawar, pesisir, dan laut pada risiko kehilangan keanekaragaman hayati yang tinggi atau sangat tinggi.

Berdasarkan hasil telaah indikasi perubahan suhu dan curah hujan dengan panjang data iklim 40 tahun (1981 – 2021) menggunakan *software RCLimDex* pada kawasan regional WS C3, terindikasi perubahan curah hujan ekstrem dengan *slope* sebesar 0,835 mm/hr/th (RX1DAY). Hal ini akan membawa dampak peningkatan frekuensi kejadian banjir. Debit banjir dengan kala ulang 50 tahunan akan menjadi debit banjir dengan kala ulang 20 tahunan atau 25 tahunan. Dengan morfologi DAS di bagian hulu Cidanau, Ciujung dan Cidurian serta Cibanten yang berbukit sampai dengan bergunung maka potensi terjadi banjir bandang akan lebih sering terjadi.

4. Ketahanan Energi

Kebutuhan tenaga listrik nasional sampai dengan tahun 2034 adalah sebesar 1.017 TWh (*Triliun Watt hour*) dengan Kebutuhan peningkatan Kapasitas Pembangkit dari 57 GW (*Giga Watt*) pada tahun 2015 menjadi 240 GW pada tahun 2034.

Kapasitas terpasang di Provinsi Banten pada tahun 2021 adalah sebesar 6.935 MW (*Mega Watt*), PLTU Suralaya dengan kapasitas 4.025 MW, PLTU Labuan dengan kapasitas 600 MW, PLTU Lontar kapasitas 945 MW, PLTU Cilegon dengan kapasitas 740 MW, dan PLTU Banten kapasitas 625 MW. Sedangkan konsumsi tenaga listrik sebesar 3.416 MW.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan, Provinsi Banten memerlukan tambahan energi listrik, dengan kapasitas sebesar 249 MW/th, sehingga kapasitas terpasang mencapai 10.250 MW.

Sebagian kecil bisa dipenuhi dari Potensi PLTA Waduk-waduk yang akan dibangun, sisanya dipenuhi dari Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB), yang sudah direncanakan dengan kapasitas sebesar 200 MW dan potensi pengembangan mencapai 350 MW.



B. Isu-Isu Strategis Lokal


1. Kejadian – kejadian banjir pada tahun 2021 sampai dengan 2023 yang terjadi di daerah hulu DAS Ciujung dan DAS Cidurian, bagian hilir DAS Cibanten dan Wilayah Kota Cilegon sehingga merendam rumah dan sawah, serta mengganggu aktivitas perekonomian warga;
2. Banjir rob di pesisir utara Banten sudah mulai terjadi;
3. Kekritisan lahan dan kerusakan hutan di beberapa DAS utama sebagian berpotensi kritis, diantaranya DAS Cidanau 36,7%, DAS Ciujung 52,02%, DAS Cidurian 32,65%. Sedangkan secara keseluruhan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian berpotensi kritis sebesar 60,39%;
4. Keberadaan hutan Mangrove di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian menyebar tidak merata di sepanjang pantai daratan maupun pulau-pulau kecil di Teluk Banten sepanjang 107.3 Km. Keberadaan hutan Mangrove telah meningkat berdasarkan analisis peta KLHK adalah seluas 2.970,6 ha.
5. Terkait dengan kualitas air, dari 22 lokasi pemantauan kualitas air di Sungai Cidanau, Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian pada tahun 2021 rata-rata masuk dalam kategori cemar berat untuk Baku Mutu Air Kelas II. Pada tahun 2018 status kualitas air di DAS Cidanau sempat terpantau cemar sedang, namun selanjutnya tercemar berat sampai dengan saat ini (2023);
6. Kebutuhan air naik sebesar 184,6% dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan.
7. Kekeringan mencakup areal seluas 49.266 ha yang tersebar di 88 desa/kelurahan.

1.5.2 Potensi dan Permasalahan Sumber Daya Air

A. Potensi Sumber Daya Air

Potensi-potensi yang terdapat di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian cukup besar dapat dikembangkan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun sebaliknya jika Potensi ini tidak mampu dikelola, dijaga dengan baik maka potensi tersebut dapat pula menjadi ancaman bagi masyarakat dan lingkungan potensi-potensi tersebut adalah.

1. Pengembangan wanatani (*agro forestry*) di luar kawasan hutan;

- 
2. Pembangunan Waduk Pasir Kopo, Waduk Tanjung, Waduk Cilawang dan Waduk Cidanau serta dam pengendali;
 3. Pengelolaan teknik konservasi tanah dan air terpadu berwawasan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat serta pendampingan pada DAS Hulu dan lahan miring/pegunungan; dan
 4. Pengendalian erosi dengan bangunan teknik sipil berbasis lahan dan alur air;
 5. Potensi Tampungan Air Berupa Situ

WS Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki potensi tampungan berupa situ yang tersebar di hampir setiap kabupaten dalam WS Cidanau-Ciujung-Cidurian. Sebagian Situ tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

6. Potensi *Chekdam*

Pengendalian sedimentasi sungai dengan pembuatan *checkdam* merupakan salah satu upaya fisik pada aspek konservasi sumber daya air. Berdasarkan hasil survei identifikasi yang telah dilakukan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian terdapat 60 lokasi yang berpotensi dibangun *checkdam*.

7. Potensi Pemanfaatan Air untuk RKI.

B. Permasalahan Sumber Daya Air


Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian, yang harus mendapat perhatian antara lain:

1. Koordinasi dan Sinergi Program

Kegiatan dan program sering kali tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya kerjasama yang baik, serta sering terjadi tumpang tindih sehingga tidak efektif.

2. Pembatasan Pengambilan Air Tanah belum dilakukan secara efektif

Terjadi pengambilan air tanah yang berlebihan yang dapat berakibat terjadinya penurunan muka tanah seperti saat ini terjadi di daerah Jakarta atau penyusupan air laut di daerah dataran pantai. Saat ini peraturan pembatasan pengambilan air tanah sudah ada di Provinsi Banten (Perda Provinsi Banten No. 7 th. 2004 tentang



pengelolaan air tanah), namun belum diikuti pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.

3. Pengendalian daya rusak air belum dilakukan secara menyeluruh baik secara filosofi, struktural, non struktural, dengan memperhatikan kondisi sosial budaya.
4. Sistem informasi sumber daya air yang terpecah dan sulitnya untuk mendapatkan akses data, berdampak pada kurangnya atau lemahnya data dalam melaksanakan analisis untuk menentukan kebijakan dan rekayasa yang diperlukan dalam melaksanakan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air.



1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Selanjutnya penyajian Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian disampaikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pembahasan bab ini meliputi latar belakang penyusunan Laporan Kinerja, penjelasan umum organisasi, dan isu strategis organisasi pada tahun 2025.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, dukungan pengukuran capaian kinerja sasaran program berupa cascading ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian TA. 2025, metode pengukuran kinerja indikator sasaran program dan sasaran kegiatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan terkait evaluasi dan analisis kinerja serta evaluasi anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian TA. 2025 yang disajikan melalui upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, analisis perbandingan kinerja, realisasi anggaran, dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran memuat dokumen pendukung Laporan Kinerja TA.2025, meliputi Perjanjian Kinerja (PK), Bukti Dukung Capaian Kinerja, Penghargaan, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja, dan Dokumentasi Kegiatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2025

Rencana Strategis (Renstra) BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian dilaksanakan dengan didasarkan kepada Renstra Ditjen Sumber Daya Air dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029. Substansi Renstra merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta disesuaikan dengan visi dan misi Presiden dan wakil Presiden sebagai agenda prioritas nasional.

Renstra BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sumber daya air yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2025-2029) yang searah dengan Renstra Ditjen Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas kondisi, potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya air. Dokumen Renstra ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dan arahan dalam menyusun perencanaan, pemrograman dan penganggaran serta penyusunan rencana kinerja tahunan secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar sektor/subsektor terkait.

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, visi pembangunan jangka menengah nasional yang didasarkan atas integrasi RPJPN 2025-2045 dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan semangat kolaboratif bangsa dalam mewujudkan transformasi Indonesia menuju negara maju. Selaras dengan hal



tersebut, sebagai wujud kontribusi terhadap pencapaian visi nasional, Visi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:


“Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang andal dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatkan ketahanan air nasional melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang berkelanjutan untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur konektivitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.
3. Meningkatkan akses infrastruktur keciptakaryaan yang berkualitas untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
5. Meningkatkan kapasitas SDM, khususnya bidang konstruksi dan infrastruktur, yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
6. Memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang efektif, transparan, dan akuntabel.
7. Meningkatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Guna mendukung pencapaian visi dan misi di atas, tujuan Kementerian PUPR 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan air nasional.
2. Memperkuatnya kinerja layanan konektivitas yang berkelanjutan.

- 
3. Menguatnya akses infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan.
 4. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian, peribadatan, pendidikan, olahraga, sosial budaya dan kesehatan yang andal dan berkualitas
 5. Meningkatnya pembinaan SDM vokasional dan tenaga kerja konstruksi.
 6. Menguatnya tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, efisien, bersih dan terpercaya.
 7. Menguatnya peran kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan peran Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Enabler Pertumbuhan Ekonomi, Sasaran Utama Kementerian Pekerjaan Umum diarahkan pencapaian PU 608, sebagai berikut:

1. Efisiensi Investasi ($ICOR < 6$), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur penggunaan modal dalam menghasilkan sebuah output. Dalam konteks Kementerian Pekerjaan Umum, investasi infrastruktur diarahkan secara tepat serta dikelola secara efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas dengan investasi yang relatif lebih rendah, melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Strategi 1: Optimalisasi Biaya, melalui manajemen proyek yang efektif dan efisien mewujudkan proyek infrastruktur dengan life cycle yang tepat, serta memiliki kualitas dan kapasitas yang sesuai perencanaan.
 - b. Strategi 2: Optimalisasi Aset, melalui pengelolaan aset secara optimal untuk hasilkan output maksimal serta meminimalisir risiko kerusakan idle infrastruktur. Efisiensi anggaran untuk perawatan dan pembangunan baru.
 - c. Strategi 3: Kemudahan Investasi, melalui investasi infrastruktur yang efisien terencana & fokus pada sektor-sektor yang mendukung produktivita tinggi akan meningkatkan output ekonomi secara signifikan dengan modal tambahan yang lebih sedikit.



Gambar 23 – Strategi Pencapaian Sasaran Utama Efisiensi Investasi (ICOR<6)

2. Pengentasan Kemiskinan (Menuju 0%), merupakan persentas penduduk miskin di Indonesia masih mencapai angka 8,57% (BPS, 2024) dan ditargetkan dapat turun menjadi sekitar 4-5% pada periode 2025-2029. Untuk itu, Kementerian PU berkontribusi aktif melalui penyediaan infrastruktur dasar dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pekerjaan ke-PU-an, melalui strategi sebagai berikut:

- a) Strategi 1: Percepatan penyediaan akses infratruktur dasar, melalui akses infrastruktur berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Meningkatnya peluang terhadap akses kesehatan, pendidikan, pasar & pekerjaan. Kualitas hidup yang membaik serta pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.
- b) Strategi 2: Penyerapan tenaga kerja, melalui upaya sektor konstruksi menawarkan lapangan kerja dan pendapatan bagi banyak individu, namun kapasitas SDM perlu diseimbangkan dengan pelatihan dan peningkatan keterampilan. Sektor konstruksi mendorong perkembangan ekonomi lokal, memperbaiki kualitas hidup, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berujung pada penurunan angka tingkat kemiskinan di masyarakat.

Perwujudan strategi-strategi tersebut diintegrasikan melalui beberapa indikator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari indikator kinerja pada masing-masing unit organisasi. Bidang sumber daya air tidak berperan langsung pada pencapaian Sasaran Utama ini, namun memberikan dukungan secara tidak langsung, misalnya dalam hal penyediaan air baku untuk air minum, serta

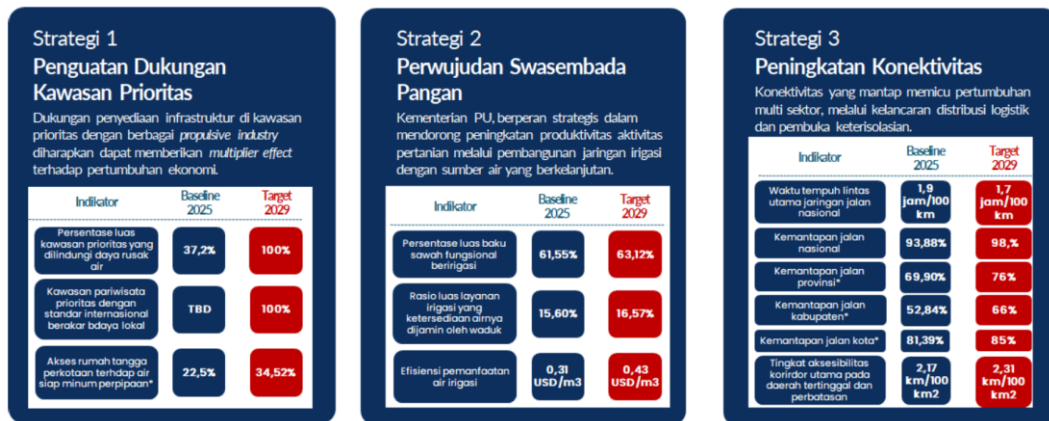
penyerapan tenaga kerja (masyarakat) pada program yang dilaksanakan dengan skema padat karya.



Gambar 24 – Strategi Pencapaian sasaran Utama pengetasan Kemiskinan (Menuju 0%)

3. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8% per tahun), merupakan target pembangunan nasional yang menuntut upaya inovatif di luar pendekatan business as usual. Kementerian PU, yang berperan dalam penyediaan infrastruktur yang berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi, memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya target tersebut melalui penguatan dan optimalisasi dukungan akses infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, melalui strategi sebagai berikut:


- a. Strategi 1: Penguatan Dukungan Kawasan Prioritas, melalui dukungan penyediaan infrastruktur di kawasan prioritas dengan berbagai propulsive industry diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Strategi 2: Perwujudan Swasembada Pangan, melalui peran strategis Kementerian PU mendorong peningkatan produktivitas aktivitas pertanian melalui pembangunan jaringan irigasi dengan sumber air yang berkelanjutan.
- c. Strategi 3: Peningkatan Konektivitas, melalui konektivitas yang mantap memicu pertumbuhan multi sektor, melalui kelancaran distribusi logistik dan pembuka keterisolasian.



Gambar 25 – Strategi Pencapaian sasaran Utama Pendorong Pertumbuhan Ekonomi (8% pertahun)

Perwujudan strategi-strategi tersebut diintegrasikan melalui beberapa indikator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari indikator kinerja pada masing masing unit organisasi yang menunjukkan progresivitas terukur dengan peningkatan bertahap dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Target outcome utama Direktorat Jenderal SDA tahun 2025-2029 dalam rangka perwujudan strategi utama PU608, meliputi:

1. Kapasitas tampung air, dari 59,59 m³/kapita di tahun 2024, meningkat menjadi 63,54 m³ per kapita pada tahun 2029.
2. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk, dari 53,34% di tahun 2024, meningkat menjadi 56,18% pada tahun 2029.
3. Persentase luas baku sawah fungsional terus ditingkatkan, dari 61,55% pada tahun 2024 hingga mencapai 62,37% pada tahun 2029
4. Rasio luas jaringan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, dari 15,60% pada tahun 2024, hingga mencapai 16,57% pada tahun 2029.
5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi, dari 0,31 USD/m³ pada tahun 2024 meningkat menjadi 0,43 USD/m³ pada tahun 2029
6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air hingga 100% (dari luas kawasan seluas 32 ribu Hektar)
7. Persentase kondisi keandalan daerah irigasi, meningkat hingga mencapai 62%.




Terdapat 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2025-2029, yaitu:

1. SS-1 Meningkatnya Ketahanan Air Untuk Mendukung Pencapaian Swasembada pangan, energi dan air
2. SS-2 Meningkatnya Kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan
3. SS-3 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman yang aman dan berkelanjutan
4. SS-4 Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, Pendidikan, peribadatan, olahraga, social budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas sesuai penugasan kepada Kementerian Pekerjaan umum
5. SS-5 Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
6. SS-6 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PU dan tugas teknis lainnya
7. SS-7 Menguatnya dukungan Kementerian PU dalam meningkatkan peran Kawasan perkotaan sebagai pusat ekonomi nasional yang inklusif, berketahanan dan berkelanjutan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Ditjen Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Pekerjaan Umum ke -1, yaitu Meningkatnya ketahanan Sumber Daya air untuk mendukung Pencapaian Swasembada pangan, energi dan air melalui indikator Indeks Ketahanan Air.

Perwujudan Sasaran Strategis (SS) dilaksanakan melalui pelaksanaan 2 (dua) program yang terdiri dari program teknis (Program Ketahanan Sumber Daya Air) dan program generik/pendukung (Program Dukungan Manajemen). Perwujudan sasaran strategis tersebut digambarkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran Program (SP), sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum yaitu:



Sasaran Program Teknis 1: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional, melalui pencapaian 9 (sembilan) indikator sebagai berikut:

1. Kapasitas tampungan air (m³/kapita)
2. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk (%)
3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi (%)
4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk (%)
5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi (USD/m³)
6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air (%)
7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air (%)
8. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas (%)
9. Persentase kondisi keandalan daerah irigasi (%)

Sasaran Program Teknis 2: mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi, melalui pencapaian 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

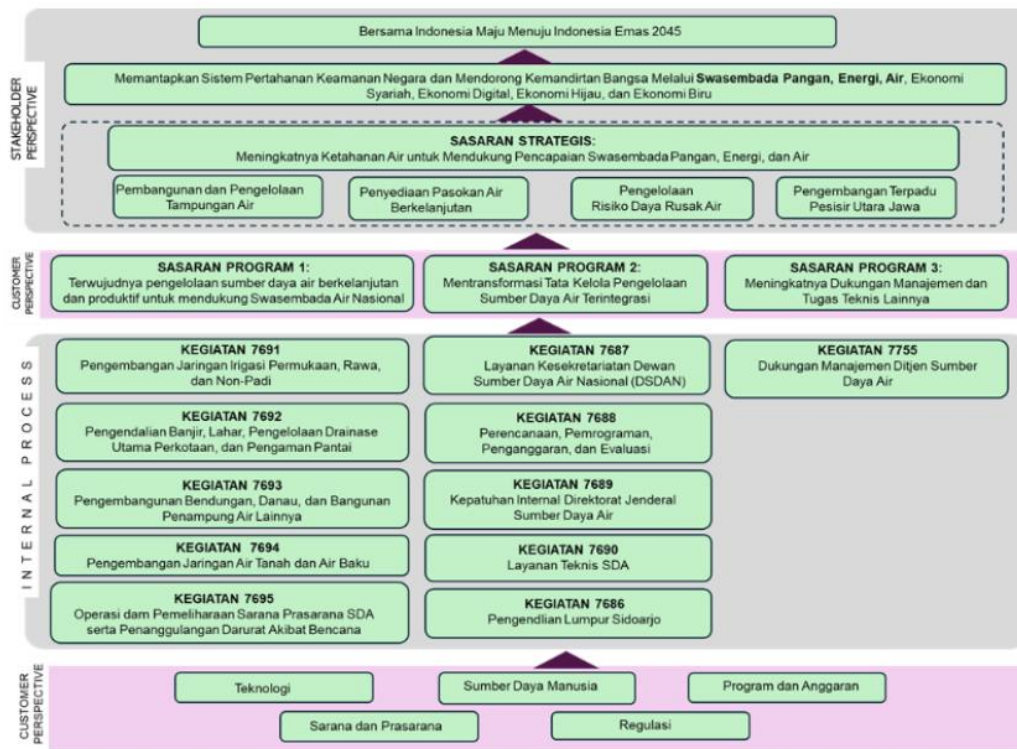
1. Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, kelembagaan
2. pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat (%)
3. Tingkat layanan administrasi dan teknis operasional Dewan SDA Nasional (%)
4. Tingkat kepatuhan intern Direktorat Jenderal SDA (%)
5. Tingkat keselarasan perencanaan dan pemrograman Direktorat Jenderal SDA (%)
6. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA (nilai)
7. Tingkat layanan teknis sumber daya air (%)
8. Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA (nilai)
9. Tingkat indikator kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal SDA (nilai)

Sarana Program Generik: Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian Sasaran Program ini merupakan bagian dari Kinerja bersama seluruh organisasi di Kementerian Pekerjaan

Umum, yang dikoordinasikan di Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Pencapaiankinerja Sasaran Program ini di Direktorat Jenderal SDA diukur melalui 1 (satu) indikator:

1. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya (DJSDA) %


Guna mewujudkan Sasaran Program, pada internal proses Direktorat Jenderal dilaksanakan 11 kegiatan, yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator-indikator pencapaiannya. Masing-masing kegiatan diampu oleh Unit Kerja Eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.



Gambar 26 – Peta Strategi Direktorat Jenderal SDA 2025-2029


Arah dan Kebijakan umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2025-2029 diarahkan supaya :

1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan



demand dan pengelolaan supply yang berkeadilan serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.


2. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dilaksanakan di tiap wilayah sungai kewenangan Pusat didasarkan pada rencana tata pengaturan air dan tata pengairan (pola pengelolaan SDA) dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (rencana pengelolaan SDA), yang diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersangkutan.
3. Konservasi sumber air dilaksanakan dalam rangka mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka Panjang
4. Pengendalian pemanfaatan air tanah seiring dengan peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan, pengembangan dan penerapan sistem *conjunctive use* antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah.
5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
6. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk airbersih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutamadi wilayah rawan/defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis.
7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir dilaksanakan selaras antara pendekatan struktural dan pendekatan non-struktural melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah, diutamakan pada daerah berpenduduk padat, konektivitas antar pusat ekonomi dan Kawasan strategis.

- 
8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah.
 9. Mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut
 10. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan pada kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
 11. Penataan kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui pengaturan Kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan serta kemungkinan berbagi peran atau role sharing dalam pengelolaan SDA secara terpadu
 12. Penataan dan penguatan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi, baik ke dalam maupun ke luar Direktorat Jenderal SDA
 13. Penerapan “living in harmony with mud” dalam pengendalian lumpur Sidoarjo. Hal ini dengan mempertimbangkan pendapat sebagian ahli Geologi bahwa semburan lumpur panas Sidoarjo tidak mungkin bisa dihentikan

2.1.3 Dukungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian

Dalam mendukung pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian menyusun strategi operasional diantaranya sebagai berikut :

1. Strategi Konservasi Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian adalah sebagai Berikut :


- 
- a. Melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)) pada lahan sangat kritis, kritis dan agak kritis diantaranya melalui Sinkronisasi Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) dan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA);
 - b. Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung;
 - c. Melaksanakan pengaturan kegiatan penambangan;
 - d. Melaksanakan pembuatan sumur resapan dan biopori kepada masyarakat;
 - e. Penerapan peraturan sempadan Sungai dan Situ/Danau/Embung/Waduk (Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015);
 - f. Membuat waduk, kolam dan retensi;
 - g. Perlindungan alur dan tebing sungai;
 - h. Pengamanan muara dan abrasi pantai;
 - i. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pengambilan air tanah
 - j. Melaksanakan pembangunan IPAL dan merencanakan saluran pembuangan air limbah perkotaan terpisah dengan saluran drainase;
 - k. Menerapkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemberian insentif dan disinsentif secara berkelanjutan.

2. Strategi pendayagunaan sumber daya air di WS 3Ci dapat diuraikan berupa:

- a. Melaksanakan pembangunan Bendungan Karian dan *Karian Serpong Conveyance System (KSCS)*;
- b. Melaksanakan pembangunan *long storage* Sungai Ciujung lama;
- c. Melaksanakan pembangunan Bendungan Cidanau Pasir Kopo, Tanjung dan Cilawang;
- d. Melaksanakan proses Rekomendasi Teknis dalam proses perizinan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air;



- e. Meningkatkan IP (Indeks Pertanaman) dengan aktivasi dan optimalisasi Komisi Irigasi di Kabupaten/Kota;
 - f. Merehabilitasi dan peningkatan serta melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan (O&P) di DI Cidurian dan di DI Ciujung;
 - g. Mendorong pihak swasta untuk investasi dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik mini hidro;
 - h. Mendorong Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk membuat Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
3. Strategi Pengendalian Daya Rusak Air yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Mendorong penetapan perlindungan daerah resapan air pada suatu DAS;
 - b. Mendorong pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - c. Mendorong percepatan rehabilitasi pada lokasi yang terdampak bencana;
 - d. Penataan, perbaikan, dan rehabilitasi jaringan drainase perkotaan;
 - e. Mendorong pengawasan dan penertiban hunian dan usaha lainnya di sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan situ/embung/bendungan/pantai;
 - f. Mendorong pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) di DAS, sungai, irigasi, situ/embung/bendungan/pantai sepanjang tahun;
 - g. Mendorong kegiatan normalisasi sungai dan anak sungai pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian;
 - h. Mendorong pelaksanaan kegiatan penanaman Mangrove atau pembangunan tanggul laut untuk melindungi daerah pesisir pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian;
 - i. Mendorong larangan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada daerah rawan bencana;

- 
- j. Memperkuat koordinasi organisasi masyarakat maupun instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengendalian daya rusak air;
 - k. Mendorong pembentukan PERDA tentang pengelolaan DAS terpadu;
 - l. Mendorong penerapan PERDA tentang eksploitasi air bawah tanah;
 - m. Mendorong konservasi air tanah melalui kegiatan Rain Water Harvesting;
 - n. Mendorong penegakan hukum kepada pelaku pencemaran dan perusak lingkungan;
 - o. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian daya rusak air;

4. Strategi Sistem Informasi Sumber Daya Air

- a. Menyediakan pedoman tentang pengelolaan SISDA yang sistematis dan komprehensif;
- b. Menambah peralatan SISDA sesuai dengan rasionalisasi;
- c. Mengevaluasi tingkat keandalan data dan informasi saat ini;
- d. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan;
- e. Mengkoordinasikan data sumber daya air yang berasal dari berbagai instansi;
- f. Menyeragamkan peta dasar dan data spasial antar instansi;
- g. Mengoperasikan dan memelihara peralatan yang menunjang SISDA secara berkelanjutan.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat meliputi

- a. Mengoptimalkan fungsi Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan penyadaran tentang bahaya pengambilan air tanah dalam yang melampaui batas aman secara berkelanjutan;

- c. Memantau dan mengawasi penerapan MoU tentang pembagian peran dan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kapasitas masing-masing unit kerja sumber daya air dengan menggunakan kinerja secara berkelanjutan;
- e. Menerapkan pungutan jasa pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan;
- f. Melaksanakan pengaturan perizinan penggunaan dan pengusahaan air permukaan;
- g. Membentuk Dewan sumber daya air Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan;
- h. Membentuk pengelolaan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Program-program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja/SNVT di BBWS Cidanau Ciujung Ciduriandengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12 – Nomenklatur Kegiatan di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian 2025-2029

No	Kode	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Pengampu Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
I	145.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air		
1	7688	Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi	Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	Satker BBWS C3
2	7689	Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Direktorat Kepatuhan Intern	1. Satker BBWS 2. SNVT PJPA 3. SNVT PJSA 4. SNVT ATAB 5. SNVT Bendungan 6. Satker OP

No	Kode	Nomenklatur Program dan Kegiatan	Pengampu Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
3	7690	Layanan Teknis SDA	Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air	Satker BBWS C3
4	7691	Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, rawa dan Non-Padi	Direktorat Irigasi dan Rawa	SNVT PJPA C3
5	7692	Pengendalian Banjir, lahar, pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	Direktorat Sungai Pantai	SNVT PJSA
6	7693	Pengembangan Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung air lainnya	Direktorat Bendungan dan Danau	SNVT Pembangunan Bendungan
7	7694	Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	Direktorat Air Tanah dan Air Baku	SNVT ATAB
8	7695	Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana	Direktorat Operasi dan Pemeliharaan SDA	Satker OP BBWS C3
II	145.WA	Program Dukungan Manajemen		
1	7755	Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air	Sekretariat Direktorat Jenderal	1. Satker BBWS 2. SNVT PJPA 3. SNVT PJSA 4. SNVT ATAB 5. SNVT Bendungan 6. Satker OP

Rincian Rencana Strategis BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian periode 2025-2029 disajikan dalam matriks renstra pada bagian lampiran.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Menurut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan disertai dengan Indikator Kinerja. PK revisi muncul karena adanya perubahan/revisi Perjanjian Kinerja apabila terjadi hal-hal seperti pergantian/mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja awal dan revisi (akhir) disajikan dalam tabel berikut (rincian lengkap Perjanjian Kinerja untuk tiap Satuan Kerja/SNVT disampaikan pada bagian lampiran).

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target PK Awal 2025	Target PK Revisi	Capaian PK Akhir 2025
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR					
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional					
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	58,99	58,99	59,99
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78	52,78
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55	61,55
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,59	15,59	15,59
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	18,57	0,324	0,324
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,03	0,02	0,02
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80	80
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	4,06
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,13	0,44	0,44
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi					
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	87,31	87,31	88,51
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	54,13	54,13	54,13
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100	100
IKSP 4	Tingkat Implementasi Transformasi Digital	%	53	53	53
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	100	97	97



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : I KETUT JAYADA

Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : LILIK RETNO CAHYADININGSIH

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

LILIK RETNO CAHYADININGSIH

Jakarta, 14 Januari 2025

Pihak Pertama

I KETUT JAYADA

Generated by MONIKA SDA KEMENTERIAN PU ©2025

**Laporan
Kinerja**

**Balai Besar Wilayah Sungai
Cidanau Ciujung Cidurian
2025**





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Lampiran 1


SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	
Kapasitas tampungan air	58,99 m ³ /kapita
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	52,78 %
Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	61,55 %
Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	15,59 %
Efisiensi pemanfaatan air irigasi	18,570 USD/m ³
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,03 %
Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	80,00 %
Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,06 %
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,13 %
SASARAN PROGRAM: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	
Tingkat Kepatuhan Intern UPT	87,31 %
Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	54,13 %
Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100,00 %
Tingkat implementasi transformasi digital UPT	53,00 Nilai

Generate by MONIKA SDA KEMENTERIAN PU ©2025






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR


Lampiran 1


SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	97,00 %

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Ketahanan Sumber Daya Air	Rp. 831.101.811.000,00
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 25.573.127.000,00
	Rp. 856.674.938.000,00

Direktur Jenderal Sumber Daya Air


LILIK RETNO CAHYADININGSIH

Jakarta, 14 Januari 2025
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau
Ciujung Cidurian


I KETUT JAYADA

Generate by MONIKA SDA KEMENTERIAN PU 62025

Gambar 27 - Perjanjian Kinerja Awal BBWS C3 Tahun 2025





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DEDI YUDHA LESMANA
Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI PURWANTORO
Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 September 2025
Pihak Pertama

Pihak Kedua


DWI PURWANTORO


DEDI YUDHA LESMANA

Generate by MOMKA SGA - KEMENTERIAN PU ©2025

**Laporan
Kinerja**

**Balai Besar Wilayah Sungai
Cidanau Ciujung Cidurian
2025**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	
Kapasitas tampungan air	58,99 m ³ /kapita
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	52,78 %
Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	61,55 %
Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	15,59 %
Efisiensi pemanfaatan air irigasi	0,324 USD/m ³
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,02 %
Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	80,00 %
Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,06 %
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,48 %
SASARAN PROGRAM: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	
Tingkat Kepatuhan Intern UPT	87,31 %
Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	54,13 %
Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100,00 %
Tingkat Implementasi transformasi digital UPT	53,00 Nilai

Generated by MONIKA 53A KEMENTERIAN PU 62028


Laporan
Kinerja

Balai Besar Wilayah Sungai
Cidanau Ciujung Cidurian
2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR


Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	97,00 %
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	

PROGRAM


1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen


ANGGARAN

Rp. 1.626.137.785.000,00
Rp. 25.573.127.000,00
Rp. 1.651.710.912.000,00

Jakarta, 30 September 2025
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau
Ciujung Cidurian

Direktur Jenderal Sumber Daya Air


DWI PURWANTORO


DEDI YUDHA LESMANA

Generate by MONKA SDA KEMENTERIAN PU ©2025

Gambar 28 - Perjanjian Kinerja Akhir BBWS C3 Tahun 2025



2.3 METODE PENGUKURAN

Penilaian Kinerja yang diberikan pada rencana aksi Tahun 2025 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2024. Penilaian dibagi menjadi 6 kategori dan dibedakan berdasarkan *range* nilai dan warna seperti dalam **Tabel 12** di bawah ini.

Tabel 13 - Kriteria Penilaian Kinerja

No	Nilai Angka	Interpretasi	Kategori Warna
1	$X > 100\%$	Istimewa	
2	$80\% < X \leq 100\%$	Baik	
3	$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan	
4	$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	
5	$0\% < X \leq 20\%$	Sangat Kurang	
6	-	Belum Bisa dinilai	

Sumber: Permen PAN RB No 24 Tahun 2024

Adapun tata cara perhitungannya dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi AKIP:

Tabel 14 – Tabel Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1) X (100% - (2))
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK (5)							
	Predikat PKO (6)							

1. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan memperhatikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas yaitu terkait dengan prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja instansi dan unit/satuan kerja, maka dipandang perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

- a. Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% ; dan
- b. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

2. Koreksi normalisasi capaian kinerja berdasarkan predikat AKIP

Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut:



Gambar 29 – Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 15 – Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat AKuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

1. Nilai akhir capaian perjanjian kinerja

Selanjutnya akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja (langkah-1) dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (langkah-2).

2. Total Capaian Perjanjian Kinerja

Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian PK (langkah-3) pada setiap indikator kinerja

3. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

4. Predikat PKO

2.3.1 Metode Pengukuran Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

Sasaran Kegiatan adalah sasaran yang salah berada pada level Eselon II/BBWS/BWS/Balai Teknik dan dapat disebut dengan *output*. Cara pengukuran untuk setiap indikator Sasaran Kegiatan disajikan pada Tabel 14, pada tahun 2025 Satuan Kerja/SNVT di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian ikut berperan dalam mencapai Sasaran Kegiatan di seluruh indikator.

Tabel 16 - Cara Pengukuran Sasaran Strategis Ditjen SDA

SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	IKSP101	Kapasitas tampungan air	Dihitung dengan rumus : $IKP\ 1 = \frac{\text{Kapasitas tampung dari tampungan}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}}$ Keterangan : Kapasitas tampungan air multiguna per kapita (m ³ /kapita) Kapasitas tampung dari tampungan air (m ³) Jumlah penduduk indonesia (jiwa)
	IKSP102	Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 2 = \frac{\text{Kapasitas air baku terpasang}}{\text{Kebutuhan air baku domestik}}$ Keterangan: Rasio kapasitas air baku terhadap kebutuhannya (%) Kapasitas air baku terpasang berdasarkan aset prasarana air baku (m ³ /detik) Kebutuhan air baku domestik berdasarkan jumlah penduduk (m ³ /detik)
	IKSP103	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	Dihitung dengan rumus: $\text{Overlay luas layanan potensial sawah beririgasi terhadap luas baku sawah (LBS)}$ Keterangan: Persentase LBS fungsional beririgasi (%) merupakan luas baku sawah yang memiliki sistem irigasi Perhitungan menggunakan sistem GIS Penambahan luas layanan irigasi didapatkan melalui pembangunan jaringan irigasi
	IKSP104	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 4 = \frac{\text{Luas layanan irigasi waduk}}{\text{Luas baku irigasi permukaan sesuai Permen PUPR No.14/2015}}$ Keterangan: Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk (%) Luas layanan irigasi waduk adalah luas daerah irigasi yang airnya dijamin oleh waduk
	IKSP105	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	Dihitung dengan rumus : $IKP\ 5 = \frac{\text{PDB Sektor Tanaman Pangan}}{\text{Volume irigasi per tahun}}$ Keterangan: Efisiensi pemanfaatan air irigasi (USD/m ³) PDB Sektor Tanaman Pangan (USD) Volume air irigasi per tahun (m ³) Tingkat konversi IDR ke USD ditetapkan 16.000

SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
	IKSP106	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 6 = \frac{\text{Luas kumulatif kawasan yang terlindungi dari daya rusak}}{(\text{dibagi}) \text{ Luas kawasan prioritas}}$ Keterangan: Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air (%) Luas kumulatif kawasan yang terlindungi dari daya rusak (Ha) Luas kawasan prioritas (Ha)
	IKSP107	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 7 = \text{Komponen A (20\%)} + \text{Komponen B (20\%)} + \text{Komponen C (20\%)} + \text{Komponen D (20\%)} + \text{Komponen E (20\%)}$ Keterangan Komponen A: Tingkat Efisiensi dan Keandalan Distribusi Air Baku Terjaga sesuai Kebutuhan Rencana (bobot 20%) Komponen B: Tingkat Reduksi resiko dan Dampak Banjir (bobot 20%) Komponen C: Tingkat Layanan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air yang Dipelihara (%) (bobot 20%) Komponen D: Tingkat Layanan Penanggulangan Darurat Akibat Bencana (%) (bobot 20%) Komponen E: Tingkat Kinerja Tata Guna Air (bobot 20%)
	IKSP108	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertama multikomoditas	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 8 = \frac{\text{Kapasitas terpasang sumur JIAT}}{(\text{dibagi}) \text{ Kebutuhan air pertanian multikomoditas}}$ Keterangan: Indeks pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan horitkultura (%) Kapasitas terpasang air tanah/UIAT (m ³ /detik) Kebutuhan air untuk pertanian multikomoditas (m ³ /detik)
	IKSP109	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	Dihitung dengan rumus: $IKP\ 9 = \frac{\text{Luas Jaringan irigasi yang Direhabilitasi}}{(\text{dibagi}) \text{ Luas Jaringan irigasi dengan Kondisi Rusak}}$ Keterangan: Persentase kondisi keandalan daerah irigasi Data kondisi jaringan irigasi berdasarkan data kondisi infrastruktur irigasi Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan dengan total 3.237.602 hektar irigasi dalam kondisi rusak (tetap) Penambahan luas keandalan daerah irigasi didapatkan melalui rehabilitasi jaringan irigasi

SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
Mentransformasi Tata Kelola Pengelolaan Sumber Daya Air Teintegrasi	IKSP201	Tingkat Kepatuhan Intern	Dihitung dengan Rumus = Komponen A (3%)+Komponen B (12%)+ Komponen C (6%)+ Komponen D (6%) + Komponen E (15%)+Komponen F (15%) +Komponen G (10%) + Komponen F (15%) + Komponen G (10%)+ Komponen H (15%) + Komponen I (3%) + Komponen J (15%). Keterangan Komponen A Persentase Capaian Nilai Pembangunan ZI, Komponen B Tingkat Pelaporan Penerapan MR UPR T-3 , Komponen C Tingkat Pelaporan Kinerja Pengendalian Gratifikasi, KOMponen D Tingkat Deklarasi Benturan Kepentingan, KOMponen E Tingkat Pengelolaan Penanganan Pengaduan, Komponen F Tingkat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum, Komponen G Tingkat Penyelesaian Penelaahan Pengawasan Intern, Komponen H Tingkat Efektivitas Penerapan MR UPR T2 , Komponen I Tingkat Pelaporan Harta Kekayaan dan Perpajakan, KOMponen J Tingkat Rekomendasi Laporan Hasil Audit/Pengawasan UPT yang ditindaklanjuti
	IKSP202	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT Di Direktorat Jenderal SDA	Dihitung Dengan Rumus = Komponen A (60%) + Komponen B (40%), Keterangan Komponen A Nilai kualitas perencanaan anggaran berdasarkan sistem OMSPAN Kemenkeu (Rerata seluruh satuan kerja dalam satu UPT) (bobot 60%), Komponen B Tingkat konsistensi pemrograman terhadap RENSTRA UPT, dihitung berdasarkan seluruh proyek (RO) yang dianggarkan (pada DIPA) terdapat pada RENSTRA UPT (bobot 40%)
	IKSP203	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada entitas di BBWS	Dihitung Dengan berdasarkan jumlah entitas/ Satker dengan nilai SAKIP diatas 60 Nilai

SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	METODE PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
	IKSP204	Tingkat Implementasi Transformasi Digital	Penilaian oleh PUSDATIN KEMENPU sesuai dengan tata cara perhitungan yang ditentukan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP118	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)	Jumlah nilai tingkat kinerja dukungan manajemen sesuai dengan pembobotan pada setiap komponen sebagai berikut: Komponen A. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan (bobot 15%) Komponen B. Tingkat Pengelolaan BMN (bobot 20%) Komponen C. Tingkat layanan pembentukan produk hukum (bobot 15%) Komponen D. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana (bobot 15%) Komponen E. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI (bobot 20%) Komponen F. Tingkat Layanan Komunikasi Publik (bobot 15%)

Sumber : PK TA 202



2.3.2 Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi

Rencana aksi dibuat setiap akhir bulan untuk mengukur data capaian per masing-masing indikator kinerja, sehingga capaian dapat terukur dan akuntabel sesuai dengan kondisi lapangan. Tata cara perhitungan Total Kinerja rencana aksi dapat diperoleh menggunakan rumus tertimbang baik rencana maupun realisasi pada masing-masing kegiatan. Cara perhitungan pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi fisik}}{\text{rencana fisik}} \times 100$$

Sebelum dilakukan pengukuran kinerja secara triwulanan, disusun Rencana Aksi Kinerja(T0) yang berisi target-target yang diharapkan, berikut Rencana Aksi Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian disajikan dalam Tabel 15 Berikut :



No	Indikator sasaran	Target	Satuan	Januri	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
SP 01 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional															
1	Kapasitas tampungan air	58,99	m3/kapita	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,77%	3,55%	63,94%	68,23%	68,32%	71,13%	83,71%	99,29%
2	Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	52,78	%	0,00%	0,00%	0,54%	0,54%	0,54%	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	4,60%	100,00%	100,00%
3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	61,55	%	4,10%	2,78%	3,35%	19,43%	5,70%	8,20%	9,86%	11,72%	12,07%	33,77%	60,89%	100,00%
4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	15,59	%	0,00%	0,00%	0,12%	0,63%	0,79%	1,18%	1,89%	3,05%	3,10%	21,31%	53,34%	100,00%
5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	19,328	USD	0,00%	0,00%	1,35%	5,65%	16,56%	31,26%	40,53%	48,68%	52,32%	61,19%	75,07%	80,36%
6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,02	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,46%	17,45%	46,93%	100,00%
7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	80	%	0,00%	0,00%	2,13%	4,02%	22,36%	37,16%	45,66%	47,30%	58,68%	78,79%	89,51%	100,00%
8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,06	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,84%	9,80%	16,12%	32,17%	65,19%	75,20%	100,00%
9	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,44	%	3,16%	2,33%	2,82%	3,80%	4,79%	6,88%	9,43%	11,21%	13,48%	32,47%	59,77%	100,00%
SP 02 Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi															
1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	87,31	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	3,09%	14,04%	22,33%	25,74%	33,52%	43,47%	95,00%
2	Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	54,13	%	0,00%	0,00%	3,63%	5,79%	13,88%	24,66%	33,10%	38,48%	48,52%	62,56%	65,89%	100,00%
3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100	%	0,00%	0,00%	5,02%	10,57%	10,57%	10,57%	15,60%	18,82%	42,03%	59,15%	60,65%	100,00%
4	Tingkat implementasi transformasi digital UPT	53	Nilai	0,00%	0,00%	9,15%	18,92%	23,43%	28,08%	34,13%	37,71%	49,61%	59,00%	66,16%	100,00%
SP 03 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya															
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	97	%	0,00%	0,00%	0,00%	21,40%	26,11%	39,87%	50,10%	53,44%	59,93%	65,70%	67,07%	100,00%

2.4 TARGET TAHUN 2025 MENURUT RENSTRA 2025-2029

Target kinerja tahun 2025 menurut Renstra 2025-2029 BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian terdiri atas 3 (Tiga) Sasaran Program dan 14 (Empat Belas) Indikator Sasaran Kegiatan yang secara ringkas adalah sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis : Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur SDA

B. Sasaran Program:


1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional
2. Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi
3. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

C. Indikator Sasaran Program adalah Indikator capaian kerja yang dilaksanakan pada Level BBWS/BWS:

1. Kapasitas Tampung Air
2. Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk
3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi,
4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan
5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi
6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air
7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air; dan
8. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas
9. Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi
10. Tingkat Kepatuhan Intern UPT
11. Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA
12. Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS
13. Tingkat Implemenstasi Transformais Digital
14. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

D. Sasaran Kegiatan Kegiatan adalah capain Kerja yang dilaksanakan Oleh Satuan Kerja/ SNVT :

1. Meningkatnya Ketahanan Metropolitan dan Wilayah Sungai Terhadap Potensi Risiko Daya Rusak Air (SNVT PJSA)

- 
2. Meningkatnya Pasokan Air Irigasi Berkelanjutan dan Produktivitas Pengguna Air Irigasi (SNVT PJPA)
 3. Meningkatnya Kapasitas Tampungan Air yang dapat dimanfaatkan (SNVT Pembangunan Bendungan)
 4. Meningkatnya pasokan Air Baku Berkelanjutan dan Produktivitas Pengguna Air Baku (SNVT ATAB)
 5. Meningkatnya Penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di pesisir Utara Jawa (SNVT ATAB)
 6. Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air (Satker Balai)
 7. Meningkatnya tata kelola operasi dan pemeliharaan (Satker Balai dan OP)
 8. Terjaganya layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air (Satker OP)
 9. Mentransformais Tata Kelola Sistem dan Strategi Pengelolaan SDA (Satker BBWS)
 10. Meningkatnya Maturitas Kepatuhan Intern (Seluruh Satker)
 11. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Uit Kerja dan Unit Pelaksanan Teknis (Seluruh Satker)

Tabel 17 - Target Tahun 2025 pada Renstra 2025-2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET OUTPUT 2025
145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
03	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR			
PROGRAM FC KETAHANAN SUMBER DAYA AIR				
Sasaran Program:				
01 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional				
Indikator Sasaran Program:				
01	Kapasitas tampungan air	(m ³ /kapita)	Banten	58,99
02	Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	Banten	57,78
03	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	Banten	61,55
04	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	Banten	15,59



**PROGRAM
/
KEGIATAN**

**SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO**

SATUAN

LOKASI

**TARGET
OUTPUT**

2025

05	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	(USD/m3)	Banten	0,324
06	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	(%)	Banten	0,02
07	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	(%)	Banten	80,00
08	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	(%)	Banten	4,06
09	Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	(%)	Banten	0,44

Sasaran Program:

02 Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi

Indikator Sasaran Program:

01	Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, kelembagaan pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat	(%)	Banten	100,00
02	Tingkat layanan administrasi dan teknis operasional Dewan SDA Nasional	(%)	Banten	-

**PROGRAM
/
KEGIATAN**

**SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO**

SATUAN

LOKASI

**TARGET
OUTPUT**

2025

03	Tingkat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	(%)	Banten	87,30
04	Tingkat keselarasan perencanaan dan pemrograman Direktorat Jenderal SDA	(%)	Banten	54,13
05	Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)	Banten	100,00
06	Tingkat layanan teknis sumber daya air	(%)	Banten	100,00
07	Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)	Banten	53,00
08	Tingkat nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)	Banten	80,00

**Laporan
Kinerja**

**Balai Besar Wilayah Sungai
Cidanau Ciujung Cidurian
2025**





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian merupakan suatu kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan misi organisasi yang ditetapkan dalam bentuk target kinerja.

3.1 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seluruh entitas wajib menyelenggarakan SAKIP. Pelaksanaan evaluasi SAKIP Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian TA 2023 dilaksanakan oleh Direktorat Sistem dan Strategis Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian TA. 2023 sebagaimana surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor PR.03.04-Aj/639 tanggal 20 Juni 2025 hal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 18 – Lembar Hasil Evaluasi implementasi SAKIP BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2024

No	Komponen	Bobot/ Nilai Maks	Nilai Hasil Evaluasi TA 2021	Nilai Hasil Evaluasi TA 2022	Nilai Hasil Evaluasi TA 2023	Nilai Hasil Evaluasi TA 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	22.44	21.90	22.20	21
2	Pengukuran Kinerja	30	16.88	19.50	22.20	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15	11.00	10.80	11.10	12
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	20,00	18	19,25
5	Nilai	100	72,00	72,20	74,00	75,35

Berdasarkan Tabel 3.1, diketahui bahwa implementasi atas penyelenggaraan SAKIP Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian pada tahun anggaran 2024 dapat dikategorikan BB (Sangat Baik) dengan pencapaian nilai 75,35%. Terhadap kelemahan yang masih ada tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 – Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi implementasi SAKIP BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2024

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja b. Dokumen perencanaan Kinerja telah tersedia	Target pada rencana Aksi Kinerja agar selaras dengan target perjanjian Kinerja (PK)	Target pada rencana Aksi Kinerja telah diselaraskan dengan target perjanjian Kinerja (PK)



No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>c. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik , yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART , menggunakan Penyelarasan (cascading)di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</p> <p>d. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</p>		
2	<p>a. Pengukuran kinerja telah dilakukan</p> <p>b. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam</p>	<p>a. Data Kinerja yang dikumpulkan agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan karena Target Rencana</p>	<p>c. Data Kinerja yang dikumpulkan sudah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan karena Target Rencana Aksi</p>





No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>mewujudkan Kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</p> <p>c. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</p>	<p>Aksi Kinerja Tidak Selaras dengan Perjanjian PK</p> <p>b. Target Laporan Monev Bulanan Agar selaras dengan rencana AKSi</p>	<p>Kinerja Tidak Selaras dengan Perjanjian PK</p> <p>a. Target Laporan Monev Bulanan telah diselaraskan dengan rencana Aksi</p>
3	Pelaporan Kinerja		<p>Informasi dalam laporan Monev Bulanan digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai sesuai target Perjanjian Kinerja (PK)</p>
4	Evaluasi Kinerja Akuntabilitas		

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2.2 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Program

Sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025-2029, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian pada tahun anggaran 2025 mendukung pencapaian Sasaran Program yaitu Sasaran Program Teknis: **Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional**, dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Sasaran program (IKSP) yang dilaksanakan, yaitu:

1. Kapasitas Tampung Air
2. Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk
3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi,
4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan
5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi
6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air
7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air; dan
8. Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas
9. Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi

Selain itu BBWS Cidanau Ciujung Juga mendukung sasaran Program “**Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi**” dengan 4 (EMpat) Indikator Kinerja Sasaran Progrma (IKSP) yang dilaksanakan, yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan Intern UPT
2. Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA
3. Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS
4. Tingkat Implemenstasi Transformais Digital

Smendukung Sasaran Program Teknis, Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau ciujung Cidurian juga mendukung pencapaian Sasaran Program Generik: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Pengukuran capaian kinerja Indikator Sasaran

Program dihitung berdasarkan persamaan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab. sebelumnya, yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program (Outcome)}}{\text{Target Indikator Kinerja Program Pada PK (Outcome)}} \times 100\% = \dots \%$$

Tabel 20 – Tabel Hubungan SP, IKSP, SK, dan IKSK pada capaian Kinerja BBWS C3 TA 2025

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pelaksanaan Kegiatan
Sasaran Program: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	1. Kapasitas tampungan air	Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	Jumlah Tampungan Air Alami yang direvitalisasi	SNVT Pembangunan Bendungan
	2. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	Meningkatnya Penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Kapasitas Prasarana Air Baku yang dibangun di pesisir Utara Jawa	SNVT Air Tanah dan Air Baku
	3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi	1. Jumlah Luas layanan irigasi yang dibangun untuk multikomoditas	SNVT PJPA
	4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Peningkatan pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	SNVT PJPA

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pelaksanaan Kegiatan
	5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi	Peningkatan layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi melalui air Irigasi	Satker OP
	6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air Cidurian	SNVT PJSA
	7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	Peningkatan layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola 2. Jumlah sempadan yang ditetapkan 3. Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola 4. Luas layanan irigasi yang dikelola 	Satker OP

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pelaksanaan Kegiatan
			<p>5. Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya</p> <p>6. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi</p> <p>7. Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola</p> <p>8. Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara</p> <p>9. Jumlah sungai yang dipelihara</p> <p>10. Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana</p>	
	8.Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	Peningkatan pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku	Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun	SNVT Air Tanah dan Air Baku

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pelaksanaan Kegiatan
	9.Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	Peningkatan pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	SNVT PJPA
				SNVT PJPA
Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	10.Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Direktorat Jenderal SDA	Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	Seluruh Satuan Kerja
	11.Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA	Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di BBWS/BWS	Seluruh Satuan Kerja
	12.Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA	Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	Tingkat layanan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	Satker BBWS
			Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	Satker BBWS
			Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKtA-WS)	Satker BBWS
			Tingkat kesiapan teknis	Satker BBWS

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK)	Pelaksanaan Kegiatan
			Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	Satker BBWS
	13.Tingkat nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal SDA	Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	Satker BBWS
			Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS	Satker BBWS
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	14.Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis	Seluruh Satuan Kerja

Adapun capaian kinerja Indikator Sasaran Program yang didukung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 21 - capaian kinerja Indikator Sasaran Program

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Ket.
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR						
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional						
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	59,99	59,99	100%	Tercapai
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78	100%	Tercapai
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55	100%	Tercapai
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,59	15,59	100%	Tercapai
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	0,324	0,324	100%	Tercapai
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,02	0,02	100%	Tercapai
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80	100%	Tercapai
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	100%	Tercapai
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,44	0,44	100%	Tercapai
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi						
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	87,31	88,51	101,38%	Tercapai
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	54,13	54,13	100%	Tercapai
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100	100%	Tercapai
IKSP 4	Tingkat Implementasi Transformasi Digital	%	53	53	100%	Tercapai
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	97	97	100%	Tercapai

Sumber: PK Akhir BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025

Secara keseluruhan capaian kinerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian sebesar 100% dengan kategori kinerja Baik dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator 1 : Kapasitas Tampungan Air

Target Indikator Kapasitas Tampungan Air pada PK awal adalah sebesar 59,99 m³/kapita angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK “Jumlah Tampungan Air Alami yang direvitalisasi” yang didukung oleh Kegiatan Revitalisasi Situ Cicinta dengan capaian output 1 km dan outcome 0,197 jt m³ dan capaian kinerja IKSK 100%. Selain dari pada itu indikator ini didukung juga oleh Kegiatan Pembangunan Bendungan Karian meskipun capaian output dan outcome bendungan ini sudah tercatat pada tahun 2023 namun masih terdapat anggaran DIPA untuk Penataan Kawasan waduk, penyelesaian akhir pekerjaan bendungan dan Persiapan POP Bendungan Karian. Pada indikator ini penambahan kapasitas Tampungan air hanya akan didapatkan dari penyelesaian 16 bendungan yang masuk dalam renstra 2025-2029 (Jragung, Way Apu, Bulango Ulu, Mbay, Budong-Budong, Cabean, Bangunan Pengarah Bendungan Rukoh, Bagong, Karangnongko, Manikin, Jenelata, Cibeet, Cijurey, Bener, Tiga Dihaji, Riam Kiwa, Pelosika) selain dari pada bendungan ini maka tidak ada penambahan kapasitas tampungan yang berasal dari bendungan.

2. Indikator 2 : Rasio Kapasitas Air Baku Terpasang terhadap kebutuhan penduduk

Target Indikator Rasio Kapasitas Air Baku Terpasang terhadap kebutuhan penduduk pada PK awal adalah sebesar 52,78% angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK “Kapasitas Prasarana Air Baku yang dibangun di pesisir Utara Jawa” yang didukung oleh kegiatan-kegiatan pada SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS C3 di antaranya :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong Paket 1
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong Paket 2
- c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Karian Serpong Paket 3
- d. Consulting Services for Construction Supervision on The Karian Dam-Serpong Water Conveyance System (KSCS)

Capaian kinerja pada IKSK ini adalah 100% meskipun pada TA 2025 kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Baku Karian Serpong Paket 1- 3 baru bertanda tangan kontrak pada bulan Oktober TA 2025 sehingga capaian output dan outcome TA 2025 masih 0 km dan 0 m³/dt namun sudah terdapat progress penyerapan anggaran untuk uang muka pekerjaan.

3. Indikator 3 : Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi

Target Indikator Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi pada PK awal adalah sebesar 61,55% angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK "Jumlah Luas layanan irigasi yang dibangun untuk multikomoditas" yang di dukung oleh kegiatan pada SNVT PJPA yaitu kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Cimoyan dengan capaian output 0,3 km dan outcome masih 0 ha, outcome akan tercatat Ketika jaringan sudah selesai di bangun dan dapat mengairi irigasi. Terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan DI cimoyan yaitu ketersediaan lahan untuk pelaksanaan pekerjaan, tindak lanjut dari SNVT PJPA terkait masalah ini adalah berkoordinasi dengan kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan izin pemanfaatan Lahan sawah dilindungi.

4. Indikator 4 : Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk

Target Indikator ini pada PK awal adalah sebesar 15,59% angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK " Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan" yang di dukung oleh kegiatan pada SNVT PJPA yaitu kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi DI Ciujung, dimana sumber suplesi air untuk irigasi ini berasal dari bendung pamarayan yang merupakan suplesi dari waduk Karian. Namun kedepannya indictor ini hanya akan di peroleh dari capaian pembanguna bendungan-bendungan baru yang sudah di tentuka pada renstra SDA 5 (lima) tahun kedepan di antaranya Hanya 9 DI antara lain DI Komerling, DI Jragung,

DI Bener, DI Bagong, DI Manikin, DI Lomaya Alale, DI Bulango Ulu, DI Budong-Budong, DI Way Apu System

5. Indikator 5 : efisiensi pemanfaatan air Irigasi

Target Indikator Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi pada PK awal adalah sebesar 0,324 USD/m³ angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK " Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi melalui air Irigasi" yang di dukung oleh kegiatan pada Satker Operasi dan Pemeliharaan yaitu kegiatan operasi rutin bendung gerak Pamarayan Baru, Bendung Ranca Sumur, Bendung Ciliman dan Bendung Cibaliung.

6. Indikator 6 :Persentase Luas Kawasan Prioritas yang dilindungi dari daya rusak air

Target Indikator Persentase Luas Kawasan Prioritas yang dilindungi dari daya rusak air pada PK awal adalah sebesar 0,02% angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK " Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air " yang di dukung oleh kegiatan pada SNVT PJSA yaitu kegiatan Pengendalain Banjir Sungai Cibanten dengan output 0,2 km dan outcome 5 Ha.

7. Indikator 7 :Tingkat Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air

Target Indikator Tingkat Kinerja Layanan Infrastruktur Sumber Daya Air pada PK awal adalah sebesar 80%,target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini terdapat pada banyak IKSK yang di dukung oleh kegiatan pada Satker Operasi dan Pemeliharaan yaitu Kegiatan Pengelolaan Tampungan air,UPI , UPB, Sempadan yang ditetapkan, prasarana air baku yang dikelola, infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola, pemeliharaan sungai, penanganan darurat akibat bencana, penyusunan alokasi air, layanan rekomendais teknis, RBO, fasilitasi kelompok masyarakat dan kelembagaan serta fasilitasi TKPSDA.

8. Indikator 8 : Persentase Pemanfaatan Air Tanah untuk kebutuhan Pertanian Multikomoditas

Target Indikator ini pada PK awal adalah sebesar 4,06% angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK ” Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun” yang di dukung oleh kegiatan Pembangunan Jaringan Irigas Air Tanah (JIAT) Reguler dan JIAT Inpres 02 TA 2025 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku dengan capain output 34 km dan outcome 0,098 m3/detik berikut detail kegiatan JIAT TA 2025 :

- a. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT Reguler) di Kab. Pandeglang (20 Titik Lokasi)
- b. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT Reguler) di Kab. Serang (10 Titik Lokasi)
- c. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kab. Pandeglang Provinsi Banten (Tahap II) (8 Titik Lokasi)
- d. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kab. Lebak Provinsi Banten (Tahap II) (5 Titik Lokasi)
- e. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Kab. Serang Provinsi Banten (Inpres Tahap III) (6 Titik Lokasi)

9. Indikator 9 : Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi

Target Indikator Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi pada PK awal adalah sebesar 0,44% angka ini adalah angka capaian target dengan baseline nasional, dan target tersebut sesuai dengan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Adapun turunan dari capaian indikator ini adalah IKSK ” Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan” yang di dukung oleh kegiatan pada SNVT PJPA yaitu kegiatan rehab Irigasi regular dan kegiatan berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No 02 tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan, adapun daftar kegiatan terkait sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cidurian Kab. Tangerang
- b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciujung Kab. Serang
- c. Rehabilitasi D.I. Cibaliung Kab. Pandeglang

- d. Rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Banten (Paket I)
- e. Rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Banten (Paket II)
- f. Rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Banten (Paket III)
- g. Rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Banten (Paket IV)

10. Indikator 10: Tingkat Kepatuhan Intern UPT

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Intern UPT pada PK awal adalah sebesar 87,31% dan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 adalah 88,51% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 103%. Penilaian capaian ini di dukung oleh kegiatan seluruh satuan Kerja dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian yaitu kegiatan Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko. Untuk perhitungan tingkat kepatuhan intern di tingkat Balai di pengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya Nilai Pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan Kepatuhan intern dan manajemen Risiko, Kinerja Pengendalian gratifikasi, Tingkat pengelolaan pengaduan, penyelesaian masalah hukum, serta Rekomendasi Laporan hasil audit/ pengawasan.

11. Indikator 11 : Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA

Target Indikator ini pada PK awal adalah sebesar 54,13% dan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 adalah 54,13% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Penilaian capaian ini di dukung oleh kegiatan seluruh satuan Kerja dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian yang terkait dengan pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja yang di nilai dari dua komponen, komponen pertama adalah nilai indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahunan masing-masing satuan kerja yang dapat di lihat pada OMSPAN Kemenkeu, sedangkan komponen kedua adalah Tingkat konsistensi pemrograman terhadap Renstra BBWS dihitung berdasarkan seluruh proyek (RO) yang dianggarkan (pada DIPA) terdapat pada Renstra Balai. Kendala capaian pada indikator ini adalah perbandingan tingkat konsistensi program yang sudah teralokasi di renstra dengan DIPA, karena tidak semua yang sudah tercantum atau terencana pada renstra dilaksanakan pada DIPA tahun yang sama sehingga persentase capaian yang di dapat menjadi kecil, karena

antara program yang rencanakan di renstra tidak sebanding dengan program yang dilaksanakan pada DIPA tahunan.

12. Indikator 12 : Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS

Target Indikator ini pada PK awal adalah sebesar 100% dan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 adalah 100% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Penilaian capaian ini di dukung oleh kegiatan seluruh satuan Kerja dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja. Untuk penilaian capaian ini pada level Balai dilihat berdasarkan jumlah Satuan Kerja yang mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) di atas 60 Nilai. Dan pada BBWS Cidanau Ciujung Cidurian seluruh Satuan Kerja sudah mendapatkan angka AKIP di atas 60 Nilai. Sedangkan penilaian pelaksanaan SAKIP pada Satuan kerja dilakukan oleh bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur setuap tahunnya di nilai berdasarkan komponenen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

13. Indikator 13 : Tingkat Implemenstasi Transformais Digital

Target Indikator ini pada PK awal adalah sebesar 53 Nilai dan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 adalah 53 Nilai sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Penilaian capaian didapat dari penilaian oleh pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian PU yang di nilai berdasarkan kegiatan penyelenggaraan data dan informasi bidang SDA BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, Operasi Rutin Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air, Survei dan Pembangunan Pos Hidrologi.

14. Indikator 14: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Target Indikator ini pada PK awal adalah sebesar 97% dan capaian Akhir pada PK Akhir 2025 adalah 97% sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100%. Penilaian Capaian ini di dapatkan dari beberapa komponen penilaian yaitu berdasarkan Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan, Tingkat Pengelolaan BMN, Layanan Produk Hukum, layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi serta Tingkat Layanan Komunikasi publik.

3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Dari evaluasi dan analisis kinerja pencapaian sasaran program dan sasaran strategis di atas, didapati beberapa faktor keberhasilan dan faktor kegagalan yang mempengaruhi pencapaian target sesuai Perjanjian Kinerja antara lain:

A. Faktor Keberhasilan, antara lain:

1. Faktor Eksternal

- a) Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak *stakeholders* (Pemerintah Daerah setempat, masyarakat calon penerima manfaat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Perhutani, lembaga/institusi terkait lainnya) sehingga semua permasalahan, kendala dan hambatan dapat diselesaikan tepat waktu, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan dan/atau proses perizinan.
- b) Dukungan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat yang terkena dampak proyek oleh Pemda setempat, baik sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor Internal

- a) Penyiapan dokumen readiness criteria (dokumen perencanaan teknis, feasibility study, DED Amdal, LARAP) yang dilakukan sejak awal untuk beberapa paket pekerjaan sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai;
- b) Adanya kebijakan Menteri PU untuk pelaksanaan lelang dini kegiatan tahun anggaran 2025;
- c) Adanya komitmen dan penekanan pimpinan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala dan strategi percepatan pelaksanaan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian dan masing-masing Satker/ SNVT;
- d) Dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang komprehensif dan saling terintegrasi sangat membantu dan mendukung proses penyusunan penganggaran, perencanaan, pemrograman sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- e) Dukungan pengawasan melekat, pelaksanaan dan pemantauan manajemen risiko serta pendampingan internal unit organisasi sehingga permasalahan dapat dimitigasi sejak dini baik oleh Direktorat pembina Teknis, Direktorat Kepatuhan Internal Ditjen. SDA, dan Itjen Kementerian PU;

- f) Adanya kebijakan optimasi sisa alokasi dana dari hasil lelang yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan manfaat infrastruktur sumber daya air;
- g) Adanya dukungan manajemen risiko selama pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 sehingga profil risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan dapat diidentifikasi dan disusun serta dapat segera dimitigasi lebih dini atas risiko permasalahan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target yang ada.

B. Faktor Kegagalan, antara lain:

- a) Adanya kendala/hambatan dalam proses pelaksanaan pembebasan lahan yang diakibatkan belum/kurangnya alokasi anggaran.
- b) Masih terdapat penguasaan bangunan dan tanaman liar di sempadan jaringan irigasi.
- c) Waktu Pelaksanaan pekerjaan sangat singkat sehingga membutuhkan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan
- d) Kesulitan mendapatkan bahan material untuk pekerjaan kontruksi akibat kelangkaan bahan baku material
- e) Adanya musim hujan yang sangat Panjang sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan dan mengakibatkan adanya banjir

3.3 ANALISI PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

3.3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2020 sampai Tahun 2025

Pada periode ini, arah kebijakan juga mengalami perubahan mengingat tahun 2025 adalah tahun awal masa pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang selanjutnya berimplikasi terhadap peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum termasuk pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian. Perubahan peta strategi yang mengakibatkan perubahan sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang semula pada periode RPJMN 2020-2024 mendukung Sasaran Strategis meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air menjadi RPJMN 2025-2029 Meningkatkan ketahanan Sumber

Daya air untuk mendukung Pencapaian Swasembada pangan, energi dan air melalui indikator Indeks Ketahanan Air.

Selengkapnya perbandingan capaian indikator sasaran program dan sasaran kegiatan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel

Tabel 22 - Perbandingan Capaian Kinerja TA 2025 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023, 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SAT	2020	2021	2022	2023	2025		
SS-1	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN AIR MELALUI INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR								
	SP	Meningkatnya ketersediaan air melalui pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi							
	1.	<i>Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun</i>	m ³ /dt	0,00	0,00	0,00	0,21	0,0175	
		SK.	Meningkatnya layanan sarana prasarana penyediaan air tanah dan air baku						
			Jumlah panjang prasarana air baku yang dibangun	Km	1	1	1,50	8,45	0,00
			Jumlah tampungan air yang dibangun	Unit	0,00	N/A	1,00	N/A	N/A
		SK	Meningkatnya layanan tampungan air						
			Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	Unit	0,00	0,00	N/A	1,00	N/A
			Jumlah tampungan air yang direhabilitasi	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	2,00
	2.	<i>Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir</i>	Ha	1.000	204,63	1776	639,5	231,81	
		SK.	Jumlah Panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun						
			Jumlah panjang bangunan pengendali daya rusak air yang dibangun	Km	12	12,10	13,53	8,20	4,51
			Jumlah bangunan pengendali lahar dan sedimen yang dibangun	Unit	0,00	2	N/A	N/A	N/A
	4.	<i>Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun</i>	Miliar m ³	0,024	0,024	0,00	314,7	N/A	
		SK	Meningkatnya layanan tampungan air						
			Jumlah tampungan air yang dibangun	Unit	1	1	1	1	1
			Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dimanfaatkan	Unit	0,00	2	N/A	N/A	N/A
	7.	<i>Jumlah Penambahan luas layanan irigasi padi yang dibangun melalui APBN, APBD, dan DAK</i>	Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SK	Meningkatnya layanan jaringan irigasi						

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR			SAT	2020	2021	2022	2023	2025
		Jumlah tambahan panjang jaringan irigasi yang dibangun	Km	0,00	N/A	N/A	0,00	0,00
	8.	Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Ha	5.452,59	11.963,32	600	1.655	0,00
		SK	Meningkatnya layanan jaringan irigasi					
		Jumlah panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi	Km	56,04	14,04	12,50	0,00	0,00
	10.	Tingkat layanan prasarana SDA	%	100	68,60	68,65	68,87	69,32
		SK	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana dan prasarana SDA					
		Persentase jumlah prasarana SDA yang di OP sesuai AKNOP	%	100	100	82,35	84,06	84,70
		Indeks RBO Benchmarking	Indeks	N/A	2,94	N/A	N/A	3,52
SS	MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA KEMENTERIAN PUPR DAN TUGAS TEKNIS LAINNYA							
	SP	Meningkatnya dukungan manajemen						
	1.	Tingkat kualitas dukungan manajemen	%	N/A	N/A	N/A	100	100
		SK	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Pelaksana Teknis					
		Tingkat kualitas pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan pengelolaan ketatausahaan	%	100	100	100	100	100
		Tingkat penatausahaan Barang Milik Negara	%	0	100	100	100	100
		Tingkat kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100
		SK	Meningkatnya perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan evaluasi					
		Persentase deviasi perencanaan program dengan penganggaran tahunan UPT	%	0	0	0	100	100
		Persentase penurunan jumlah revisi anggaran UPT	%	0	10	10	10	13,6
		Persentase keterpaduan perencanaan pengelolaan SDA WS Wilayah Kerja UPT	%	100	100	100	100	100
		SK	Meningkatnya kesiapan teknis infrastruktur SDA					
		Jumlah laporan hidrologi yang diintegrasikan pada SIH3	Laporan	0	0	0	0	0
		Tingkat nilai layanan SISDA Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Nilai	100%	100%	2	2	3,01

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR				SAT	2020	2021	2022	2023	2025
			Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS	Indeks	N/A	N/A	3,60	N/A	N/A
		SK	Meningkatnya kinerja layanan OP sarana prasarana SDA						
			Indeks RBO Benchmarking BBWS/BWS	Indeks	2,94	N/A	N/A	3,53	3,52
		SK	Meningkatnya penerapan Manajemen Risiko (MR)						
			Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko (MR)	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	65

Sumber: Perjanjian Kinerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian 2020 - 2025

Tabel 23 - Capaian Kinerja TA 2025

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SS	Meningkatnya ketahanan Sumber Daya air untuk mendukung Pencapaian Swasembada pangan, energi dan air melalui indikator Indeks Ketahanan Air								
SP	Sasaran Program: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional								
IKSP	1.Kapasitas tampungan air	m3/Kapita	59,99	59,99	100%				
SK	<i>Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan</i>								
IKSK	Jumlah Tampungan Air Alami yng direvitalisasi	Unit	1	1	100%	juta m3	0,197	0,197	10000%
IKSP	2. Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78	100%				
SK	<i>Meningkatnya Penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa</i>								
IKSK	Kapasaitas Prasarana Air Baku yang dibangun di pesisir Utara Jawa	km	0	0	100%	m3/dt	0	0	100%
IKSP	3. Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55	100%				
SK	<i>Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi</i>								
IKSK	Jumlah Luas Layanan Irigasi yang dibangun untuk Multikomoditas	km	0,3	0,3	100%	Ha	0	0	100%
IKSP	4. Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk		15,59	15,59	100%				

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
SK	<i>Peningkatan pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi</i>								
IKSK	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	km	15,75	15,75	100%	Ha	1994,24	1994,24	100%
IKSP	5. Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m³	0,324	0,324	100%				
SK	<i>Peningkatan layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air</i>								
IKSK	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi melalui air Irigasi	milyar m ³	0,98	0,98	100%	milyar m ³	0,98	0,98	100%
IKSP	6. Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,02	0,02	100%				
SK	<i>Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air</i>								
IKSK	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	km	0,577	0,577	100%	Ha	5	5	100%
IKSP	7. Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80	100%				
SK	<i>Peningkatan layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air</i>								
IKSK	Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	Unit	37	37	100%	juta m ³	325,52	325,52	100%

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSK	Jumlah Unit Pengelola yang dibentuk/dioperasikan	Unit	2	2	100%	Unit	2	2	100%
IKSK	Jumlah sempadan yang ditetapkan	Unit	0	0	100%	Unit	0	0	100%
IKSK	Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	Unit	13	13	100%	m3/dt	0,9	0,9	100%
IKSK	Luas layanan irigasi yang dikelola	km	451,16	451,16	100%	Ha	31088	31088	100%
IKSK	Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya	Lokasi	155	155	100%	Orang Kerja	2325	2325	100%
IKSK	Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	Unit	4	4	100%	milyar m3	0,98	0,98	100%
IKSK	Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	km	88,32	88,32	100%	Ha	31902	31902	100%
IKSK	Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	1	1	100%	Unit	1	1	100%
IKSK	Jumlah sungai yang dipelihara	Sungai	4	4	100%	Sungai	4	4	100%
IKSK	Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana	Operasi	0	0	100%	Jumlah Layanan	0	0	100%
IKSK	Jumlah Rekomendasi Teknis Yang disusun	Rekomendasi	15	15	100%	Rekomendasi	15	15	100%
IKSK	Jumlah Dokumen Perhitungan Indeks RBO	Dokumen	1	1	100%	Dokumen	1	1	100%
IKSK	Jumlah kelompok masyarakat dengan penguatan kelembagaan yang difasilitasi	Kelompok Masyarakat	2	2	100%	Kelompok Masyarakat	2	2	100%

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSK	Jumlah wadah koordinasi Pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang difasilitasi	wadah Koordinasi	1	1	100%	wadah Koordinasi	1	1	100%
IKSP	8.Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	100%				
SK	<i>Peningkatan pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku</i>								
IKSK	Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun	km	34	34	100%	m3/dt	0,098	0,098	100%
IKSP	9.Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	%	0,44	0,44	100%				
SK	<i>Peningkatan pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi</i>								
IKSK	Jumlah Luas Layanan Irigasi yang dibangun untuk Multikomoditas	Km	0,3	0,3	100%	Ha	0	0	100%
IKSK	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Km	150,61	150,61	100%	Ha	15395,83	15395,83	100%
SP	Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi								
IKSP	10.Tingkat pelaksanaan kepatuhan intern dan manajemen risiko Direktorat Jenderal SDA	%	87,31	88,51	101%				
SK	<i>Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air</i>								
IKSK	Tingkat Kepatuhan Intern Satker Balai	%	86,5	86,5	100%	%	86,5	86,5	100%

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSK	Tingkat Kepatuhan Intern Satker PJSA	%	92,5	92,5	100%	%	92,5	92,5	100%
IKSK	Tingkat Kepatuhan Intern Satker PJPA	%	77	77	100%	%	77	77	100%
IKSK	Tingkat Kepatuhan Intern Satker pembangunan Bendungan	%	66,5	66,5	100%	%	66,5	66,5	100%
IKSK	Tingkat Kepatuhan Intern Satker ATAB	%	77	77	100%	%	77	77	100%
IKSK	Tingkat Kepatuhan Intern Satker OP	%	82	82	100%	%	82	82	100%
IKSP	11. Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA		54,13	54,13	100%				
SK	<i>Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA</i>								
IKSK	Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Kerja Balai	Nilai	80,01	80,01	100%	Nilai	80,01	80,01	100%
IKSK	Tingkat penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja PJSA	Nilai	81,51	81,51	100%	Nilai	81,51	81,51	100%
IKSK	Tingkat penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja PJPA	Nilai	80,01	80,01	100%	Nilai	80,01	80,01	100%
IKSK	Tingkat penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja Pembangunan Bendungan	Nilai	79,26	79,26	100%	Nilai	79,26	79,26	100%
IKSK	Tingkat penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja ATAB	Nilai	80,61	80,61	100%	Nilai	80,61	80,61	100%

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSK	Tingkat penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja OP	Nilai	79,26	79,26	100%	Nilai	79,26	79,26	100%
IKSP	12. Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA	%	100	100	100%				
SK	<i>Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air</i>								
IKSK	Tingkat layanan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	%	95%	95%	100%	%	95%	95%	100%
IKSK	Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	WS	1	1	100%	WS	1	1	100%
IKSK	Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKtA-WS)	Dokumen	1	1	100%	Dokumen	1	1	100%
IKSK	Tingkat kesiapan teknis	%	100	100	100%	%	100	100	100%
IKSK	Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	Dokumen	1	1	100%	Dokumen	1	1	100%
IKSP	13. Tingkat nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal SDA	%	53	53	100%				
SK	<i>Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA</i>								

Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (IKSP)	Output				Outcome			
		Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
IKSK	Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	Nilai	87,36	87,36	100%	Nilai	87,36	87,36	100%
IKSK	Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS	%	100	100	100%	%	100	100	100%
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya								
IKSP	14. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJSDA)	%	97	97	100%				
SK	<i>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis</i>								
IKSK	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis	%	100	100	100%	%	100	100	100%

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun 2024 sampai Tahun 2025

Tujuan perbandingan ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pada tahun 2024 dan 2025, akan tetapi terdapat perbedaan Indikator Kinerja renstra Tahun 2024 dan tahun 2025 sehingga sulit untuk melakukan perbandingan. Nilai kinerja akhir di hitung berdasarkan capaian Target PK akhir di bandingkan dengan target PK awal BBWS Cidanau Ciujung Cidurian. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat gambaran pencapaian kegiatan.

Tabel 24 - Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		Kinerja 2024 (%)
SP		
IKSP1.	<i>Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbangun</i>	100
IKSP2.	<i>Penurunan luas kawasan terkena dampak banjir</i>	100
IKSP4.	<i>Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tampung sumber-sumber air yang dibangun</i>	N/A
IKSP8.	<i>Jumlah luas daerah irigasi yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK</i>	100
IKSP	<i>Jumlah luas daerah irigasi yang dibangun melalui APBN, APBD dan DAK</i>	100
IKSP10.	<i>Tingkat layanan prasarana SDA</i>	103,52

Sumber: Capaian PK TA 2024

Tabel 25 - Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Kinerja
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR		
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional		
IKSP 1	<i>Kapasitas Tampungan Air</i>	100%
IKSP 2	<i>Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk</i>	100%
IKSP 3	<i>Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi</i>	100%
IKSP4	<i>Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk</i>	100%
IKSP5	<i>Efisiensi pemanfaatan air irigasi</i>	100%
IKSP6	<i>Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air</i>	100%
IKSP7	<i>Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air</i>	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Kinerja
<i>IKSP8</i>	<i>Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas</i>	<i>100%</i>
<i>IKSP9</i>	<i>Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi</i>	<i>100%</i>
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi		
<i>IKSP 1</i>	<i>Tingkat Kepatuhan Intern UPT</i>	<i>101,38%</i>
<i>IKSP 2</i>	<i>Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA</i>	<i>100%</i>
<i>IKSP 3</i>	<i>Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS</i>	<i>100%</i>
<i>IKSP 4</i>	<i>Tingkat Implementasi Transformasi Digital</i>	<i>100%</i>
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
<i>IKSP 1</i>	<i>Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</i>	<i>100%</i>

3.3.3 Perbandingan antara Target Renstra BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja 2025

Berikut ini adalah perbandingan *output* dan *outcome* antara target Renstra 2025 dengan Capaian Kinerja 2025.

Tabel 26 - Perbandingan Target Renstra dengan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target Renstra	Capaian PK	Deviasi
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR					
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional					
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	59,99	59,99	0
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78	0
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55	0
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,59	15,59	0
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	0,324	0,324	0
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,02	0,02	0
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80	0
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	0
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,44	0,44	0
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi					
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	87,31	88,51	1,2
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	54,13	54,13	0
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100	0
IKSP 4	Tingkat Implementasi Transformasi Digital	%	53	53	0
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	100	97	-0,03

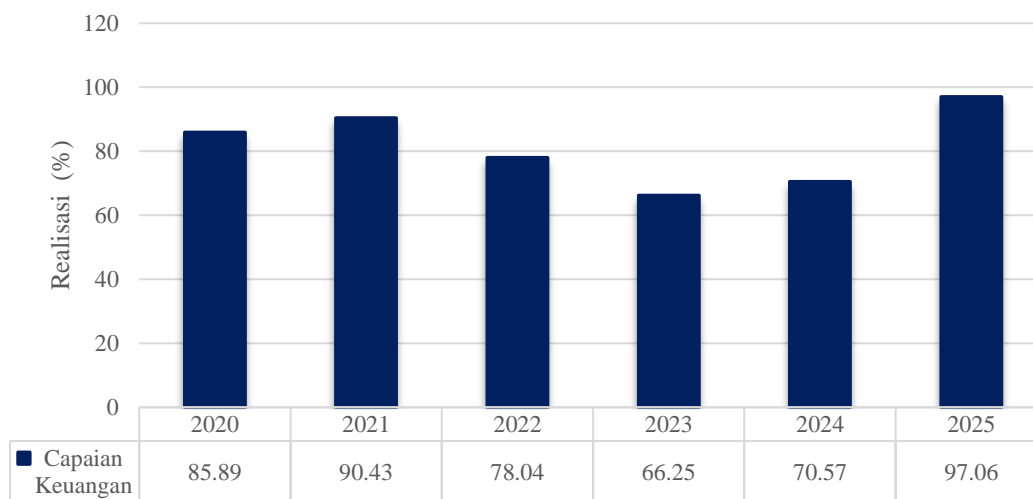
Sumber: Renstra BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2020-2025

Untuk target capaian renstra dan dengan capaian PK TA 2025-2029 saat ini menggunakan target nasional sehingga deviasi antara Renstra dan Pelaksanaan tidak terlalu jauh pada setiap tahunnya.

3.3.4 Perbandingan Realiasi Capaian BBWS Cidanau Ciujung Cidurian sejak TA 2020 hingga TA 2025

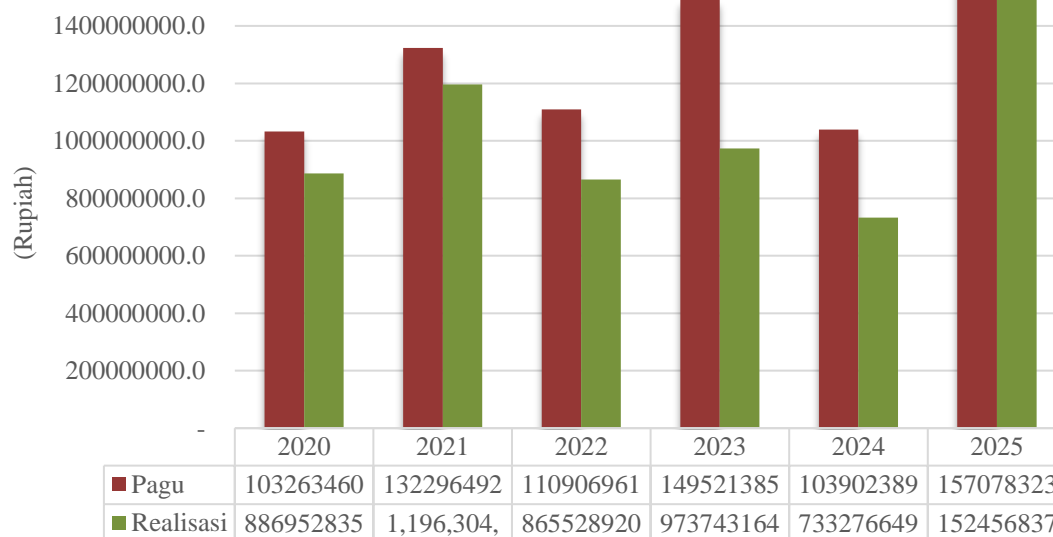
Berikut adalah perbandingan antara realisasi penyerapan tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Dari **Gambar 30** dan **Gambar 31**, dapat dilihat bahwa BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami pasang surut dalam penyerapan keuangan. Sepanjang tahun 2025 sendiri, terdapat pemotongan sisa lelang/kegiatan.



Gambar 30 - Sandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2020-2025

Sumber : I-Emonitoring PUPR



Gambar 31 - Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2025

Sumber : I-Emonitoring PUPR

3.3.5 Perbandingan antara Target PK Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan target Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 27 - Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan Capaian Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target PK Awal 2025	Capaian PK Akhir 2025
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR				
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional				
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	58,99	59,99
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,59	15,59
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	18,57	0,324
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,03	0,02
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,13	0,44
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi				
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	87,31	88,51
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	54,13	54,13
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100
IKSP 4	Tingkat Implementasi Transformasi Digital	%	53	53
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	100	97


Sumber: Perjanjian Kinerja di lingkungan BBWS Cidanau Cijung Cidurian TA 2025

Pada tabel di atas, terdapat perbedaan PK awal 2025 dengan PK akhir 2025 yang disebabkan karena adanya perubahan cara hitung pada indikator Efisiensi pemanfaatan air irigasi.

3.3.6 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian Dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwing Cisdane

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian merupakan unit kerja di Bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melaksanakan dukungan pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, selaras dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwing Cisdane. Atas dasar tersebut kami mencoba membandingkan capaian kinerja dari unit kerja tersebut. Perbandingan Perjanjian Kinerja dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum pada tahun 2025 sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWING-CISADANE
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1


SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	
Efisiensi pemanfaatan air irigasi	0,325 USD/m ³
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,07 %
Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	67,62 %
Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,07 %
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,04 %
SASARAN PROGRAM: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	
Tingkat Kepatuhan Intern UPT	89,63 %
Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	84,38 %
Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100,00 %
Tingkat implementasi transformasi digital UPT	49,46 Nilai

Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	97,50 %


PROGRAM	ANGGARAN
1.Program Ketahanan Sumber Daya Air	Rp. 594.633.391.000,00
2.Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.039.314.000,00
	Rp. 612.672.705.000,00

Direktur Jenderal Sumber Daya Air



DWI PURWANTORO

Jakarta, 29 Desember 2025
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwing Cisdane



DAVID PARTONGGO OLOAN MARPAUNG

Gambar 32 – Perjanjian Kerja Akhir BBWS Ciliwing Cisdane TA 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	
Kapasitas tampungan air	58,99 m ³ /kapita
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	52,78 %
Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	61,55 %
Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	15,59 %
Efisiensi pemanfaatan air irigasi	0,324 USD/m ³
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,02 %
Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	80,00 %
Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,06 %
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,48 %
SASARAN PROGRAM: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	
Tingkat Kepatuhan Intern UPT	87,31 %
Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	54,13 %
Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100,00 %
Tingkat implementasi transformasi digital UPT	53,00 Nilai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	97,00 %

PROGRAM

1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 1.626.137.785.000,00
Rp. 25.573.127.000,00
Rp. 1.651.710.912.000,00

Direktur Jenderal Sumber Daya Air

DWI PURWANTORO

Jakarta, 30 September 2025
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau
Ciujung Cidurian

DEDI YUDHA LESMANA

Gambar 33 – Perjanjian Kerja Akhir BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025

Dari dokumen Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat BBWS Ciliwung Cisadane mendukung Sasaran Program Teknis 01 "Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional" dengan pelaksanaan 5 (Lima) Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP), dan Program teknis 02 Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi, serta mendukung Sasaran Program Generik "Meningkatnya Dukungan Manajemen" melalui 1 (satu) IKSP yaitu Tingkat kualitas dukungan manajemen. Adapun perbandingan capaian kinerja TA 2025 dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 28 – Capaian Kinerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Ket.
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR						
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional						
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	59,99	59,99	100%	Tercapai
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78	100%	Tercapai
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55	100%	Tercapai
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,59	15,59	100%	Tercapai
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	0,324	0,324	100%	Tercapai
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,02	0,02	100%	Tercapai
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80	100%	Tercapai
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	100%	Tercapai
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,44	0,44	100%	Tercapai
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi						
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	87,31	88,51	101,38%	Tercapai
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	54,13	54,13	100%	Tercapai
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100	100%	Tercapai
IKSP 4	Tingkat Implemenstasi Transformais Digital	%	53	53	100%	Tercapai
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	97	97	100%	Tercapai

Tabel 29 – Capaian Kinerja BBWS Ciliwung Cisadane TA 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target	Capaian	Kinerja	Ket.
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR						
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional						
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	N/A	N/A	N/A	N/A
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	0,325	0,325	100%	Tercapai
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,07	0,07	100%	Tercapai
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	67,62	67,62	100%	Tercapai
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	100%	Tercapai
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,04	0,04	100%	Tercapai
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi						
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	89,63	89,63	101,38%	Tercapai
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	86,33	86,33	100%	Tercapai
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100	100%	Tercapai
IKSP 4	Tingkat Implemenstasi Transformais Dlgital	%	49,46	49,46	100%	Tercapai
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	97,58	97,58	100%	Tercapai

Berdasarkan Analisis pada Tabel 38 dan Tabel 39 , dapat dilihat bahwa pada akhir Tahun 2025, rata-rata persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Program Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane sebesar 100,00 %, sedangkan rata-rata persentase capaian kinerja Indikator Kinerja Sasaran Program Balai besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sebesar 100,05%. Secara keseluruhan kedua balai ini memiliki capaian kinerja yang baik. Capaian kinerja pada kedua Balai tersebut dipengaruhi oleh Indikator Kinerja Sasaran Program yang berbeda. Perbedaan Indikator di antara kedua Balai tersebut

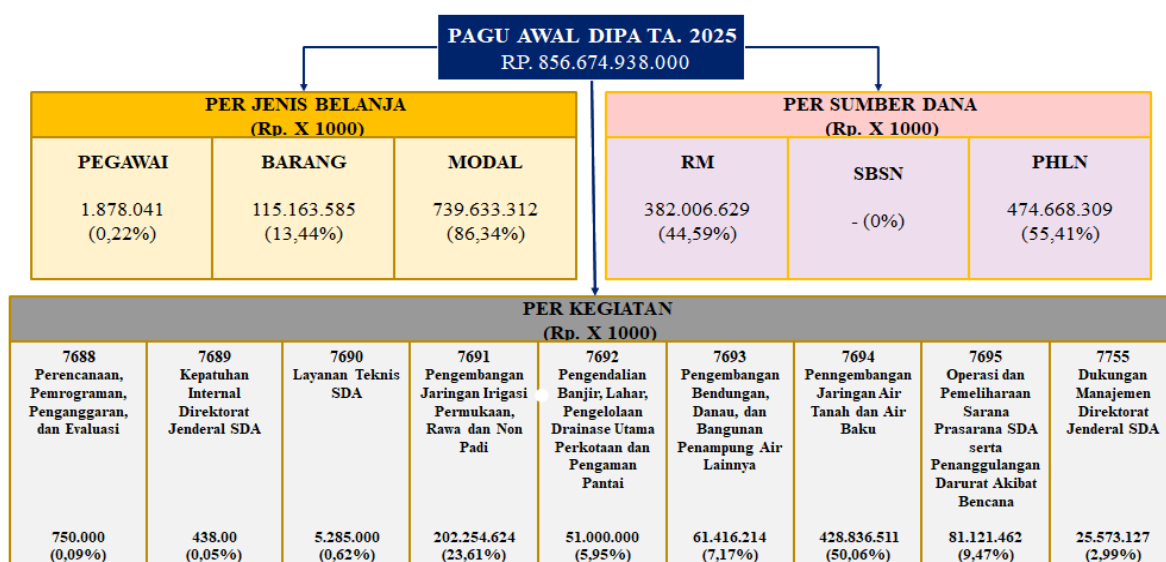
terdapat pada Jumlah DAS yang menerapkan modernisasi hidrologi, di mana pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidruian tidak mendukung capaian Indikator kinerja ini.

3.4 ANALISIS REALISASI ANGGARAN

3.4.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Pada awal Tahun 2025, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mendapat alokasi DIPA sebesar Rp 856.674.938.000 yang postur anggaran ditunjukkan pada **Gambar 34** Berdasarkan jenis belanja porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 739.633.312.000 atau 86,34%. Berdasarkan sumber dana, porsi Rupiah Murni (RPM) sebesar Rp. 382.006.629.000 atau 44,59%, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 55,41%, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 0,00%.

Sumber dana PHLN terdiri dari pinjaman *Loan Economic Development Promotion Facility (EDPF)*, *Loan Register 13UB95AA* untuk Kegiatan Pembangunan Pipa Transmisi Karian Serpong Conveyance System (KSCS) dan EDCF Loan INA-19 dan EDCF Loan INA-25 untuk kegiatan Pembangunan Bendungan Karian.



Gambar 34 - Postur DIPA Awal Tahun 2025

Pada pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa revisi yang terjadi pada besaran DIPA tersebut. Total revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 72 (Tujuh puluh dua) kali yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kali revisi POK/Update Halaman III DIPA dan 49 (empat puluh sembilan) kali perubahan anggaran DIPA. Kronologi perubahan DIPA untuk setiap Satuan Kerja pada tahun 2025 dirangkum dan disajikan dalam tabel berikut in

Tabel 30 - Rekapitulasi Perubahan DIPA Satuan Kerja/SNVT TA 2025

No	Revisi	Uraian	DIPA (Rp x 1000)	Tanggal	Selisih Pagu (Rp x 1000)	Keterangan
A SATKER BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN						
0	Awal	DS:4028-9368-5158-4107	48.915.185	Monday, December 2, 2024	Rp -	Dipa Awal
1	Revisi 1	DS:1189-5468-7000-5189	48.915.185	Friday, February 21, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap I
2	Revisi 2	DS:1189-5468-7000-5189	48.915.185	Monday, March 3, 2025	Rp -	Revisi Perubahan Kode Blokir
3	Revisi 3	DS:1189-5468-7000-5189	48.915.185	Friday, March 7, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
4	Revisi 4	DS:1189-5468-7000-5189	48.915.185	Tuesday, March 18, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan KPA/Pemutakhiran KPA
5	Revisi 5	DS:0389-0670-5001-9582	48.915.185	Monday, March 24, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap II
6	Revisi 6	DS:0389-0670-5001-9582	48.915.185	Thursday, April 17, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
7	Revisi 7	DS:0389-0670-5001-9582	48.915.185	Monday, May 26, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
8	Revisi 8	DS:0389-0670-5001-9582	48.915.185	Monday, June 30, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
9	Revisi 9	DS:0389-0670-5001-9582	48.915.185	Thursday, September 11, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
10	Revisi 10	DS:4170-1365-1103-9574	33.618.327	Thursday, October 2, 2025	-Rp 15.296.858	Revisi Pemotongan Blokir Perencanaan dan penambahan hak atas tanah
11	Revisi 11	DS:3844-4061-7069-1767	33.556.559	Wednesday, October 29, 2025	-Rp 61.768	Revisi pengurangan pagu TTL
12	Revisi 12	DS:5581-6019-1769-4129	34.555.094	Monday, November 10, 2025	Rp 998.535	Revisi penambahan untuk P3K paruh waktu
13	Revisi 13	DS:5581-6019-1769-4129	34.555.094	Monday, November 17, 2025	Rp -	Revisi kewenangan Kanwil
14	Revisi 14	DS:5861-0633-8136-3180	29.214.761	Thursday, November 27, 2025	-Rp 5.340.333	Revisi DJA pengambilan sebagian blokir
15	Revisi 15	DS:5307-7921-3002-4631	29.245.357	Thursday, December 25, 2025	Rp 30.596	Penambahan Pagu Fasilitaor relawan Bencana
B SNVT P/JPA CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN						
0	Awal	DS:4945-7543-7676-9820	194.577.766	Monday, December 2, 2024	Rp -	Dipa Awal

No	Revisi	Uraian	DIPA (Rp x 1000)	Tanggal	Selisih Pagu (Rp x 1000)		Keterangan
1	Revisi 1	DS:4326-2706-1075-4404	194.577.766	Friday, February 21, 2025		Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap I dan Perubahan KPPN Pada Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibaliung Kab. Pandeglang
2	Revisi 2	DS:4326-2706-1075-4404	194.577.766			Rp -	Perubahan Kode Blokir
3	Revisi 3	DS:4326-2706-1075-4404	194.577.766	Friday, March 7, 2025		Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
4	Revisi 4	DS:5696-4154-5052-8972	248.077.766	Monday, April 28, 2025	Rp	53.500.000	Penambahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cidurian Kab. Tangerang;
5	Revisi 5	DS:5696-4154-5052-8972	248.077.766	Tuesday, July 1, 2025		Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
6	Revisi 6	DS:3635-5906-0640-3385	849.165.425	Saturday, July 26, 2025	Rp	601.087.659	Revisi Penambahan Inpress Tahap II
7	Revisi 7	DS:1179-2397-0439-4710	847.626.428	Tuesday, August 5, 2025	-Rp	1.538.997	Revisi Pengurangaam sisa lelang paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cidurian
8	Revisi 8	DS:1179-2397-0439-4710	847.626.428	Friday, August 15, 2025		Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
9	Revisi 9	DS:7480-2778-0060-0666	847.626.428	Tuesday, September 2, 2025		Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
10	Revisi 10	DS:3706-7056-3009-3848	831.678.845	Thursday, November 27, 2025	-Rp	15.947.583	Revisi DJA Pengambilan Blokir
C	SNVT PJSA CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN						
0	Awal	DS:9959-7801-9819-2219	51.130.000	Monday, December 2, 2024		Rp -	Dipa Awal
1	Revisi 1	DS:6919-5000-0635-7030	51.130.000	Friday, February 21, 2025		Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap I
2	Revisi 2	DS:3236-9830-6084-3225	53.384.793	Monday, March 3, 2025	Rp	2.254.793	Revisi Perubahan Kode Blokir dan Luncuran Kegiatan Cidurian (SBSN)
3	Revisi 3	DS:7792-7005-5430-5594	53.384.793	Monday, March 24, 2025		Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap II
4	Revisi 4	DS:7792-7005-5430-5594	53.384.793	Wednesday, April 23, 2025		Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
5	Revisi 5	DS:1529-3460-8859-6231	53.384.793	Wednesday, August 13, 2025		Rp -	Buka blokir cibanten
6	Revisi 6	DS:0703-0190-5703-7767	28.384.793	Thursday, October 2, 2025	-Rp	25.000.000	Revisi Pemotongan Blokir Kegiatan kontruksi dan supervisi Pengendalian banjir Cidurian dan sungai Cibanten

No	Revisi	Uraian	DIPA (Rp x 1000)	Tanggal	Selisih Pagu (Rp x 1000)	Keterangan
7	Revisi 7	DS:9934-9282-2113-5041	18.034.793	Thursday, November 27, 2025	-Rp 10.350.000	Pengambilan Blokir
D SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIDANAU CIJUNG CIDURIAN						
0	Awal	DS:7936-2325-0567-9517	58.546.214	Monday, December 2, 2024	Rp -	Dipa Awal
1	Revisi 1	DS:6541-3527-2704-0465	58.546.214	Friday, February 21, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap I
2	Revisi 2	DS:3511-8425-9172-7803	58.546.214	Monday, March 3, 2025	Rp -	Perubahan KPPN pada Kegiatan Supervisi Pembangunan Bendungan Karian
3	Revisi 3	DS:0620-4602-7929-0660	58.546.214	Monday, March 24, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap II
4	Revisi 4	DS:0620-4602-7929-0660	58.546.214	Thursday, April 17, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
5	Revisi 5	DS:2360-2096-0163-2600	144.309.818	Thursday, June 26, 2025	RP. 85.763.604	Percepatan dan Luncuran Bendungan Karian (CW, HM dan Supervisi)
6	Revisi 6	DS:9461-0285-1096-0617	134.309.818	Saturday, July 26, 2025	-Rp 10.000.000	Revisi Pengurangan bendungan Tanjung
7	Revisi 7	DS:3768-4002-5903-8041	135.832.276	Tuesday, August 5, 2025	Rp 1.522.458	Pengurangan sisa lelang situ cicinta sebesar - 597.741.000 Penambahan Pembayaran Relokasi makam Desa Sukajaya di areal genangan Bend. Karian 2.117.200.000
8	Revisi 8	DS:3427-8938-8660-7607	135.832.276	Tuesday, August 26, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
9	Revisi 9	DS:1751-9244-2650-6607	123.548.753	Thursday, October 2, 2025	-Rp 12.283.523	Revisi Pemotongan Blokir Kegiatan Situ Cidendong
10	Revisi 10	DS:4953-3780-6380-0010	123.548.753	Friday, November 14, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
11	Revisi 11	DS:9209-8902-9062-0012	120.732.276	Thursday, November 27, 2025	-Rp 2.816.477	Revisi DJA pengambilan sebagian blokir
E SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU						
0	Awal	DS:3929-3018-3806-5044	424.466.511	Monday, December 2, 2024	Rp -	Dipa Awal
1	Revisi 1	DS:9572-3017-9802-6365	424.466.511	Friday, February 21, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap I

No	Revisi	Uraian	DIPA (Rp x 1000)	Tanggal	Selisih Pagu (Rp x 1000)	Keterangan
2	Revisi 2	DS:7500-0202-7797-9460	424.466.511	Monday, March 3, 2025	Rp -	Revisi Perubahan KPPN
3	revisi 3	DS:7500-0202-7797-9460	424.466.511	Thursday, March 20, 2025	Rp -	Revisi kewenangan Kanwil (POK)
4	Revisi 4	DS:3378-2024-1655-9636	469.466.511	Monday, April 28, 2025	Rp 45.000.000	Penambahan Sumur
5	revisi 5	DS:3378-2024-1655-9636	469.466.511	Monday, May 26, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
6	revisi 6	DS:9000-3644-6733-4995	438.616.511	Saturday, July 26, 2025	-Rp 30.850.000	penambahan Inpres Tahap II untuk kegiatan JIAT
7	Revisi 7	DS:9000-3644-6733-4995	438.616.511	Friday, August 8, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
8	Revisi 8	DS:9000-3644-6733-4995	438.616.511	Friday, August 22, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
9	Revisi 9	DS:5007-0915-0680-9842	442.116.511	Thursday, September 18, 2025	Rp 3.500.000	Penambahan untuk kegiatan Engineering Service dan Fasilitasi Perizinan
10	Revisi 10	DS:8403-8562-0001-6891	450.225.511	Wednesday, October 1, 2025	Rp 8.109.000	Penambahan untuk kegiatan Inpres Tahap 3 JIAT (9 M) dan penghapusan kegiatan Pembangunan Sumur Uji Produksi Air Tanah (891 jt)
11	Revisi 11	DS:8403-8562-0001-6891	450.225.511	Wednesday, October 22, 2025	Rp -	Revisi Kanwil pemindahan CS ke Konstruksi
12	Revisi 12	DS:8403-8562-0001-6891	450.225.511	Friday, October 24, 2025	Rp -	Revisi kewenangan Kanwil (POK)
13	Revisi 13	DS:8403-8562-0001-6891	450.225.511	Friday, November 14, 2025	Rp -	Revisi kewenangan Kanwil (POK)
14	Revisi 14	DS:8371-0721-0187-1402	448.016.511	Thursday, November 27, 2025	-Rp 2.209.000	Pengambilan Blokir
15	Revisi 15	DS:8371-0721-0187-1402	448.016.511	Tuesday, December 2, 2025	Rp -	Revisi kewenangan Kanwil (POK)
16	Revisi 16	DS:8371-0721-0187-1402	448.016.511	Monday, December 15, 2025	Rp -	Revisi pemutakhiran KPA
F	SATKER OP SDA					
0	Awal	DS:0180-4011-1845-0200	79.039.262	Monday, December 2, 2024	Rp -	Dipa Awal

No	Revisi	Uraian	DIPA (Rp x 1000)	Tanggal	Selisih Pagu (Rp x 1000)	Keterangan
1	Revisi 1	DS:0564-6940-9001-1985	79.039.262	Friday, February 21, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap I
2	Revisi 2	DS:0564-6940-9001-1985	79.039.262	Monday, March 3, 2025	Rp -	Revisi Perubahan Kode Blokir
3	Revisi 3	DS:0564-6940-9001-1985	79.039.262	Tuesday, March 18, 2025	Rp -	Revisi Perubahan RO dan KRO
4	Revisi 4	DS:5459-9725-0184-0719	79.039.262	Monday, March 24, 2025	Rp -	Revisi Buka Blokir Tahap II
5	Revisi 5	DS:5459-9725-0184-0719	79.039.262	Thursday, May 15, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
6	Revisi 6	DS:1619-5004-9982-4353	119.239.262	Saturday, July 26, 2025	Rp 40.200.000	Penambahan Kegiatan JIAT dan P3tGAI
7	Revisi 7	DS:0096-3685-9450-0080	125.486.262	Wednesday, August 13, 2025	Rp 6.247.000	penambahan Penetapan sempadan situ dan sungai
8	Revisi 8	DS:6400-9043-7719-1148	123.835.718	Monday, September 1, 2025	-Rp 1.650.544	Revisi Optimalisasi Kegiatan (pengurangan pagu di beberapa kegiatan)
9	Revisi 9	DS:6400-9043-7719-1148	123.835.718	Friday, September 12, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
10	Revisi 10	DS:6070-9966-0560-0608	135.930.517	Thursday, October 2, 2025	Rp 12.094.799	Revisi Penambahan Inpress Tahap III dan P3TGAI tahap II
11	Revisi 11	DS:5230-8082-7407-0001	125.026.714	Thursday, November 27, 2025	-Rp 10.903.803	Pengambilan Blokir
12	Revisi 12	DS:5230-8082-7407-0001	125.026.714	Tuesday, December 2, 2025	Rp -	Revisi Kewenangan Kanwil DJPb
13	Revisi 13	DS:5230-8082-7407-0001	125.026.714	Wednesday, December 3, 2025	Rp -	Revisi Pemutakhiran KPA
T O T A L DIPA TA 2025				1.572.734.496		
TOTAL REVISI 2025			72	REVISI		

Sumber: DIPA Satker dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025

Perubahan DIPA tersebut secara umum terdiri atas revisi penambahan dan pengurangan anggaran dengan kronologis sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2025, pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami penambahan sebesar Rp.2.254.793.000 dari pagu anggaran semula Rp 856.674.938.000 menjadi Rp 858.929.731.000. Perubahan tersebut disebabkan adanya luncuran kegiatan Pengendalian Banjir dan Sedimen Sungai Cidurian (Tahap II) pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau Ciujung Cidurian;
2. Pada bulan April 2025, pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami penambahan sebesar Rp 98.500.000.000 dari pagu anggaran semula Rp 858.929.731.000 menjadi Rp 957.429.731.000. Perubahan tersebut disebabkan adanya revisi anggaran berupa penambahan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cidurian Kab. Tangerang sebesar Rp 53.500.000.000 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian;
 - b. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang sebesar Rp.45.000.000.000 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian.
3. Pada bulan Juni 2025, pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 85.763.604.000 sehingga pagu BBWS C3 menjadi Rp 1.043.193.335.000. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya revisi anggaran berupa Percepatan dan luncuran kegiatan Pembangunan Bendungan Karian pada SNVT pembangunan Bendungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian;
4. Pada bulan Juli 2025, pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 610.437.659.000 sehingga pagu BBWS C3 menjadi Rp 1.653.630.994.000. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya revisi anggaran berupa :
 - a. Penambahan Kegiatan Inpres No 02 TA 2025 yaitu Rehabilitasi Jaringan Utama D.I. Kewenangan Daerah di Provinsi Banten pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian sebesar Rp 601.087.659.000

- b. Penambahan Kegiatan Inpres No 02 TA 2025 yaitu Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahap II sebesar Rp. 30.850.000.000 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - c. Penambahan Kegiatan Inpres No 02 TA 2025 yaitu Fasilitasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Tersier di BBWS Cidanau Ciujung, Cidurian dan Penambahan Kegiatan P3TGAI, sebesar Rp. 40.200.000.000 pada Satker Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian.
 - d. Pengurangan Anggaran pada Kegiatan Detail Desain Bendungan Tanjung sebesar Rp.10.000.000.000 pada SNVT Pembangunan Bendungan
5. Pada bulan Agustus 2025 pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami perubahan menjadi Rp 1.649.861.455.000,00. Perubahan tersebut disebabkan karena:
- a. penambahan kegiatan Penetapan Sempadan sungai dan Situ sebesar Rp. 6.247.000.000 Pada Satker Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - b. Pengurangan Sisa lelang Situ Cicinta Sebesar Rp. 597.741.000 pada SNVT Pembangunan Bendungan
6. Pada bulan September 2025 pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 1.849.456.000 sehingga pagu BBWS C3 perubahan menjadi Rp 1.651.710.911.000,00. Perubahan tersebut disebabkan:
- a. Penambahan Anggaran untuk Kegiatan Engineering Service dan Perizinan sebesar Rp. 3.500.000.000 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - b. Pemotongan Karena Optimalisasi Kegiatan pada Satker Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian sebesar Rp. 1.650.544.000,00
- a. Pada bulan Oktober 2025 pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami penambahan anggaran sebesar Rp 32.376.582.000 sehingga pagu BBWS C3 menjadi Rp 1.619.334.329.000,00. Perubahan tersebut disebabkan:

- b. Penambahan Inpres No 02 TA 2025 pada Kegiatan Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Tahap III sebesar Rp.8.109.000.000 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku
 - c. Penambahan Inpres No 02 TA 2025 pada Kegiatan Fasilitas Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Tersier Tahap III di BBWS Cidanau Ciujung, Cidurian dan Penambahan Kegiatan P3TGAI tahap II sebesar Rp. 12.094.799.000 pada Satker Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - d. Penambahan Kegiatan Perkuatan Hak Atas Tanah sebesar Rp. 10.000.000 pada Satker BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - e. Pengurangan karena Pengambilan Blokir pada seluruh kegiatan Perencanaan Teknis sebesar Rp. 15.306.856.000 pada Satker BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - f. Pengurangan karena Pengambilan Blokir pada Kegiatan Revitalisasi Situ Cidendong Sebesar Rp. 12.283.523.000 pada SNVT Pembangunan Bendungan
 - g. Pengurangan karena Pengambilan Blokir pada Kegiatan Pembangunan SUMUR Uji Produksi Air Tanah Sebesar Rp. 891.000.000 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku
7. Pada bulan November 2025 pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami perubahan menjadi Rp 1.572.703.900.000,00 karena adanya pengurangan sebesar Rp. 46.630.429.000 Perubahan tersebut disebabkan antara lain:
- a. Pemotongan anggaran karena pengambilan Blokir Dukungan Manajemen komponen sebesar Rp. 5.340.333.000,00 pada Satuan Kerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian;
 - b. Pemotongan anggaran karena pengambilan blokir sebesar Rp.15.947.583.000 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Cidanau Ciujung Cidurian
 - c. Pemotongan anggaran karena pengambilan blokir sebesar Rp.10.350.000.000 pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau Ciujung Cidurian
 - d. Pemotongan anggaran karena pengambilan blokir sebesar Rp.2.816.477.000 pada SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian

- e. Pemotongan anggaran karena pengambilan blokir sebesar Rp.2.209.000.000 pada SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
 - f. Pemotongan anggaran karena pengambilan blokir sebesar Rp.10.903.803.000 pada Satker Operasi dan Pemeliharaan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian
8. Pada bulan Desember 2025 pagu anggaran BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mengalami perubahan karena
- a. penambahan sebesar Rp. 30.596.000 untuk kegiatan Fasilitator Relawan Pasca Bencana Sumatra sehingga Pagu BBWS Cidanau Ciujung Cidurian menjadi Rp1.570.783.238.000
 - b. pengambilan Blokir sebesar Rp. 1.951.258.000 pada Kegiatan Pengendalian Banjir Sungai Cibanten SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Cidanau Ciujung Cidurian

Adapun Pengurangan dan penambahan Pagu TA 2025 pada Masing-masing Satuan Kerja dilingkungan BBWS C3 dapat di gambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 31 - Perubahan DIPA Tahun 2025

BULAN	DIPA SATKER/SNVT (Rp X 1000)						TOTAL PAGU
	BBWSC3	PJSA	PJPA	OP SDA	PB	ATAB	
Januari	48.915.185	51.130.000	194.577.766	79.039.262	58.546.214	424.466.511	856.674.938
Februari	48.915.185	51.130.000	194.577.766	79.039.262	58.546.214	424.466.511	856.674.938
Maret	48.915.185	53.384.793	194.577.766	79.039.262	58.546.214	424.466.511	858.929.731
April	48.915.185	53.384.793	248.077.766	79.039.262	58.546.214	469.466.511	957.429.731
Mei	48.915.185	53.384.793	248.077.766	79.039.262	58.546.214	469.466.511	957.429.731
Juni	48.915.185	53.384.793	248.077.766	75.695.932	144.309.818	469.466.511	1.039.850.005
Juli	48.915.185	53.384.793	849.165.425	119.239.262	134.309.818	438.616.511	1.643.630.994
Agustus	48.915.185	53.384.793	849.165.425	125.486.262	135.832.276	438.616.511	1.651.400.452
September	48.915.185	53.384.793	849.165.425	123.835.718	135.832.276	442.116.511	1.653.249.908
Oktober	33.556.559	28.384.793	849.165.425	135.930.517	123.548.753	450.225.511	1.620.811.558
November	29.214.761	18.034.793	831.678.845	125.026.714	120.732.276	448.016.511	1.572.703.900
Desember	29.245.357	16.083.535	831.678.845	125.026.714	120.732.276	448.016.511	1.570.783.238

Sumber: I-Emonitoring PUPR, 2025

DIPA akhir pada tahun 2025 di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian adalah sebesar Rp1.570.783.238.000. Bila dilihat dari postur anggaran, DIPA tersebut dapat dikategorikan berdasarkan sumber dana dan peruntukan jenis belanjanya. Berdasarkan sumber dana, anggaran dapat dikategorikan atas Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Sedangkan berdasarkan jenis belanjanya, anggaran dapat

dikategorikan atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Berikut adalah capaian DIPA Akhir BBWS Cidanau Ciujung Cidurian

Tabel 32 – Capaian DIPA Akhir Tahun 2025 pada BBWS C3

PROGRES PER SATUAN KERJA TA 2025 Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air												
No	Kode	Satuan Kerja	PAGU SPAN (Rp.000)				REALISASI (Rp.000)				Progres	
			RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	Keu	Fis
1	694111	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	125.026.714	0	0	125.026.714	115.463.472	0	0	115.463.472	92,35	97,91
2	694210	SNVT AIR TANAH DAN AIR BAKU BBWS CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	81.730.000	0	366.286.511	448.016.511	81.575.929	0	364.189.725	445.765.654	99,50	100,00
3	694278	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	29.245.357	0	0	29.245.357	27.407.683	0	0	27.407.683	93,72	95,07
4	694182	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	734.713.261	0	96.965.584	831.678.845	721.144.052	0	96.911.425	818.055.477	98,36	98,79
5	694112	SNVT PEMBANGUNAN BENDUNGAN BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN	23.552.458	0	97.179.818	120.732.276	22.679.386	0	79.374.081	102.053.467	84,53	99,61
6	694201	SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN	13.828.742	2.254.793	0	16.083.535	13.567.824	2.254.792	0	15.822.617	98,38	98,38
Total			1.008.096.532	2.254.793	560.431.913	1.570.783.238	981.838.347	2.254.792	540.475.231	1.524.568.370	97,06	99,06

Pada tahun 2025, terdapat penambahan kegiatan dari pemanfaatan sisa lelang pada beberapa Satuan Kerja/SNVT di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian antara lain:

Tabel 33 – Daftar Kegiatan dari Pemanfaatan Sisa Lelang (PSL) Tahun 2025 di lingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian

No	Tanggal Penambahan	Satker/SNVT	Penambahan Anggaran	Kegiatan
			(Ribu Rp.)	
1.	28-Apr-25	PJPA Cidanau Ciujung Cidurian	Rp 53.500.000	Rehabilitasi Jaringan DI Cidurian
2.	28-Apr-25	SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Rp 45.000.000	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) Reguler pada Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang
3.	18-Sep-25	SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Rp 3.000.000	Engineering Service untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Bendungan Karian Serpong (KSCS Project)
3.	18-Sep-25	SNVT Air Tanah dan Air Baku BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Rp 500.000	Fasilitasi Perizinan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku Bendungan Karian Serpong (KSCS Project)
4.	4 Juni 2025	Satker Operasi dan Pemeliharaan BBWS C3	Rp. 6.247.000	Penambahan Anggaran pada Kegiatan Penetapan sempadan situ dan sungai

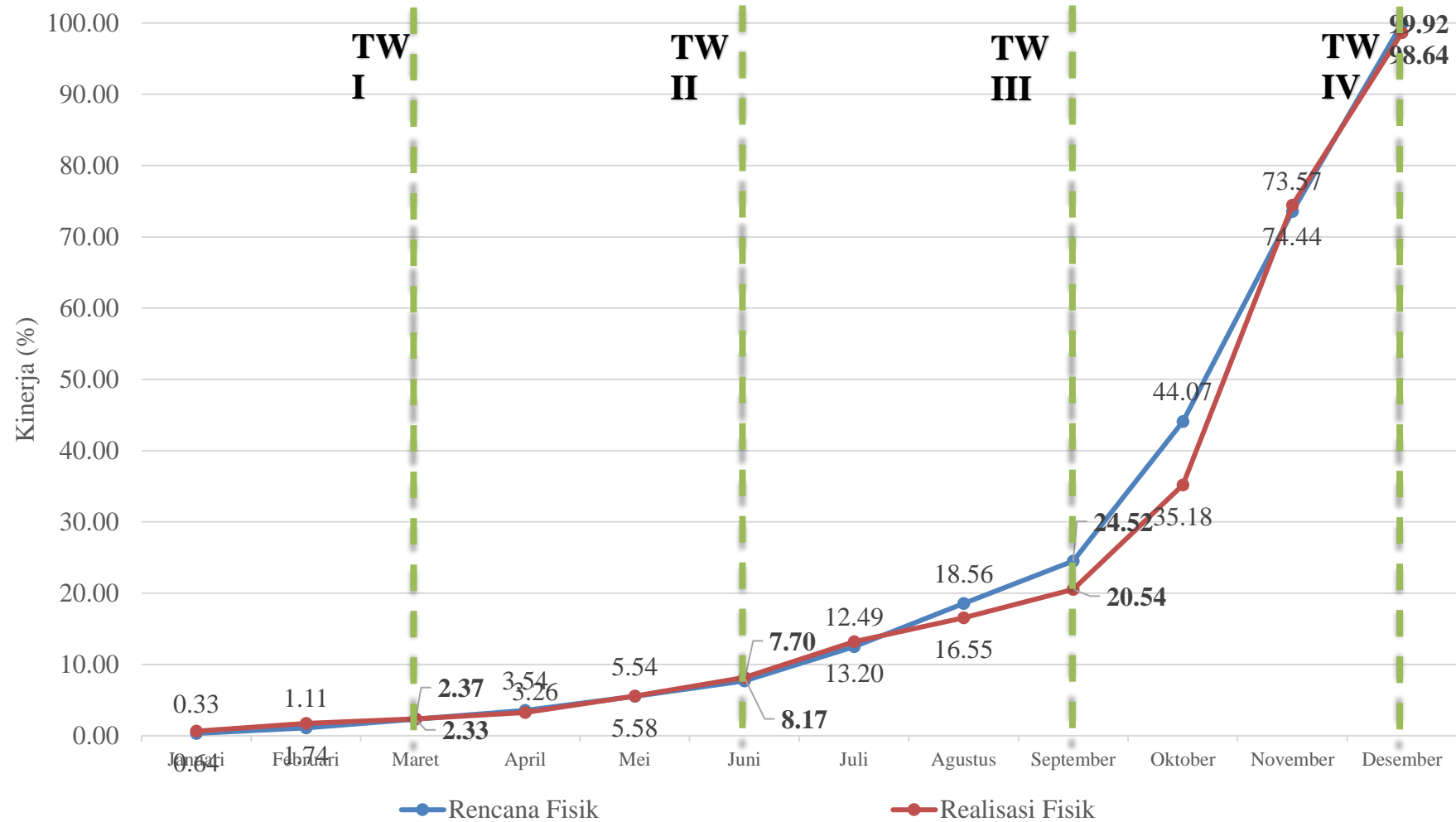
3.4.2 Analisis realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, penyerapan anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian lebih tinggi dari tahun 2024. Pada tahun 2025, BBWS cidanau Ciujung Cidurian mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 1.524.568.370.000, atau sebesar 97,06% dari total pagu akhir BBWS C3. DIPA awal tahun anggaran 2025 yang diserahkan pada tanggal 25 Desember 2024 telah memberikan dampak positif dalam penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut didukung lagi dengan komitmen BBWS untuk melaksanakan lelang dini dengan harapan dapat mempercepat proses administrasi dan pelaksanaan fisik dalam tahun berjalan. Selain itu, lelang dini juga memberi dampak positif berupa longgarnya waktu pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik sehingga akan menjamin kualitas *output* pekerjaan.

Selain itu proses administratif dalam paket-paket yang menggunakan dana pinjaman (*loan*) juga menjadi salah satu kendala pelaksanaan pekerjaan tahun 2025.

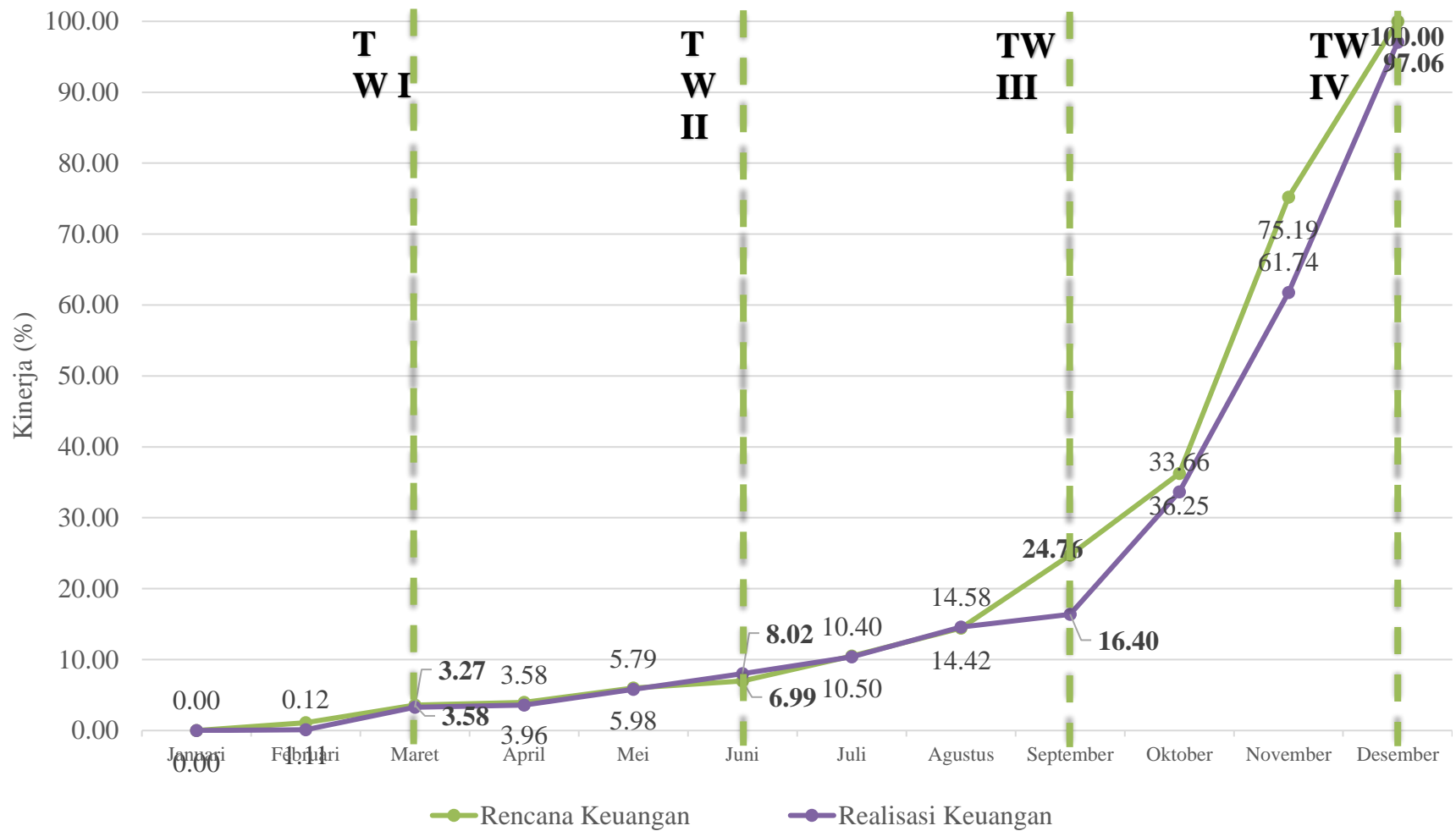
Dari realisasi penyerapan anggaran di atas terdapat sisa anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar Rp46.214.863.000, (2,94%) dengan rincian sebagai berikut:

1. Satker BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp1.837.674.000 (0,12%).
2. SNVT PJSA Cidanau-Ciujung-Cidurian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 260.918.000 (0,02%).
3. SNVT PJPA Cidanau-Ciujung-Cidurian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 13.623.368.000(0,87%).
4. SNVT Pembangunan Bendungan Cidanau-Ciujung-Cidurian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp18.678.809.000 (1,19%).
5. Satker OPSDA Cidanau-Ciujung-Cidurian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp9.563.242.000 (0,61%).
6. SNVT Air Tanah dan Air Baku Cidanau-Ciujung-Cidurian anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 2.250.857.000 (0,14%).



Gambar 35 - Kurva-S Rencana dan Realisasi Fisik BBWS C3 Tahun 2025





Gambar 36 - Kurva-S Rencana dan Realisasi Keuangan BBWS C3 Tahun 2025






Tabel 34 - Progres Penyerapan Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PAGU DIPA 2023				REALISASI					
		RPM	PLN	SBSN	TOTAL	RPM	PLN	SBSN	TOTAL	KEU	FISIK
		(Rp x 1000)				(Rp x 1000)					
2	Satker OPSDA C3	125.026.714	-	-	125.026.714	115.463.472	-	-	115.463.472	92,35	97,91
6	SNVT Air Tanah dan Air Baku	81.730.000	-	366.286.511	448.016.511	81.575.929	-	364.189.725	445.765.654	99,5	100
1	Satker BBWS C3	29.245.357	-	-	29.245.357	27.407.683	-	-	27.407.683	93,72	95,07
4	SNVT PJPA C3	734.713.261	-	96.965.584	831.678.845	721.144.052	-	96.911.425	818.055.477	98,36	98,79
5	SNVT Pembangunan Bendungan	23.552.458	-	97.179.818	120.732.276	22.679.386	-	79.374.081	102.053.467	84,53	99,61
	SNVT PJSA C3	13.828.742	2.254.793	-	16.083.535	13.567.824	2.254.792	-	15.822.616	98,38	98,38
TOTAL		1.008.096.532	2.254.793	560.431.913	1.570.783.238	981.838.346	2.254.792	540.475.231	1.524.568.369	97,06	99,06

Sumber: I-Emonitoring, 2025





Dari evaluasi kinerja triwulanan yang telah diuraikan di atas, ketersediaan anggaran yang telah ada dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kementerian PU sesuai dengan peran, tugas dan fungsi Ditjen Sumber Daya Air.

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Secara umum pengertian efisiensi adalah saat komponen-komponen *input* (waktu, sumber daya manusia, biaya dan sarana atau peralatan) untuk menghasilkan satu satuan *output* tidak berdampak pada pemborosan atau pengeluaran yang tidak berarti. Dari pengertian tersebut, komponen-komponen *input* yang tersedia dalam pelaksanaan program pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian memiliki total pegawai sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) orang dan PPPK sebanyak 111 (seratus sebelas) orang. Apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, SDM tersebut masih kurang sehingga perlu diajukan permohonan permintaan pegawai kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas kekurangan tersebut.

2. Sarana dan Prasarana

Kegiatan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian pada tahun 2024 telah didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu:

- Alat berat dengan jumlah yang cukup memadai dan sangat menunjang secara langsung. Alat berat ini memiliki peran langsung terhadap kegiatan pemeliharaan rutin infrastruktur yang akan menjamin infrastruktur irigasi dan bendungan tetap dalam status fungsional.
- Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang sangat menunjang untuk pelaksanaan tugas lapangan maupun tugas lainnya. Namun jumlah dari KDO ini masih belum seimbang dengan jumlah pegawai dan luas wilayah yang ditangani, terlebih KDO tersebut didominasi oleh kendaraan yang berusia lebih dari 10 tahun. Sehingga perlu adanya peremajaan kembali atau pengajuan penghapusan ke KPKNL dengan

mempertimbangkan usia umur ekonomis alat karena biaya pemeliharaan untuk peralatan dan mesin yang sudah melebihi usia ekonomis akan lebih tinggi.

- Peralatan dan Mesin setiap tahun selalu bertambah terutama alat pengolah data, hal ini dianggap wajar karena alat pengolah data juga cukup rentan rusak dan cepat berganti seiring semakin cepat berkembangnya kemajuan teknologi. Untuk peralatan selain pengolah data, peralatan dan mesin lainnya yang cukup membantu dalam operasional adalah pompa air, jumlah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah tangga perkantoran.

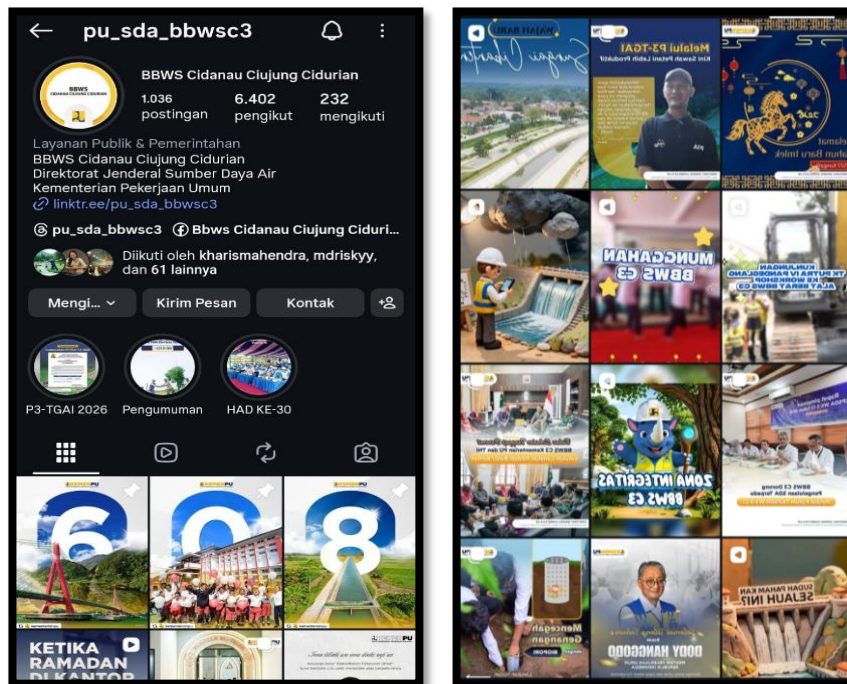
Bangunan Gedung yang ada di lingkungan BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian cukup lengkap meliputi Gedung perkantoran, Bengkel/Hanggar, Laboratorium, Gedung Pendidikan, Tempat Ibadah, Tempat Olahraga dan semua berfungsi dengan baik

3.6 ANALISIS PEMANFAATAN INFORMASI DALAM LAPORAN KINERJA

Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam penyusunan laporan kinerja sudah dilakukan di BBWS Cidanau Ciujung Cidurian, seperti penggunaan sistem e-monitoring sebagai upaya pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di lapangan, aplikasi e-perencanaan sebagai upaya penyusunan usulan program jangka menengah, penyusunan proyek tahunan dan RKA-K/L, serta penggunaan SAKTI Anggaran untuk membantu proses penyesuaian anggaran pada tahun berjalan. Selain itu BBWS Cidanau Ciujung Cidurian juga menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai kegiatan yang ada di BBWS Pemali Juana, antara lain Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp.

No	Kode	Kegiatan/RK/RD/Paket	Target	Setoran	Lebuat	Jenis Paket	Metode Pemilihan	Sumber Dana	Pagu (Rp Ribus)	Realisasi (Rp Ribus)	Risiko (Rp Ribus)	Pengembalian (Rp Ribus)	Kev (%)	Fiskal (%)	
1	7688	Perencanaan, Pengorganisasian, Penganggaran, dan Evaluasi							750.000	595.346		0	79,38	79,38	
2	7688.FAD	Perencanaan dan Penganggaran (Layanan, Dokumen)	1	(Layanan, Dokumen)					200.000	141.105		0	70,55	70,55	
3	7688.FAD.003	Dokumen program dan anggaran	1	(Layanan, Dokumen)					200.000	141.105		0	70,55	70,55	
4	7688.FAD.003.122.A	Penyusunan Program dan Anggaran BBWS Cidanau Ciujung Cidurian; Banten; Kota Serang; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	1	Dokumen		KOTA SERANG	AU	Swabotola	RPPL	200.000	141.105	55.540	0	70,55	70,55
5	7688.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Rekomendasi)	1	Laporan/Rekomendasi					550.000	454.241		0	82,59	82,59	
6	7688.FAE.001	Pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja, UPT, dan Satuan Kerja	1	Laporan/Rekomendasi					550.000	454.241		0	82,59	82,59	
7	7688.FAE.001.122.A	Penyusunan Lelup dan PK BBWS Cidanau Ciujung Cidurian; Banten; Kota Serang; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	1	Dokumen		KOTA SERANG	AU	Swabotola	RPPL	100.000	60.652	35.670	0	60,65	60,65
8	7688.FAE.001.196.A	Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi dan Non Konstruksi Bidang PUSA, PUPA, dan UPT; Banten; Kota Serang; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	1	Dokumen		BANTEN	AU	Swabotola	RPPL	450.000	393.589	48.950	0	87,46	87,46
9	7689	Kepastian Internal Direktorat Sumber Daya Air							288.000	151.761		0	52,69	52,69	
10	7689.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	1	Rekomendasi Kebijakan					288.000	151.761		0	52,69	52,69	
11	7689.ABF.002	Kepastian Interner dan manajemen risiko serta pembangunan zona Integritas	1	Rekomendasi Kebijakan					288.000	151.761		0	52,69	52,69	
12	7689.ABF.002.156.A	Penetapan Kepastian Interner dan Manajemen Risiko; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	1	Dokumen		KOTA SERANG	AU	Swabotola	RPPL	125.000	52.953	39.363	0	42,36	42,36
13	7689.ABF.002.156.B	Sistem Manajemen Awi Pemupaan (SMAP) untuk BBWS Cidanau Ciujung Cidurian; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; S; SYC	1	Dokumen		BANTEN	AU	Swabotola	RPPL	63.000	35.220	21.815	0	55,90	55,90
14	7689.ABF.002.156.C	Pengembangan WBN dan WBSN BBWS Cidanau Ciujung Cidurian; 1 Dokumen; 1 Dokumen; NF; Aib; SYC	1	Dokumen		BANTEN	AU	Swabotola	RPPL	100.000	63.588	36.362	0	63,59	63,59

Gambar 37 -Pemanfaatan Teknologi Informasi aplikasi I-Emonitoring pada BBWS C3 Tahun 2025



Gambar 38 -Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui Sosial Media pada BBWS C3 Tahun 2025

3.6.1 Analisis Perhatian utama Pimpinan Terhadap Informasi dalam Laporan Kinerja

Pimpinan sebagai penanggung jawab tersusunnya laporan kinerja unit kerja dan telah berperan aktif terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja yang dibuktikan dengan beberapa kegiatan yang menunjukkan dukungan pimpinan dalam penyusunan Laporan kinerja TA 2025 BBWS Cidanau Ciujung Cidurian di antaranya :

1. SK Penyusun Laporan Kinerja atau SK Penetapan Tim SAKIP TA 2025
2. Workshop penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian
3. Kegiatan Pembahasan Internal Laporan Kinerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian TA 2025.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDURIAN
Jalan Ustadz Uzair Yachya No. 1 Telp. (0254) 206 111 Fax. (0254) 227117 Serang - Banten 42117

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDURIAN
NOMOR: 08/KPTS/Az/2025

TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN SAKIP
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDURIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDURIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian TA 2025, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Anggaran;
 b. bahwa dalam rangka pembinaan, peningkatan kualitas penerapan dan mutu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian, perlu dibentuk wadah koordinasi antar Person In Charge (PIC) pada satuan kerja di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian;
 c. bahwa para pejabat atau pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
 d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

menyampaikan seluruh laporan kepada Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (KPSIDA) BBWS Cidanau Cijung Cidurian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Dokumen PK awal ditetapkan dan disampaikan paling lambat pada Minggu I Bulan Januari;
 b. Dokumen Rencana Aksi (TA) disampaikan dan ditetapkan paling lambat pada 31 Januari;
 c. Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi (TO) disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
 d. Laporan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Awal dan POK Akhir disampaikan 1 (satu) tahun sekali;
 e. Laporan Kinerja (LAKIP) Satuan Kerja disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tahun anggaran berakhir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing-masing satuan kerja di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Cijung Cidurian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
 Pada tanggal : 20 Januari 2025


 Ketut Jayada, S.T.
 NIP. 197010151997031008

Gambar 39 - Surat Keputusan Kepala BBWS Cidanau Cijung Cidurian



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDURIAN
Jalan Ustadz Uzair Yachya No. 1 Telp. (0254) 206 111 Fax. (0254) 227117 Serang - Banten 42117

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Januari 2025
 Tempat : R. Rapat KPSIDA
 Pembahasan LAKIP, SAKIP, PISA dan PIPA BBWS C3

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (LP)	JABATAN/INSTANSI	TELP	TANDA TANGAN
1.	Tusma Elfira	P	Kabid KPSIDA	—	
2.	M. Harlanjuda	L	Kabid PISA	—	
3.	Bambang Badro I.	L	Kabid Program	—	
4.	Teuku Nono F.M.	L	Kaum Suran	—	
5.	Anisa Fitria	P	Staf KPSIDA	—	
6.	Dwi Yunita	P	Kortek PISA	—	
7.	Gilang B.R.	L	Kortek PISA	—	
8.	M. Dheny N.	L	SAKIP PISA	—	

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUNG CIDURIAN
Jalan Ustadz Uzair Yachya No. 1 Telp. (0254) 206 111 Fax. (0254) 227117 Serang - Banten 42117

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025
 Tempat : R. Rapat KPSIDA
 Agenda : Pembahasan Internal LAKIP SAKIP, BIOD dan AYAB

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (LP)	JABATAN/INSTANSI	TELP	TANDA TANGAN
1.	Tusma Elfira	P	KASIDA	—	
2.	Bambang Badro I.	L	Kabid Program	—	
3.	Hane Syarifini	P	Koordinator Teknik ATAB	0851 5796609	
4.	Anisa F.	P	Staf KPSIDA	—	
5.	Christin Y.	P	Bandungun	08775759281	
6.	Nadga S.	P	Bandungun	08997167959	
7.	Pudleum Sudi	L	KPSIDA	—	

Gambar 40 - Pembahasan Internal Laporan Kinerja (LAKIP) TA 2025

3.6.2 Analisis Kepedulian seluruh pegawai terhadap informasi dalam laporan Kinerja

Pada penyusunan laporan Kinerja BBWS Cidanau Ciujung Cidurian terdapat bentuk kepedulian seluruh pegawai terhadap informasi dalam laporan kinerja di buktikan dengan keikutsertaan seluruh, pejabat struktural, pejabat administratif dan seluruh pegawai BBWS Cidanau Ciujung Cidurian pada **kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja serta Penyusunan Renstra TA 2025-2029.**



Gambar 41 - Workshop Penyusunan LAKIP, PK dan resntra TA 2025-2029 Dilingkungan BBWS Cidanau Ciujung Cidurian



Gambar 42 - Workshop penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)

3.6.3 Analisis Penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja terhadap informasi dalam laporan kinerja berkala

Untuk menjamin pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing sub output pada sistem e-monitoring. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terhadap realisasi atau capaian. Laporan Kinerja Bulanan tersebut disampaikan setiap awal bulan berikutnya melalui aplikasi e-Sakip Kementerian PUPR. Laporan monitoring dan evaluasi bulanan memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Nilai kinerja masing-masing output merupakan perbandingan antara realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing sub output dalam sistem e-monitoring. Penilaian kinerja bulanan diberikan pada rencana aksi yang memuat target bulanan yang harus dipenuhi sebagai bagian target tahunan. Penilaian dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi yang dilakukan menjadi masukan bagi masing-masing Satuan Kerja/SNVT untuk dilakukan upaya-upaya

percepatan dan peningkatan kinerja pada bulan berikutnya. Sebagai contoh, beberapa Satuan Kerja/SNVT yang pada bulan sebelumnya dievaluasi dengan predikat sangat kurang, ini menjadi masukan untuk segera dilakukan upaya-upaya percepatan maupun penyesuaian terhadap target bulanan berikutnya sehingga secara keseluruhan target Tahun 2025 dapat tercapai.

MATRIKS KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Unit Organisasi: Nama Balai: BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIJUJUNG-CIDURIAN
 Direktorat: Jenderal Sumber Daya Air
 Bulan: Agustus
 Restrukturisasi: revisi

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	Target PK Revolusi 2024	Bobot	Bulan AGUSTUS			Keterangan	Permasalahan	Tindak Lanjut	FORUM PERBAIHAN	
				Rencana (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)					
D612 KETAHANAN SUMBER DAYA AIR											
MEMINIMALKAN KETEGANGAN AIR MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SECARA TERINTEGRASI											
Jumlah penambahan kapasitas layanan sarana prasarana air baku yang terbahang	m3/detik	0.2425	31.74	17.5	19.7	112.57	35.73017428071	Nilai Kinerja = 100 di kelompok dalam Kategori "Sesuai"	Terdapat Paket Kegiatan yang masih belum terkontrak yaitu Kegiatan Rehabilitasi Embung Ropass saat ini dalam tahap kelengkapan	Berkoordinasi dengan BP2JK agar proses lelang dapat berjalan sesuai target	
Penurunan luas kawasan terlewat dampak banjir	Ha	1963	15.17	65	63	76.70	14.53046153660	Nilai Kinerja 90 di kelompok dalam Kategori "Baik"	Di perlukan Penambahan anggaran pada Kegiatan FISRB pembangunan Tanggul Cijujung Paket III	melakukan luncuran tambahan anggaran untuk Loan FISRB pada triwulan III	
Jumlah kumulatif penambahan kapasitas tangkap sumber-sumber air yang dibangun	Juta m3	0	33.63	38	46.1	121.32	40.7985	Nilai Kinerja = 100 di kelompok dalam Kategori "Sesuai"			
Jumlah luas daerah terlewat yang direhabilitasi melalui APBN, APBD dan DAK	Ha	0	8.63	7	6.27	89.57	7.7300142857143	Nilai Kinerja 70.89 di kelompok dalam Kategori "Butuh perbaikan"	Terdapat Paket Pekerjaan yang masih belum terkontrak yaitu paket Kegiatan Rehabilitasi Di Cibalong yang saat ini sedang menunggu penetapan Hentari PUPR	Berkoordinasi dengan direktorat pembina dalam update surat penetapan Hentari PUPR terkait Penetapan Penyedia Jasa	
Tingkat layanan prasarana SDA	persentase	72.3	11.2	40	45.6	114.00	12.74	Nilai Kinerja = 100 di kelompok dalam Kategori "Sesuai"			
TOTAL			100				111.34				

FORM PENGIRIMAN DOKUMEN LAPORAN MONEV KINERJA BULANAN ESELOH II / UPT / SATUAN KERJA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 STATUS 07 Februari 2025 ; 15:13:06 WIB

NO	KODE	NAMA SATKER	FORM PENGIRIMAN DOKUMEN LAPORAN BULANAN ESELOH II/ UPT/SATKER												
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	
UPT/BALAI															
1	06633801	BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIJUJUNG-CIDURIAN													
			04-Mar-24 11:13:24	04-Mar-24 14:48:58	13-May-24 10:20:48	13-May-24 12:06:22	10-Jun-24 15:16:28	15-Jul-24 15:02:42	13-Sep-24 16:08:40	17-Sep-24 09:20:06	30-Oct-24 14:14:29	12-Dec-24 15:33:37	02-Jan-25 12:17:25	16-Jan-25 11:19:45	
		Keterangan	Laporan monev BBWS C3 Bulan Januari	Laporan Monev Bulanan BBWS C3 Bulan Februari	Laporan Monev Bulan Maret TA 2024	Laporan monev Bulan April TA 2024	Laporan Monev BBWS C3 balai Hnt	Laporan Monev Bulanan BBWS C3	Laporan Monev Juli	Laporan Monev Bulan Agustus	Monev Bulan September	Laporan Monev Bulan Oktober	Laporan monev november	Laporan Monev Desember TA 2024	
TOTAL															

KETERANGAN:

- Upload/Unggah Pengiriman Dokumen Laporan Bulanan UNIT ESELOH II/UPT/SATKER
- Tanggal Pengiriman Dokumen
- Upload/Unggah Pengiriman Dokumen Bulanan

Gambar 43 - Monitoring progres pekerjaan dengan laporan monev bulanan pada Aplikasi E-sakip Kementerian PU

3.6.4 Analisis penyesuaian penggunaan Anggaran untuk mencapai kinerja terhadap informasi dalam laporan kinerja berkala

Salah satu bentuk penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja, yang menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Untuk mendukung penyusunan Laporan Kinerja tersebut maka upaya-upaya penyesuaian anggaran dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dilakukan oleh masing-masing Satker/SNVT. Revisi DIPA baik di tingkat Kanwil maupun di tingkat Ditjen Anggaran dilakukan dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan anggaran di dalam DIPA.

Pada awal Tahun 2025, BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian mendapat alokasi DIPA sebesar Rp856.674.938.000 yang postur anggaran ditunjukkan pada Berdasarkan jenis belanja porsi terbesar dialokasikan untuk belanja modal sebesar Rp. 739.633.312.000 atau 86,34%. Pada pelaksanaan anggaran, terdapat beberapa revisi yang terjadi pada besaran DIPA tersebut. Total revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebanyak 72 (Tujuh Puluh dua) kali yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kali revisi POK/Update Halaman III DIPA dan 49 (empat puluh sembilan) kali perubahan anggaran DIPA. DIPA akhir pada tahun 2025 di BBWS Cidanau-Ciujung-Cidurian adalah sebesar Rp1.570.783.238.000 Realisasi penyerapan anggaran pada TA 2025 adalah Rp. 1.524.568.370.000 (97,06%) dan realisasi progress fisik adalah 98,64%. Adapaun terdapat sisa anggaran pada akhir tahun 2025 sebesar Rp46.214.868.000, (2,94%) yang di sebabkan karena adanya sisa Blokir dan sisa PHLN.

3.6.5 Analisis Pencapaian keberhasilan Kinerja berdasarkan Informasi dalam Laporan Kinerja

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian sampai dengan bulan Desember 2025 berjalan dengan lancar dan progres pekerjaan sesuai dengan target yang telah diperjanjikan. Namun ada penyesuaian target terhadap Perjanjian Kinerja awal, dikarenakan beberapa kegiatan yang baru masuk ke dalam DIPA 2025 serta adanya penyesuaian target berdasarkan kondisi di lapangan. Namun demikian, capaian kinerja fisik pada Desember 2025 sebagian menunjukkan kinerja baik. Ada sebagian anggaran tidak terserap pada beberapa Satuan Kerja/SNVT dikarenakan perubahan kebijakan pelaksanaan kegiatan,

3.6.6 Analisis penyesuaian Perencanaan Kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja

Berdasarkan capaian kinerja Tahun 2025 ini, dapat dilihat masih ada beberapa perencanaan kinerja yang mengalami perubahan dibandingkan target awal. Ada yang berkurang dan ada yang meningkat, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

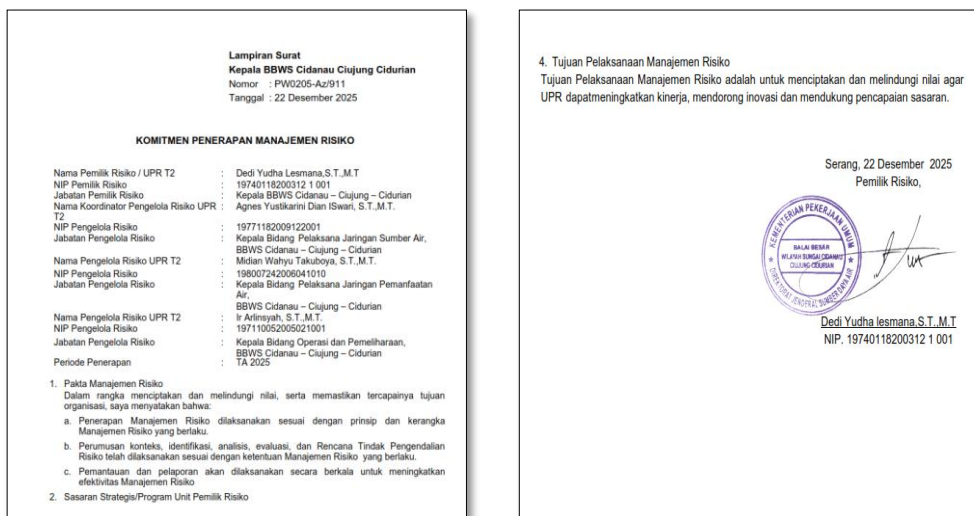
Tabel 35 – Penyesuaian Perencanaan Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan/Indikator	Satuan	Target PK Awal 2025	Capaian PK Akhir 2025	Keterangan
PROGRAM KETAHANAN SUMBER DAYA AIR					
Sasaran Program : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional					
IKSP 1	Kapasitas Tampung Air	m3/Kapita	58,99	59,99	Berubah
IKSP 2	Rasio Kapasitas Air Baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	52,78	52,78	Tetap
IKSP 3	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	61,55	61,55	Tetap
IKSP4	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	15,59	15,59	Tetap
IKSP5	Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m3	18,57	0,324	Berubah
IKSP6	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	%	0,03	0,02	Berubah
IKSP7	Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	%	80	80	Tetap
IKSP8	Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	%	4,06	4,06	Tetap
IKSP9	Persentase Kondisi Keandalan Daerah Irigasi	%	0,13	0,44	Berubah
Sasaran Program : Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi					
IKSP 1	Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%	87,31	88,51	Berubah
IKSP 2	Tingkat Pelaksanaan Program dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	54,13	54,13	Tetap
IKSP 3	Tingkat Penyelenggaraan SAKIP pada Entitas BBWS	%	100	100	Tetap
IKSP 4	Tingkat Implemenstasi Transformais Digital	%	53	53	Tetap
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSP 1	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	%	100	97	Berubah

Perubahan di dalam pelaksanaan tidak dapat dihindari, mengingat beberapa kegiatan yang mendesak dan kegiatan lapangan yang memerlukan penyesuaian dapat berdampak kepada Perubahan target pencapaian.

3.6.7 Analisis perubahan budaya Kinerja Organisasi Berdasarkan Informasi dalam laporan kinerja

Bentuk konkrit yang telah dilakukan adalah adanya manajemen risiko yang dapat memitigasi risiko sedini mungkin sehingga kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya tidak dapat terjadi kembali, adanya Loss Event Data (LED) dapat menjadi bank data base sebagai referensi untuk menentukan risiko-risiko yang memiliki persentase kemungkinan terbesar dapat terjadi. Selanjutnya tindak lanjut rekomendasi yang telah disepakati untuk meminimalkan risiko, dipantau secara berkala dan berkesinambungan. Laporan Kinerja Organisasi juga dimanfaatkan sebagai acuan dalam penilaian pelaksanaan penerapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).



Gambar 44 - Komitmen Manajemen Risiko (Revisi) BBWS Cidanau Cijung Cidurian TA 2025



BerAKHLAK
BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK BERAKHLAK

PU KEPIMPINAN BERKUALITAS
RI NEGERI
UNTUK RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T., Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya kepada Inspektorat Jenderal; dan
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Serang, 28 Agustus 2025

Pembuat Pernyataan :
Kepala BBWS Cidanau Ciujung Cidurian


Dedi Yudha Lesmana, S.T., M.T.
 NIP. 197401182003121001

Gambar 45 - Pakta Integritas BBWS Cidanau Ciujung Cidurian terhadap komitmen Zona Anti Korupsi



BAB IV PENUTUP

1.1 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian merupakan wujud pertanggungjawaban Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan masyarakat (publik) sebagai pemanfaat sarana dan prasarana yang dibangun. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bidang sumber daya air tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan seluruh program yang ada di lingkup Ditjen Sumber Daya Air, baik dukungan secara langsung maupun tidak langsung.


Selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2025, fungsi pengawasan dan pengendalian internal juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di samping dukungan yang berasal dari internal, kinerja pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air tahun 2025 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholder*. Sehingga suksesnya pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian tahun 2025 terletak pada komitmen dan kerja keras bersama sesuai dengan Visi Kementerian PUPR: *Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*

Capaian Kinerja tahun 2025 Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian adalah masuk dalam kategori AA (**Sangat baik**) dimana realisasi kinerja Keuangan capaian sampai dengan akhir Triwulan IV mencapai 97,06% dan relaisais fisik mencapai 99,06%.

1.2 PERMASALAHAN, KENDALA, DAN HAMBATAN

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian tahun 2025 mengalami kemajuan. Namun masih ditemui permasalahan, kendala atau hambatan selama penyelenggaraan yang meliputi:

1. lambatnya penerbitan NOL (*No Objection Letter*), sehingga proses penandatanganan kontrak terlambat Terlambatnya pelaksanaan pekerjaan dikarenakan

- 
- Lamanya proses Pengadaan Barang dan Jasa (Lelang)
 - Belum selesainya proses pelaksanaan pembebasan lahan
 - Sulitnya mendapatkan ketersediaan bahan material
 - Musim hujan sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan dilapangan
2. Durasi waktu pekerjaan sangat singkat sebab intruksi pelaksanaan baru diberikan Ketika hampir di akhir tahun

1.3 REKOMENDASI DAN LANGKAH TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Memperhatikan kendala dan hambatan di atas, direkomendasikan langkah - langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala/hambatan yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang, meliputi:

1. Melakukan perencanaan dan penganggaran rencana program dan kegiatan lebih dini.
2. Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan penyerapan anggaran untuk pekerjaan tahun mendatang.
3. Mempercepat pembentukan struktur organisasi pada unit kesatkeran pada setiap awal tahun.
4. Mengeluarkan petunjuk teknis untuk kegiatan-kegiatan yang memerlukannya, seperti Manual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Selain itu pada segi Sumber Daya Manusia, langkah/strategi yang bisa dilakukan antara lain:

1. Mempercepat penyusunan dan penempatan personil pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian;
2. Mengirimkan personil dalam pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan;
3. Menambah personil pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian, agar tidak terjadi beban kerja berlebih/*overload*.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
Jalan Ustadz Uzair Yachya No. 1 Telp. (0254) 206 111 Fax. (0254) 227117 Serang – Banten 42117

LEMBAR ASISTENSI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BBWS CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN TA 2025

NO	TANGGAL	NAMA (JABATAN)	CATATAN	PARAF
2.	9/1/2026	Ridwan Ferozi Kahid KPLSDA	<ul style="list-style-type: none">- Telu PK awal & akhir serta target renstra 2025-2029- Telu output & outcome tiap satuan kerja.- Cek kronologis versi DIPA pada tiap satuan kerja	K
3.	12/1/2026	Mahar H. katim Peranc.	<ul style="list-style-type: none">- Cek data teknis sub bab 1.5, sinkronisasi dengan data dokumen Rancangan RPSDA WS C3 terbaru.- Cek update nomenklatur terbaru Kementerian PU beserta program / kegiatan (Sub bab 2.1)	



PENGENDALIAAN BANJIR SUNGAI CIBANTEN KOTA SERANG



Lingkup Pekerjaan Pengendalian Sungai Cibanten Kota Serang meliputi pekerjaan 3,3 km Galian Sungai, 1000 Meter Lining Beton, 565 Beton Siklop dan Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau. Dengan manfaat Meningkatkan kapasitas tampungan Sungai Cibanten, Mereduksi banjir kawasan pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum Kecamatan Kasemen, serta Penataan Kawasan pada bekas bangunan liar di Lingkungan Sukadana, Kecamatan Kasemen





JARINGAN IRIGASI AIR TANAH (JIAT)



6.2550° S, 106.0029° E
Ciomas
JIAT Ujung Tebu





PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI DI CIMOYAN TAHAP I, KABUPATEN PANDEGLANG





REHABILITASI DI CIUJUNG, KABUPATEN SERANG





REHABILITASI DI CIDURIAN, KABUPATEN TANGERANG





REHABILITASI DI CIBALIUNG, KABUPATEN PANDEGLANG



6.820976° S, 105.833830° E ±4.63m
Sal. Primer kanan pemasangan precast 100%
sta 24+125



6.799135° S, 105.866474° E ±3.98m
Sal. Sekunder leuwigede pemasangan modular
100% sta 1+475





REHABILITASI JARINGAN UTAMA D.I KEWENANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN





REHABILITASI JARINGAN UTAMA D.I KEWENANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DEDI YUDHA LESMANA

Jabatan : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI PURWANTORO

Jabatan : Direktur Jenderal Sumber Daya Air

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 September 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


DWI PURWANTORO


DEDI YUDHA LESMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR	
SASARAN PROGRAM: Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional	
Kapasitas tampungan air	58,99 m ³ /kapita
Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	52,78 %
Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	61,55 %
Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	15,59 %
Efisiensi pemanfaatan air irigasi	0,324 USD/m ³
Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	0,02 %
Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	80,00 %
Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	4,06 %
Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	0,44 %
SASARAN PROGRAM: Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi	
Tingkat Kepatuhan Intern UPT	87,31 %
Tingkat Pelaksanaan Program Dan Anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	54,13 %
Tingkat Penyelenggaraan SAKIP Pada Entitas di B/BWS	100,00 %
Tingkat implementasi transformasi digital UPT	53,00 Nilai

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 1

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN	
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	97,00 %
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	

PROGRAM

- 1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
- 2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN

Rp. 1.626.137.785.000,00
Rp. 25.573.127.000,00
Rp. 1.651.710.912.000,00

Direktur Jenderal Sumber Daya Air


DWI PURWANTORO

Jakarta, 30 September 2025
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau
Ciujung Cidurian


DEDI YUDHA LESMANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 2

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	OUTPUT TAHUN BERJALAN	OUTCOME TAHUN BERJALAN	TARGET KUMULATIF
PROGRAM: KETAHANAN SUMBER DAYA AIR			
SK: Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA			
Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Satuan Kerja	80,01 Nilai	80,01 Nilai	80,01 Nilai
Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Tingkat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja	87,36 Nilai	87,36 Nilai	87,36 Nilai
SK: Meningkatnya maturitas kepatuhan intern			
Tingkat Kepatuhan Intern Satuan Kerja	86,50 %	86,50 %	86,50 %
SK: Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air			
Tingkat layanan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	1 WS	1 WS	1 WS
Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKTA-WS)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Tingkat kesiapan teknis	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
SK: Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi			
Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	0,30 Km	0,00 Ha Kumulatif	0,00 Ha Kumulatif
Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	152,17 Km	14.327,27 Ha Kumulatif	14.327,27 Ha Kumulatif
SK: Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air			
Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	0,20 Km	5,00 Ha Kumulatif	5,00 Ha Kumulatif
SK: Meningkatnya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan			
Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	1,00 Unit	0,20 Juta m ³	0,20 Juta m ³
SK: Meningkatnya pasokan air baku berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air baku			
Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun	28,000 Km	0,086 m ³ / dt Kumulatif	0,086 m ³ / dt Kumulatif
SK: Meningkatnya penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa			
Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	0,000 m ³ / dt	0,000 m ³ / dt Kumulatif	0,000 m ³ / dt

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR



Lampiran 2

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	OUTPUT TAHUN BERJALAN	OUTCOME TAHUN BERJALAN	TARGET KUMULATIF
SK: Terjaganya layanan infrastruktur sda dalam rangka meningkatkan dan menjaga kapasitas tampungan air, pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta untuk ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air			
Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	325,52 Juta m ³	37,00 Unit Kumulatif	37,00 Unit
Jumlah unit pengelola yang dibentuk/dioperasikan	2 Unit	2 Unit Kumulatif	2 Unit
Jumlah sempadan yang ditetapkan	15,00 Unit	15,00 Unit Kumulatif	15,00 Unit
Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	13,000 Unit	0,900 m ³ / dt Kumulatif	0,900 m ³ / dt
Luas layanan irigasi yang dikelola	451,16 Km	31.088,00 Ha Kumulatif	31.088,00 Ha
Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam padat karya	155,00 Lokasi	2.325,00 Orang Kerja	2.325,00 Orang Kerja
Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	4,00 Unit	0,98 Miliar m ³	0,98 Miliar m ³
Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	1 Unit	1 Unit Kumulatif	1 Unit
Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara	31.902,00 Ha	88,32 Km Kumulatif	88,32 Km
Jumlah sungai yang dipelihara	4,00 Unit	4,00 Sungai	4,00 Sungai
Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana	0,00 Operasi	0,00 Jumlah Layanan	0,00 Jumlah Layanan
SK: Meningkatnya tata kelola operasi dan pemeliharaan			
Jumlah rekomendasi teknis yang disusun	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi
Jumlah dokumen perhitungan indeks river basin organization performance benchmarking	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah kelompok masyarakat dengan penguatan kelembagaan yang difasilitasi	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat
Jumlah wadah koordinasi pengelolaan sda wilayah sungai kewenangan pusat yang difasilitasi	1 Wadah Koordinasi	1 Wadah Koordinasi	1 Wadah Koordinasi
Jumlah dokumen alokasi air yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG-CIDURIAN
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**



Lampiran 2

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR SASARAN PROGRAM	OUTPUT TAHUN BERJALAN	OUTCOME TAHUN BERJALAN	TARGET KUMULATIF
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN			
SK: Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis			
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Unit Pelaksana Teknis Satker BBWS	100,00 %	100,00 %	100,00 %

PROGRAM

ANGGARAN

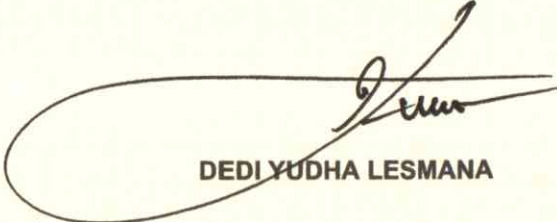
- 1. Program Ketahanan Sumber Daya Air
- 2. Program Dukungan Manajemen

Rp. 1.626.137.785.000,00
Rp. 25.573.127.000,00
Rp. 1.651.710.912.000,00

Direktur Jenderal Sumber Daya Air


DWI PURWANTORO

Jakarta, 30 September 2025
**Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau
Ciujung Cidurian**


DEDI YUDHA LESMANA

LAMPIRAN 1.A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET (OUTPUT)					SATUAN	TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
145	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM																			
03	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR																			
	Sasaran Strategis:																			
	01 Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air																			
	Indikator Sasaran Strategis:																			
	01 Indeks Ketahanan Air Nasional	Nilai		3,5 (Moderat)	3,5 (Moderat)	3,5 (Moderat)	3,75 (Moderat)	3,75 (Moderat)												
PROGRAM FC KETAHANAN SUMBER DAYA AIR																				
	Sasaran Program:																			
	01 Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif untuk mendukung swasembada air nasional																			
	Indikator Sasaran Program:																			
	01 Kapasitas tampungan air	(m3/kapita)	Banten	58,99	58,43	57,89	57,37	56,88												
	02 Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	%	Banten	57,78	52,22	51,67	51,13	50,59												
	03 Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	%	Banten	61,55	61,55	61,55	61,55	61,55												
	04 Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	%	Banten	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59												
	05 Efisiensi pemanfaatan air irigasi	(USD/m3)	Banten	0,324	0,350	0,367	0,387	0,409												
	06 Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	(%)	Banten	0,02	1,00	1,50	2,00	2,50												
	07 Tingkat kinerja layanan infrastruktur sumber daya air	(%)	Banten	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	08 Persentase pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan pertanian multikomoditas	(%)	Banten	4,06	5,00	5,00	5,00	5,00												
	09 Persentase kondisi keandalan daerah irigasi	(%)	Banten	0,44	0,66	1,00	1,00	1,00												
	Sasaran Program:																			
	02 Mentransformasi tata kelola pengelolaan sumber daya air terintegrasi																			
	Indikator Sasaran Program:																			
	01 Tingkat layanan perizinan berusaha penggunaan SDA, kelembagaan pengelolaan SDA, dan peran serta masyarakat	(%)	Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	02 Tingkat layanan administrasi dan teknis operasional Dewan SDA Nasional	(%)	Banten	-	-	-	-	-												
	03 Tingkat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	(%)	Banten	87,30	90,00	95,00	100,00	100,00												
	04 Tingkat keselarasan perencanaan dan pemrograman Direktorat Jenderal SDA	(%)	Banten	54,13	60	65	70,00	75,00												
	05 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)	Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	06 Tingkat layanan teknis sumber daya air	(%)	Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	07 Tingkat implementasi transformasi digital Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)	Banten	53,00	55,00	60,00	65,00	70,00												
	08 Tingkat nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal SDA	(Nilai)	Banten	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00												
KEGIATAN 7688 Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi																				
	Sasaran Kegiatan:																			
	01 Mentransformasi tata kelola sistem dan strategi pengelolaan SDA																			
	Indikator Sasaran Kegiatan:																			
	02 Jumlah dokumen pola dan rencana yang ditetapkan/direvisi	Dokumen	Banten	-	-	-	-	-												
	03 Tingkat implementasi RPSDA WS Kewenangan Pusat	%	Banten	-	1,00	-	-	-												
	06 Tingkat pelaksanaan program dan anggaran UPT di Direktorat Jenderal SDA	%	Banten	54,13	60,00	65,00	70,00	75,00												
	10 Tingkat penyelenggaraan SAKIP pada Entitas di BBWS/BWS	%	Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	11 Tingkat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada BBWS/BWS	%	Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
	12 Tingkat implementasi penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja	Nilai	Banten	80,01	83,00	85,00	88,00	90,00												
KRO	FAD Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen		2	3	3	3	4	Dokumen	2	3	3	3	4	600	900	900	900	900	2.900
RO	001 Dokumen penyusunan/revisi/reviu pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat	Dokumen		-	-	-	-	1	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.000
	Revisi Pola/RPSDA WS Cidanau Ciujung Cidurian	Dokumen	Kota Serang	-	-	-	-	1		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.000
RO	002 Dokumen pemantauan dan evaluasi pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan Pusat	Dokumen		-	1	1	1	1	Dokumen	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300	300
	Pemantauan RPSDA WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Dokumen	Kota Serang	-	1	1	1	1		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300	300
RO	003 Dokumen program dan anggaran	Layanan		2	2	2	2	2	Layanan	2	2	2	2	2	600	600	600	600	600	600
	Penyusunan Program dan Anggaran BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1	400	400	400	400	400	400
	Penilaian Usulan dan Konsolidasi Program Prioritas SDA (Konsultasi SDA)	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200	200
KRO	FAD Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	Laporan		2	2	2	2	2	Laporan	2	2	2	2	2	650	650	650	650	650	650
RO	001 Pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan SAKIP Unit Kerja, UPT, dan Satuan Kerja	Laporan		2	2	2	2	2	Laporan	2	2	2	2	2	650	650	650	650	650	650
	Penyusunan Laki dan PK BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Laporan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	250	250	250	250	250	250
	Pemantauan Pelaksanaan Konstruksi dan Non Konstruksi Bidang PJSA, RUPA dan OP	Laporan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Laporan	1	1	1	1	1	400	400	400	400	400	400
KEGIATAN 7689 Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air																				
	Sasaran Kegiatan:																			
	01 Meningkatkan maturitas kepatuhan intern																			
	Indikator Sasaran Kegiatan:																			
	04 Tingkat Kepatuhan Intern UPT	%		87,30	90,00	95,00	100,00	100,00												
	05 Tingkat Kepatuhan Intern Satuan Kerja	%		70,00	75,00	78,00	80,00	85,00												
KRO	BAH Pelayanan Publik Lainnya	Layanan		9	9	9	9	9	Layanan	9	9	9	9	9	565	565	740	740	740	740
RO	001 Layanan Teknis Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Layanan		7	7	7	7	7	Layanan	7	7	7	7	7	365	365	440	440	440	440
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko BBWS	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	125	125	200	200	200	200
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Satker Balai	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko SNVT PJSA	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko SNVT RUPA	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko SNVT Pembangunan Bendungan	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Satker Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40	40

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET (OUTPUT)					SATUAN	TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Penerapan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko SNVT ATAB	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40
RO 002	Zona Integritas	Layanan		2	2	2	2	2	Layanan	2	2	2	2	2	200	200	300	300	300
	Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) untuk BBWS	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	100	100	150	150	150
	Pengembangan WBK dan WBBM BBWS	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	100	100	150	150	150
KEGIATAN 7690 Layanan Teknis SDA																			
Sasaran Kegiatan:																			
01	Meningkatnya kesiapan teknis dalam rangka meningkatkan pasokan air berkelanjutan dan produktivitas air serta ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air																		
Indikator Sasaran Kegiatan:																			
01	Tingkat layanan sistem informasi sumber daya air (SISDA) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan layanan hidrologi untuk sistem informasi hidrologi, hidroklimatologi, dan hidrogeologi (SIH3)	%	Banten	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00											
02	Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	Wilayah sungai	Banten	1	1	1	1	1											
03	Jumlah dokumen perhitungan nilai indeks ketahanan air wilayah sungai (IKtA-WS)	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1											
04	Tingkat kesiapan teknis	%	Banten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
05	Jumlah dokumen perhitungan neraca air wilayah sungai	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1											
KRO BMA	Data dan Informasi Publik	Dokumen		6	5	8	5	6	Dokumen	6	5	8	5	6	4.110	4.150	23.907	12.050	5.050
RO 001	Sistem Informasi SDA	Dokumen		1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	610	700	1.000	1.250	1.250
	Operasional Unit Data dan Informasi	Dokumen	Kota Serang	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	610	700	1.000	1.250	1.250
	Pengadaan Peralatan Pendukung Unit Data dan Informasi	Dokumen	Kota Serang	-	-	1	1	1	Dokumen	-	-	1	1	1	-	-	500	500	500
RO 002	Sistem Informasi Hidrologi dan Kualitas Air	Dokumen		5	4	7	4	5	Dokumen	5	4	7	4	5	3.500	3.450	22.907	10.800	3.800
	Operasional Rutin Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	2.300	2.550	2.600	2.600	2.600
	Pengadaan Peralatan Pendukung Unit Hidrologi dan Kualitas Air	Dokumen	Tersebar	-	-	1	-	-	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	5.107	-	-
	Studi/Review Rasionalisasi Jaringan Pos Hidrologi	Dokumen	Tersebar	-	-	1	-	-	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	500	-	-
	Revitalisasi (Rehabilitasi dan Peningkatan) Pos Hidrologi	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	600	600	6.800	600	600
	Pembangunan Pos Hidrologi	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	200	200	7.500	7.500	200
KRO CBR	Dukungan Teknis	Dokumen		3	2	3	2	3	Dokumen	3	2	3	2	3	900	600	900	600	900
RO 004	Unit desain BBWS/BWS	Dokumen		1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500
	Facilitasi Unit Desain	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500
RO 008	Dokumen Perhitungan Indeks Ketahanan Air Wilayah Sungai	Dokumen		1	-	1	-	1	Dokumen	1	-	1	-	1	300	-	300	-	300
	Penghitungan IKtA WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Dokumen	Banten	1	-	1	-	1	Dokumen	1	-	1	-	1	300	-	300	-	300
RO 006	Dokumen Neraca Air Wilayah Sungai	Dokumen		1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyusunan dan Updating Neraca Air	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
KEGIATAN 7691 Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi																			
Sasaran Kegiatan:																			
01	Meningkatnya pasokan air irigasi berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air irigasi																		
Indikator Sasaran Kegiatan:																			
01	Jumlah luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	Ha (Kumulatif)	Banten	-	-	-	-	-											
02	Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	Ha (Kumulatif)	Banten	-	-	307,07	521,50	134,43											
03	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Ha (Kumulatif)	Banten	15.415,83	23.510,83	36.996,85	50.629,66	60.526,92											
04	Jumlah dukungan teknis bidang irigasi dan rawa	Dokumen	Banten	2	8	7	4	4											
KRO CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit		-	-	1	-	-	Unit	-	-	1	-	-	-	-	53.500	-	-
RO 002	Rehabilitasi bendung	Unit		-	-	1	-	-	Unit	-	-	1	-	-	-	-	53.500	-	-
	Rehabilitasi Bendung Ranca Sumur (DI Cidurian)	Unit	Kab. Tangerang	-	-	1	-	-	Unit	-	-	1	-	-	-	-	53.500	-	-
KRO CBR	Dukungan Teknis	Dokumen		3	9	8	5	5	Dokumen	3	9	8	5	5	2.950	15.450	13.450	6.450	6.450
RO 001	Dokumen Teknis Bidang Irigasi dan Rawa	Dokumen		2	8	7	4	4	Dokumen	2	8	7	4	4	2.200	14.700	12.700	5.700	5.700
	Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Peningkatan Tambak Garam WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Dokumen	Banten	-	-	1	-	-	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	2.500	-	-
	Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Tambak Budidaya Kabupaten Serang	Dokumen	Banten	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	1.500	-	-	-
	Review Desain dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Daerah Irigasi Cidurian	Dokumen	Banten	-	1	1	-	-	Dokumen	-	1	1	-	-	-	2.000	2.000	-	-
	Review Desain dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Daerah Irigasi Ciujung	Dokumen	Banten	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	5.000	-	-	-
	Detail Desain, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Jaringan Tersier DI Cimoyan Kab. Pandeglang	Dokumen	Banten	-	1	1	-	-	Dokumen	-	1	1	-	-	-	2.000	2.500	-	-
	Pemutakhiran Peta Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dan Desain Tersier (DI Ciujung, DI Cidurian, DI Cibaliung, DI Ciliman)	Dokumen	Banten	-	1	1	1	1	Dokumen	-	1	1	1	1	-	1.000	2.500	2.500	2.500
	Monitoring dan Evaluasi SNVT P/JPA	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Monitoring dan Evaluasi DAK	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200
	PROM DI Kewenangan Pusat	Dokumen	Banten	-	1	1	1	1	Dokumen	-	1	1	1	1	-	1.000	1.000	1.000	1.000
RO 003	Unit desain	Dokumen		1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	750	750	750	750	750
	Kegiatan Unit Desain Irigasi dan Rawa	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	750	750	750	750	750
KRO CBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Km		12,40	-	-	35,06	34,14	Ha	1.663,00	-	-	3.533,21	4.779,54	53.500,00	-	-	157.192,13	129.556,90
RO 001	Jaringan Irigasi untuk Komoditas Non Padi dan Tambak	Km		-	-	-	6,00	10,00	Ha	-	-	-	950,00	1.624,00	-	-	-	135.000,00	80.000,00
	Peningkatan Tambak Garam WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Km	Banten	-	-	-	5,00	10,00	Ha	-	-	-	800,00	1.624,00	-	-	-	100.000	80.000
	Peningkatan Tambak Budidaya Kabupaten Serang	Km	Banten	-	-	-	1,00	-	Ha	-	-	-	150,00	-	-	-	-	35.000	-
RO 008	Rehabilitasi/peningkatan prasarana irigasi Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal	Km		12,40	-	-	29,06	24,14	Ha	1.663,00	-	-	2.583,21	3.155,54	53.500	-	-	22.192	49.557
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cidurian	Km	Kab. Tangerang	12,40	-	-	29,06	24,14	Ha	1.663,00	-	-	2.583,21	3.155,54	53.500	-	-	22.192	49.557
KRO RBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air (Prioritas)	Km		150,83	154,51	147,15	122,95	66,92	Ha	13.752,83	8.095,00	13.793,09	10.621,10	5.252,15	794.598	888.580	991.165	1.097.138	497.861
RO 003	Jaringan Irigasi di Sentra Produksi Lumbung Pangan	Km		0,30	-	11,92	10,20	27,06	Ha	-	-	307,07	521,50	1.134,43	20.000	-	175.187	175.187	139.412
	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Cimoyan Kabupaten Pandeglang	km	Kab. Pandeglang	0,30	-	11,92	10,20	2,06	Ha	-	-	307,07	521,50	134,43	20.000	-	175.187	175.187	39.412
	Pembangunan Daerah Irigasi Ciliman Kanan Kabupaten Pandeglang	Km	Kab. Pandeglang	-	-	-	-	25,00	Ha	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	100.000
RO 005	Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Km		119,78	56,38	10,57	16,21	0,05	Ha	11.094,59	4.494,12	1.335,65	535,00	73,00	601.000	515.228	92.783	217.464	92.280
	Rehabilitasi Daerah Irigasi kewenangan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Km	Banten	119,78	56,38	10,57	16,21	0,05	Ha	11.094,59	4.494,12	1.335,65	535,00	73,00	601.000	515.228	92.783	217.464	92.280
RO 006	Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi waduk	Km		15,75	43,00	75,62	63,80	25,63	Ha	1.994,24	38,00	8.601,22	4.184,34	996,81	76.632	141.000	386.574	477.238	135.227
	Rehabilitasi DI Ciujung	Km	Kab. Serang	15,75	-	13,82	43,00	25,63	Ha	1.994,24	-	3.681,22	4.150,04	996,81	76.632	-	215.074	364.801	135.227

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET (OUTPUT)					SATUAN	TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Peningkatan Saluran Pembuang Daerah Irigasi Ciujung	Km	Banten	-	43,00	16,80	6,50	-	Ha	-	38,00	40,00	20,00	-	-	141.000	41.000	22.500	-
	Rehabilitasi Jaringan Tersier Pamarayan Barat Di Ciujung Kab. Serang	Km	Kab. Serang	-	-	15,00	14,30	-	Ha	-	-	1.980,00	14,30	-	-	-	88.500	89.937	-
	Rehabilitasi Jaringan Tersier Pamarayan Utara Di Ciujung Kab. Serang	Km	Kab. Serang	-	-	20,00	-	-	Ha	-	-	1.500,00	-	-	-	-	21.000	-	-
	Rehabilitasi Jaringan Tersier Pamarayan Timur Di Ciujung Kab. Serang	Km	Kab. Serang	-	-	10,00	-	-	Ha	-	-	1.400,00	-	-	-	-	21.000	-	-
RO 503	Jaringan Irigasi Wilayah Barat Indonesia (URSIP)	Km		15,00	35,78	15,92	-	-	Ha	664,00	1.849,00	1.375,45	-	-	96.966	70.574	78.536	-	-
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cibaliung	Km	Kab. Pandeglang	15,00	35,78	-	-	-	Ha	664,00	1.849,00	-	-	-	96.966	70.574	-	-	-
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cibaliung Kiri	Km	Kab. Pandeglang	-	-	15,92	-	-	Ha	-	-	1.375,45	-	-	-	-	78.536	-	-
RO 507	Jaringan Irigasi Strategis (DRIP)	Km		-	19,35	33,12	32,74	14,18	Ha	-	1.713,88	2.173,70	5.380,26	3.047,91	-	161.778	258.084	227.249	130.943
	Rehabilitasi Di Ciujung Kabupaten Serang	Km	Kab. Serang	-	6,59	19,03	20,90	14,18	Ha	-	1.283,88	1.383,70	3.741,26	3.047,91	-	130.943	196.414	196.414	130.943
	Rehabilitasi Di Cidurian Kabupaten Tangerang	Km	Kab. Tangerang	-	12,76	14,09	11,84	-	Ha	-	430,00	790,00	1.639,00	-	-	30.835	61.671	30.835	-
KEGIATAN 7692 Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai																			
Sasaran Kegiatan:																			
01	Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air																		
Indikator Sasaran Kegiatan:																			
01	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	Ha (Kumulatif)	Banten	42,47	118,99	290,53	166,15	164,64											
02	Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	Juta m3 (Kumulatif)	Banten	-	-	0,60	1,80	0,60											
04	Jumlah dukungan teknis bidang sungai dan pantai	Dokumen	Banten	3	5	8	4	3											
Sasaran Kegiatan:																			
02	Meningkatnya ketahanan terhadap risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa																		
Indikator Sasaran Kegiatan:																			
01	Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	Ha (Kumulatif)	Banten	-	-	-	-	3,00											
KRO CBH	Prasarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit		-	-	2	6	4	Juta m3	-	-	0,60	1,80	0,60	-	-	110.000	185.000	175.500
RO 001	Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Unit		-	-	2	6	4	Juta m3	-	-	0,60	1,80	0,60	-	-	110.000	185.000	175.500
	Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Cisimeut	Unit	Kab. Lebak	-	-	-	-	1	Juta m3	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	25.000
	Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Cidanau	Unit	Kab. Serang	-	-	1	1	2	Juta m3	-	-	0,30	0,30	0,30	-	-	-	25.000	25.000
	Pembangunan Pengendali Sedimen DAS Ciberang	Unit	Kab. Lebak	-	-	1	5	2	Juta m3	-	-	0,30	1,50	0,30	-	-	-	85.000	160.000
KRO CBR	Dukungan Teknis	Dokumen		3	5	8	4	3	Dokumen	3	5	8	4	3	3.500	25.000	16.000	8.500	3.500
RO 001	Dokumen Teknis Bidang Sungai dan Pantai	Dokumen		2	4	7	3	2	Dokumen	2	4	7	3	2	3.000	24.500	15.500	8.000	3.000
	Detail Desain, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pengendalian Banjir dan Sedimen DAS Cidurian	Dokumen	Kab. Bogor, Kab. Serang, Kab. Tangerang	-	1	1	-	-	Dokumen	-	1	1	-	-	-	-	5.000	7.500	-
	Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pengendalian Banjir dan Sedimen DAS Ciujung	Dokumen	Kab. Lebak, Kab. Serang	-	-	1	-	-	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	5.000	-	-
	Detail Desain, Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Pengendalian Banjir dan Sedimen DAS Cidanau	Dokumen	Kab. Serang	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	7.500	-	-
	Detail Desain, Penyusunan Lingkungan dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah Drainase Utama Perkotaan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Dokumen	Kab. Lebak, Kota Cilegon, Kota Serang	-	-	3	-	-	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	9.000	-	-
	SID dan Penyusunan Dokumen Lingkungan Pengamanan Pantai dan Muara Sungai di Pesisir Pantai Utara Kab. Serang	Dokumen	Kab. Serang	-	-	-	1	-	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	5.000	-
	Monitoring dan Evaluasi SNVT PJSA	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	POP Sungai dan Pantai	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RO 003	Unit Desain	Dokumen		1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500
	Kegiatan Unit Desain Sungai dan Pantai	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	500	500	500	500	500
KRO CBS	Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Km		0,20	0,90	13,20	29,01	17,00	Ha	5,00	20,00	55,50	94,00	62,00	16.000	173.000	802.000	1.202.000	860.000
RO 001	Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Perkotaan, 3T, dan Daerah Berisiko Tinggi dari Daya Rusak Air	Km		0,20	0,90	13,20	29,01	16,80	Ha	5,00	20,00	55,50	94,00	59,00	16.000	173.000	802.000	1.202.000	830.000
	Pengendalian Banjir DAS Cibanten	Km		0,20	0,20	0,30	0,30	-	Ha	5,00	5,00	5,00	5,00	-	16.000	28.000	37.000	34.000	-
	Pengendalian Banjir Sungai Cibanten	Km	Kota Serang	0,20	0,20	0,30	0,30	-	Ha	5,00	5,00	5,00	5,00	-	16.000	28.000	37.000	34.000	-
	Pengendalian Banjir DAS Cidurian	Km		-	0,40	3,30	10,81	4,60	Ha	-	10,00	16,50	32,00	23,00	-	110.000	350.000	350.000	230.000
	Pengendali Banjir Sungai Cidurian Hulu (Kab. Bogor dan Kab. Serang)	Km	Kab. Bogor, Kab. Serang	-	0,20	-	-	-	Ha	-	5,00	-	-	-	-	44.000	-	-	-
	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Cidurian Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang	Km	Kab. Serang, Kab. Tangerang	-	0,20	1,20	-	-	Ha	-	5,00	6,00	-	-	-	66.000	100.000	-	-
	Pengendalian Banjir Sungai Cidurian Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang	Km	Kab. Serang, Kab. Tangerang	-	-	0,30	-	-	Ha	-	-	1,50	-	-	-	100.000	-	-	
	Pengendalian Banjir Sungai Cidurian (MYC)	Km	Kab. Serang, Kab. Tangerang	-	-	1,80	1,80	1,60	Ha	-	-	9,00	9,00	8,00	-	150.000	150.000	130.000	
	Pengendalian Banjir Sungai Cidurian Lama (MYC)	Km	Kab. Serang	-	-	-	9,01	3,00	Ha	-	-	-	23,00	15,00	-	-	200.000	100.000	
	Pengendalian Banjir DAS Ciujung	Km		-	-	9,60	13,40	12,20	Ha	-	-	34,00	48,00	36,00	-	415.000	728.000	600.000	
	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciwaka Barat, Kab. Serang	Km	Kab. Serang	-	-	-	0,50	-	Ha	-	-	-	6,00	-	-	-	65.000	-	
	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciwaka Timur, Kab. Serang	Km	Kab. Serang	-	-	-	0,50	-	Ha	-	-	-	6,00	-	-	-	63.000	-	
	Pengendalian Banjir Sungai Cisangu Kab. Lebak	Km	Kab. Lebak	-	-	1,20	-	-	Ha	-	-	6,00	-	-	-	65.000	-	-	
	Pengendalian Banjir Sungai Solokan Cisaid Kab. Serang	Km	Kab. Serang	-	-	0,20	-	-	Ha	-	-	5,00	-	-	-	35.000	-	-	
	Pengendalian Banjir Sungai Ranjeng	Km	Kab. Serang	-	-	0,20	-	-	Ha	-	-	5,00	-	-	-	15.000	-	-	
	Pengendalian Banjir Sungai Ciujung (Kragilan - Jembatan Jongjing) Sisi Kanan (MYC)	Km	Kab. Serang	-	-	4,00	1,20	1,20	Ha	-	-	9,00	9,00	9,00	-	150.000	100.000	110.000	
	Pengendalian Banjir Sungai Ciujung (Kragilan - Jembatan Jongjing) Sisi Kiri (MYC)	Km	Kab. Serang	-	-	4,00	1,20	1,00	Ha	-	-	9,00	9,00	9,00	-	150.000	100.000	90.000	
	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciujung Ruas Rangkas Bitung - Pamarayan Sisi Kanan (MYC)	Km	Kab. Lebak, Kab. Serang	-	-	-	5,00	5,00	Ha	-	-	-	9,00	9,00	-	-	200.000	200.000	
	Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Ciujung Ruas Rangkas Bitung - Pamarayan Sisi Kiri (MYC)	Km	Kab. Lebak, Kab. Serang	-	-	-	5,00	5,00	Ha	-	-	-	9,00	9,00	-	-	200.000	200.000	
	Pengendalian Banjir DAS Cidanau	Km		-	0,30	-	-	-	Ha	-	5,00	-	-	-	-	35.000	-	-	
	Pengendalian Banjir Sungai Cikalpung	Km	Kab. Serang	-	0,30	-	-	-	Ha	-	5,00	-	-	-	-	35.000	-	-	
	Pembangunan Pengendalian Banjir Drainase Utama Perkotaan di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Km		-	-	-	4,50	-	Ha	-	-	-	9,00	-	-	-	90.000	-	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET (OUTPUT)					SATUAN	TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
06	Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang dibangun	m ³ /detik (Kumulatif)	Banten	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23											
07	Jumlah debit air tanah yang dimanfaatkan untuk lahan multikomoditas yang direhabilitasi	m ³ /detik (Kumulatif)	Banten	-	-	-	-	-											
08	Jumlah dukungan teknis bidang air tanah dan air baku	Dokumen	Banten	9	30	38	45	49											
Sasaran Kegiatan:																			
02	Meningkatnya penyediaan pasokan air di Pesisir Utara Jawa dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa																		
Indikator Sasaran Kegiatan:																			
01	Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m ³ /detik (Kumulatif)	Banten	-	-	0,30	5,95	-											
KRO	CBG	Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit	2	69	74	77	81	m ³ /detik	-	0,04	1,05	0,15	0,27	3.000	49.000	219.000	375.000	503.000
RO	001	Embung dan Tampung Air Lainnya pada Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis	Unit	-	61	66	69	73	m ³ /detik	-	0,04	1,05	0,15	0,27	-	37.000	207.000	363.000	491.000
		Embung Air Baku di Kabupaten Serang yang Dibangun	Unit	-	1	2	2	1	m ³ /detik	-	-	1,00	0,04	0,01	-	22.000	64.000	64.000	32.000
		Pembangunan Embung Untirta Kab. Serang Lanjutan	Unit	-	1	-	-	-	m ³ /detik	-	-	-	-	-	-	22.000	-	-	-
		Pembangunan Embung Siketung Kab. Serang	Unit	-	-	1	-	-	m ³ /detik	-	-	0,001	-	-	-	-	32.000	-	-
		Pembangunan Embung Waringin Kab. Serang	Unit	-	-	1	-	-	m ³ /detik	-	-	1,00	-	-	-	-	32.000	-	-
		Pembangunan Embung Batukuda Kab. Serang	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Winong Kab. Serang	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,03	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Mancak Kab. Serang	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Embung Air Baku di Kabupaten Pandeglang yang Dibangun	Unit	-	-	1	2	1	m ³ /detik	-	-	0,01	0,02	0,01	-	-	32.000	64.000	32.000
		Pembangunan Embung Bulagor Kab. Pandeglang	Unit	-	-	1	-	-	m ³ /detik	-	-	0,012	-	-	-	-	32.000	-	-
		Pembangunan Embung Pasirgadung Kab. Pandeglang	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Rancahiyang Kab. Pandeglang	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,012	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Bulagor Kab. Pandeglang	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	32.000
		Embung Air Baku di Kabupaten Lebak yang Dibangun	Unit	-	-	3	3	9	m ³ /detik	-	-	0,00	0,02	0,18	-	-	96.000	96.000	288.000
		Pembangunan Embung Cirinten di Kab. Lebak	Unit	-	-	1	-	-	m ³ /detik	-	-	0,001	-	-	-	-	32.000	-	-
		Pembangunan Embung Cinenger di Kab. Lebak	Unit	-	-	1	-	-	m ³ /detik	-	-	0,001	-	-	-	-	32.000	-	-
		Pembangunan Embung Cisedang di Kab. Lebak	Unit	-	-	1	-	-	m ³ /detik	-	-	0,001	-	-	-	-	32.000	-	-
		Pembangunan Embung Neglasari di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,018	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Ciminyak di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,001	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Cibubur di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,001	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Rangkasbitung di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Cilaki di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Cimanggung di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Cipanas di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Ciracas di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Cikeusal di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Cikenceng di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Leuwisema di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Pembangunan Embung Cipamelah di Kab. Lebak	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	32.000
		Embung Air Baku di Kota Cilegon yang Dibangun	Unit	-	-	-	1	1	m ³ /detik	-	-	-	0,03	0,01	-	-	-	92.000	92.000
		Pembangunan Embung Ciputri di Kota Cilegon	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,0270	-	-	-	-	92.000	-
		Pembangunan Embung Pangobelan di Kota Cilegon	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,0114	-	-	-	-	92.000
		Embung Air Baku di Kota Serang yang Dibangun	Unit	-	-	-	1	1	m ³ /detik	-	-	-	0,00	0,02	-	-	-	32.000	32.000
		Pembangunan Embung Tembong di Kota Serang	Unit	-	-	-	1	-	m ³ /detik	-	-	-	0,0020	-	-	-	-	32.000	-
		Pembangunan Embung Curug di Kota Serang	Unit	-	-	-	-	1	m ³ /detik	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	32.000
		ABSAH/PAH yang dibangun	Unit	-	60	60	60	60	m ³ /detik	-	0,035	0,035	0,035	0,035	-	15.000	15.000	15.000	15.000
RO	003	Rehabilitasi/peningkatan embung dan tampung air lainnya pada kawasan metropolitan, kawasan perkotaan dan kawasan Revitalisasi Embung Kopasus Grup I Paket II	Unit	0	0	3	0	0	0	0	0	0,003	0	0	0	0	20.000	0	0
		Revitalisasi Embung Kopasus Grup I Paket II	Unit	-	-	3	-	-	-	-	-	0,003	-	-	-	-	20.000	-	-
RO	005	Sumur Air Tanah pada Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis	Unit	2	8	8	8	8	m ³ /detik	-	-	-	-	-	3.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Provinsi Banten	Unit	2	2	2	2	2	m ³ /detik	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Serang	Unit	-	2	2	2	2	m ³ /detik	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Pandeglang	Unit	-	2	2	2	2	m ³ /detik	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
		Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kabupaten Lebak	Unit	-	2	2	2	2	m ³ /detik	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000
KRO	CBR	Dukungan Teknis	Dokumen	9	21	8	7	4	Dokumen	9	21	8	6	5	39.000	92.000	99.766.800	1.009.500	1.503.500
RO	001	Dukungan Teknis Bidang Air Tanah dan Air Baku	Dokumen	8	19	6	5	3	Dokumen	8	19	6	5	4	38.500	86.500	99.761.300	1.004.000	1.503.000
		Feasibility Study Karian Dam - Serpong Water Conveyance System (KSCS) Project Phase II	Dokumen	1	-	-	-	-	Dokumen	1	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-
		Detail Design & ESIA Karian Dam - Serpong Water Conveyance System (KSCS) Project Phase II	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	60.000	-	-	-
		Detail Desain Sumur Bor Air Tanah di Provinsi Banten	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	3.000	-	-	-
		Detail Desain Rehabilitasi Bendung Karet	Dokumen	-	-	1	-	-	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	3.000	-	-
		Detail Desain Revitalisasi Embung-Embung di Kawasan Kopasus Grup 1	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	3.000	-	-	-
		Review Design Intake Air Baku Saluran Induk D.I Ciujung ke Sungai Ciujung	Dokumen	-	-	1	-	-	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	3.000	-	-
		Detail Desain Embung Air Baku di Kabupaten Serang	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-
		Detail Desain Embung Air Baku di Kabupaten Pandeglang	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-
		Detail Desain Embung Air Baku di Kabupaten Lebak	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-
		Detail Desain Embung Air Baku di Kota Cilegon	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-
		Detail Desain Embung Air Baku di Kota Serang	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rehabilitasi dan Pemanfaatan Bendung Karet WS C3	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Revitalisasi Embung di Kota Serang	Dokumen	1	-	-	-	-	Dokumen	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Revitalisasi Embung-Embung di Kawasan Kopasus Grup 1	Dokumen	1	-	-	-	-	Dokumen	1	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Penyediaan Embung Air Baku di Kab. Serang	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	2.000	-	-
		Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Penyediaan Embung Air Baku di Kab. Pandeglang	Dokumen	-	1	-	-	-	Dokumen	-	1	-	-	-	-	-	2.000	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET (OUTPUT)					SATUAN	TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
08	Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	Unit (Kumulatif)	Banten	1	1	1	1	1												
09	Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasikan dan dipelihara	Km (Kumulatif)	Banten	243,10	243,10	225,30	243,10	225,30												
10	Jumlah sungai yang dipelihara	Sungai	Banten	3	3	3	3	3												
11	Jumlah layanan penanganan darurat akibat bencana	Jumlah Layanan	Banten	1	1	1	1	1												
Sasaran Kegiatan:																				
03	Meningkatnya tata kelola operasi dan pemeliharaan																			
Indikator Sasaran Kegiatan:																				
01	Jumlah rekomendasi teknis yang disusun	Rekomendasi	Banten	15	20	25	30	35												
02	Jumlah dokumen perhitungan indeks <i>river basin organization performance benchmarking</i>	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1												
03	Jumlah kelompok masyarakat dengan penguatan kelembagaan yang difasilitasi	Kelompok Masyarakat	Banten	3	3	3	3	3												
04	Jumlah wadah koordinasi pengelolaan sda wilayah sungai kewenangan pusat yang difasilitasi	Wadah koordinasi	Banten	1	1	1	1	1												
05	Jumlah dokumen alokasi air yang disusun	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1												
KRO AEA	Koordinasi			3	3	3	3	3									1.100	1.150	1.150	1.150
RO 001	Koordinasi TKPSDA WS Kewenangan Pusat dan Lembaga Lainnya	Kegiatan	Banten	2	2	2	2	2	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	1.000	1.000	1.000	1.000
	Operasional Kegiatan TKPSDA pada WS C3	Kegiatan	Banten	1	1	1	1	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	850	850	850	850
	Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Kegiatan	Banten	1	1	1	1	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	150	150	150	150	150
RO 002	Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA)	Kegiatan	Banten	1	1	1	1	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	100	150	150	150	150
	Fasilitasi Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan SDA pada WS Cidanau-Ciujung-Cidurian yang Dikelola BBWS Cidanau Ciujung Cidurian dan RJT II	Kegiatan	Banten	1	1	1	1	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	100	150	150	150	150
KRO BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			3	3	3	3	3									800	1.100	1.100	1.100
RO 001	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Sungai	Kelompok Masyarakat	Banten	2	2	2	2	2	Kelompok Masyarakat	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Kelompok Peduli Sungai	Kelompok Masyarakat	Banten	2	2	2	2	2	Kelompok Masyarakat	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
RO 003	Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	Kelompok Masyarakat	Banten	1	1	1	1	1	Kelompok Masyarakat	1	1	1	1	1	1	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fasilitasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA)	Kelompok Masyarakat	Banten	1	1	1	1	1	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	700	1.000	1.000	1.000	1.000
KRO BHC	Operasi Bidang Penanggulangan Bencana			3	3	3	3	3									1.125	725	1.500	1.500
RO 002	Operasi Monitoring Bencana	Operasi		2	2	2	2	2	Operasi	2	2	2	2	2	2					
	Monitoring dan Evaluasi Kekeringan dan Banjir	Operasi	Banten	1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300
	Operasional Posko Siaga Bencana	Operasi	Banten	1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300
RO 005	Operasi Tanggap Darurat Bencana UPT	Operasi		1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	1.125	725	1.500	1.500	1.500
	Operasional Tanggap Darurat pada Posko Siaga Bencana	Operasi		1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	1.125	725	1.500	1.500	1.500
KRO BHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam			2	2	2	2	2									1.600	1.600	1.600	1.600
RO 001	Operasi Unit Pengelola Infrastruktur Sumber Daya Air	Operasi		1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Operasionalisasi (Unit Pengelola Bendungan) (UPB)	Operasi	Banten	1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
RO 002	Unit pengelola irigasi	Operasi	Banten	1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	600	600	600	600	600
	Operasionalisasi Unit Pengelola Irigasi (UPI)	Operasi	Banten	1	1	1	1	1	Operasi	1	1	1	1	1	1	600	600	600	600	600
KRO CBR	Dukungan Teknis	Dokumen		5	5	5	5	5									1.930	1.930	2.050	2.050
RO 001	Dokumen Rekomendasi Teknis Perizinan	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	380	380	500	500	500
	Fasilitasi Penyusunan Rekomendasi Teknis	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	380	380	500	500	500
RO 002	Dokumen RBO Benchmarking	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	350	350	350	350	350
	Fasilitasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Pengelola SDA melalui RBO Performance Benchmarking	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	350	350	350	350	350
RO 003	Dokumen Alokasi air	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	250	250	250	250
	Alokasi air yang disusun	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	250	250	250	250	250
RO 005	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Dokumen	Banten	2	2	2	2	2	Dokumen	2	2	2	2	2	2	950	950	950	950	950
	Pemantauan dan Pengawasan PSDA Termasuk Operasional PPNS	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Prasarana SDA WS C3	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	1	750	750	750	750	750
KRO CCM	OP Sarana Bidang Penanggulangan Bencana	Unit		18	20	21	21	21									684	684	1.700	1.200
RO 001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Berat	Unit		18	20	21	21	21	Unit	18	20	21	21	21	21	684	684	1.700	1.200	1.700
	Alat Berat yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	Banten	18	20	21	21	21	Unit	18	20	21	21	21	21	684	684	1.200	1.200	1.200
	Fasilitasi Sertifikasi Keahlian/Keterampilan Tenaga OP Alat Berat	Dokumen	Banten	-	-	1	-	1	Dokumen	-	-	1	-	1	-	-	500	-	-	500
KRO CDG	OP Prasarana Bidang SDA dan Irigasi	Unit		88	95	92	87	87									68.413	72.231	79.301	74.041
RO 001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Unit		1	1	2	2	2	Unit	1	1	2	2	2	2	5.240	6.840	11.350	12.950	13.350
	Operasi Rutin	Unit	Banten	1	1	2	2	2	Unit	1	1	2	2	2	2	950	950	2.000	2.000	2.000
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Banten	1	1	2	2	2	Unit	1	1	2	2	2	2	3.200	3.200	7.000	7.000	7.000
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Banten	-	1	-	1	-	Unit	-	1	-	1	1	-	1.600	-	1.600	2.000	2.000
	Penyusunan Dokumen OP	Dokumen	Banten	1	2	2	2	2	Unit	1	2	2	2	2	160	160	350	350	350	
	Fasilitasi dan Pelaporan	Dokumen	Banten	1	1	2	2	2	Unit	1	1	2	2	2	580	580	1.200	1.200	1.200	
	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Banten	1	1	2	2	2	Unit	1	1	2	2	2	350	350	800	800	800	
RO 002	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Mata Air	Unit		1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	15.601	17.391	17.771	17.741	17.771	
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Tersebar	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	1	250	250	250	250	250
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Tersebar	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	1	260	260	260	260	260
	Penyusunan Dokumen OP	Unit	Tersebar	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	1	70	70	70	70	70
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Unit	Tersebar	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	11	11	11	11	11	
RO 004	Layanan Pemeliharaan Danau	Unit																		
RO 005	Layanan Pemeliharaan Situ	Unit		47	51	51	51	51	Unit	47	51	51	51	51	51	15.010	16.800	17.180	17.150	17.180
	Situ di Kabupaten Lebak yang Dipelihara	Unit	Kab. Lebak	14	14	14	14	14	Unit	14	14	14	14	14	14	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Lebak	14	14	14	14	14	Unit	14	14	14	14	14	14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Lebak	14	14	14	14	14	Unit	14	14	14	14	14	14	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Lebak	7	7	7	7	7	Unit	7	7	7	7	7	7	210	210	210	210	210
	Situ di Kabupaten Bogor yang Dipelihara	Unit	Kab. Bogor	7	8	8	8	8	Unit	7	8	8	8	8	8	1.875	2.160	2.160	2.160	2.160
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Bogor	7	8	8	8	8	Unit	7	8	8	8	8	8	525	600	600	600	600
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Bogor	7	8	8	8	8	Unit	7	8	8	8	8	8	1.260	1.440	1.440	1.440	1.440
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Bogor	3	4	4	4	4	Unit	3	4	4	4	4	90	120	120	120	120	
	Situ di Kabupaten Serang yang Dipelihara	Unit	Kab. Serang	19	22	22	22	22	Unit	19	22	22	22	22	22	5.085	5.940	5.940	5.940	5.940
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Serang	19	22	22	22	22	Unit	19	22	22	22	22	22	1.425	1.650	1.650	1.650	1.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO	SATUAN	LOKASI	TARGET (OUTPUT)					SATUAN	TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO 006	Layanan Pemeliharaan Sungai	Unit		3	3	3	3	3	Unit	3	3	3	3	3	5.160	3.660	5.160	3.660	5.160
	Operasi Rutin	Unit	Banten; Jawa Barat	3	3	3	3	3	Unit	3	3	3	3	3	150	150	150	150	150
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Banten; Jawa Barat	3	3	3	3	3	Unit	3	3	3	3	3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Banten; Jawa Barat	3	3	3	3	3	Unit	3	3	3	3	3	1.500	-	1.500	-	1.500
	Penyusunan Dokumen OP	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	450	450	450	450	450
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	60	60	60	60	60	
RO 008	Layanan Penetapan Sempadan	Dokumen		13	16	12	7	7	Dokumen	13	16	12	7	7	11.600	12.000	11.000	7.000	7.000
	Kajian dan Penetapan Sempadan Situ	Dokumen	Banten	12	16	10	5	5	Dokumen	12	16	10	5	5	8.100	10.000	7.000	5.000	5.000
	Kajian dan Penetapan Sempadan DI Kewenangan Pusat	Dokumen	Banten	-	-	1	1	1	Dokumen	-	-	1	1	1	2.000	2.000	2.000	-	-
Kajian dan Penetapan Sempadan Sungai	Dokumen	Banten	1	-	1	1	1	Dokumen	1	-	1	1	1	1.500	-	2.000	2.000	2.000	
RO 010	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	Unit	Banten	19	19	19	19	19	Unit	19	19	19	19	19	7.352	7.060	8.360	7.060	8.360
	Bendung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	Kab. Serang	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	530	530	1.530	530	1.530
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Serang	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	130	130	130	130	130
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Serang	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	400	400	400	400	400
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Serang	-	-	1	-	1	Unit	-	-	1	-	1	-	-	1.000	-	1.000
	Bendung karet yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	Kab. Serang	9	9	9	9	9	Unit	9	9	9	9	9	2.732	2.740	2.740	2.740	2.740
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Serang	9	9	9	9	9	Unit	9	9	9	9	9	40	40	40	40	40
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Serang	9	9	9	9	9	Unit	9	9	9	9	9	292	300	300	300	300
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Serang	3	3	3	3	3	Unit	3	3	3	3	3	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Bendung tetap yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	Kab. Serang	2	2	2	2	2	Unit	2	2	2	2	2	685	685	685	685	685
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Serang	2	2	2	2	2	Unit	2	2	2	2	2	35	35	35	35	35
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Serang	2	2	2	2	2	Unit	2	2	2	2	2	250	250	250	250	250
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Serang	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	400	400	400	400	400
	Penyusunan Dokumen OP	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	60	60	60	60	60
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
RO 016	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Unit		4	4	4	4	4	Unit	4	4	4	4	4	8.450	8.480	8.480	8.480	9.760
	Bendung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit	Kab. Serang, Kab. Tangerang, Kab. Pandeglang	4	4	4	4	4	Buah	4	4	4	4	4	8.450	8.480	8.480	8.480	9.760
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Serang, Kab. Pandeglang	4	4	4	4	4	Unit	4	4	4	4	4	810	810	810	810	810
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Serang, Kab. Pandeglang	4	4	4	4	4	Unit	4	4	4	4	4	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Serang, Kab. Pandeglang	4	3	4	3	4	Unit	4	3	4	3	4	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
	Fasilitasi	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	250	250	250	250	1.530
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	120	120	120	120	120
RO 017	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Sumur JIAT	Unit		-	-	15	20	20	Unit	-	-	15	20	20	-	-	450	600	600
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur JIAT	Unit	tersebar	-	-	15	20	20	Unit	-	-	15	20	20	-	-	450	600	600
KRO CDH	OP Prasarana Penanggulangan Bencana	Unit		1	1	6	6	6	Unit	1	1	6	6	6	115	115	1.115	1.115	1.115
RO 001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Lahar/Sedimen	Unit	Banten; Jawa Barat	-	-	5	5	5	Unit	-	-	5	5	5	-	-	1.000	1.000	1.000
	Bangunan Pengendali Sedimen yang dipelihara	Unit	Banten; Jawa Barat	-	-	5	5	5	Unit	-	-	5	5	5	-	-	1.000	1.000	1.000
RO 002	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir	Unit	Banten	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	115	115	115	115	115
	Operasi Rutin Rumah Pompa Banjir	Unit	Banten	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	25	25	25	25	25
	Pemeliharaan Rutin Rumah Pompa Banjir	Unit	Banten	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	1	50	50	50	50	50
	Fasilitasi	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	20	20	20	20	20
	Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	20	20	20	20	20
KRO CDR	OP Prasarana Jaringan Sumber Daya Air	Km							Ha						57.755	59.310	60.240	59.940	60.240
RO 001	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi	Km		417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	Ha	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	22.285	22.290	22.890	22.890	22.890
	Operasi Rutin	Km	Banten	417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	Ha	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
	Pemeliharaan Rutin	Km	Banten	417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	Ha	31.243	31.243	31.243	31.243	31.243	14.450	14.450	14.450	14.450	14.450
	Pemeliharaan Berkala	Km	Banten	355,52	355,52	417,99	417,99	417,99	Ha	27.015	27.015	31.243	31.243	31.243	2.300	2.300	2.900	2.900	2.900
	Penyusunan Dokumen OP	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	220	220	220	220	220
	Fasilitasi dan Pemberdayaan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	300	300	300	300	300
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	345	350	350	350	350
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	345	350	350	350	350
RO 002	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir	Km		243,10	243,10	225,30	243,10	225,30	Ha	90.003	90.003	65.003	90.003	65.003	8.325	10.175	10.175	10.175	10.175
	Operasi Rutin	Km	Banten	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	Ha	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	348	350	350	350	350
	Pemeliharaan Rutin	Km	Banten	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	Ha	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	348	2195	2195	2195	2195
	Pemeliharaan Berkala	Km	Banten	57,9	57,9	40,1	57,9	40,1	Ha	28.003	28.003	3.003	28.003	3.003	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Banten	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	130	130	130	130	130
RO 003	Layanan Pemeliharaan Prasarana Pengaman Pantai	Km		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Km	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	Pemeliharaan Berkala	Km	Banten	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Ha	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Penyusunan Dokumen OP	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	200	200	200	200	200
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	40	40	40	40	40
RO 006	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Air Baku	Km		7	7	7	7	7	Km	3.405	3.105	3.405	3.105	3.405	3.105	3.405	3.105	3.405	
	Saluran pembawa air baku dioperasikan dan dipelihara	Unit	Kab. Serang	7	7	7	7	7	Unit	7	7	7	7	7	3.300	3.000	3.300	3.000	3.300
	Operasi Rutin	Unit	Kab. Serang	-	-	-	-	-	Unit	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin	Unit	Kab. Serang	7	7	7	7	7	Unit	7	7	7	7	7	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Pemeliharaan Berkala	Unit	Kab. Serang	4	3	4	3	4	Unit	4	3	4	3	4	1.200	900	1.200	900	1.200
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	Tersebar	1	1	1	1	1	Dokumen	1	1	1	1	1	105	105	105	105	105
RO 007	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana JIAT	Km		-	-	15,00	20,00	20,00	Km	-	-	15,00	20,00	20,00	-	-	30	30	30
	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana JIAT	Km	Banten	-	-	15,00	20,00	20,00	Km	-	-	15,00	20,00	20,00	-	-	30	30	30
RO 008	Layanan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Jaringan Irigasi Tersier dan Kuarter	Km	Banten	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	Km	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Tersier	Km	Banten	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	Km	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fasilitasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Tersier	Dokumen	Banten	1	1	1	1												

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/KRO/RO					TARGET (OUTPUT)					TARGET (OUTCOME)					ALOKASI (dalam juta rupiah)				
	SATUAN	LOKASI	2025	2026	2027	2028	2029	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
KRO EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan						Layanan						20.844	26.304	27.889	28.439	28.439		
RO 956	Layanan BMN	Layanan	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1	900	1.400	1.900	2.400	2.400		
	Pengelolaan dan Penatagunaan Barang Milik/Kekayaan Negara	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	150	150	150	150	150		
	Kegiatan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	200	200	200	200	200		
	Sertifikasi Tanah di BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	500	1.000	1.500	2.000	2.000		
	Perkuatan Hak Atas Tanah Di BBWS Cidanau Ciujung	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	50	50	50	50	50		
RO 957	Layanan Hukum	Layanan		1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	300	300	300	300	300		
	Kegiatan Pengaduan Masyarakat, PPID dan Penyelesaian Masalah Hukum	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	300	300	300	300	300		
RO 958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan		1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	600	600	1.000	1.000	1.000		
	Peningkatan Pengelolaan Komunikasi Publik	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	600	600	1.000	1.000	1.000		
RO 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan		1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	2.050	2.050	2.550	2.550	2.550		
	Administrasi Kegiatan Satuan Kerja BBWSC3	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250		
	Sistem Akuntansi Instansi BBWSC3	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	100	100	100	100	100		
	Layanan Ketatalaksanaan	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	700	700	1.200	1.200	1.200		
RO 962	Layanan Umum	Layanan		2	2	2	2	2	Layanan	2	2	2	2	400	400	400	400	400		
	Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan / Dokumentasi	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	250	250	250	250	250		
	Pengelolaan Database Kepegawaian	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	150	150	150	150	150		
RO 994	Layanan Perkantoran	Layanan		12	12	12	12	12	Layanan	12	12	12	12	16.594	21.554	21.739	21.789	21.789		
	Belanja Uang Lembur	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	300	300	300	300	300		
	Uang Makan ASN	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589		
	Honorarium Pengelola Anggaran Satuan Kerja BBWSC3	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	680	720	720	720	720		
	Honorarium PPPK Paruh Waktu BBWS Cidanau Ciujung	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1.100	6.000	6.000	6.000	6.000		
	Gaji Outsourcing Pegawai BBWS C3	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510		
	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	250	250	250	250	250		
	Perbaikan Peralatan Kantor	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	100	100	150	150	150		
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	750	770	800	850	850		
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	115	115	120	120	120		
	Perawatan Gedung Kantor	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	Pemeliharaan Rumah Susun ASN BBWSC3	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
	Langganan Daya dan Jasa Kantor	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000		
KRO EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit		1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	150	150	150	150	150		
RO 951	Layanan Sarana Internal	Unit		1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	150	150	150	150	150		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BBWSC3	Unit	Kota Serang	1	1	1	1	1	Unit	1	1	1	1	150	150	150	150	150		
KRO EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Layanan		1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	200	200	250	250	250		
RO 954	Layanan Manajemen SDM	Layanan		1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	200	200	250	250	250		
	Peningkatan Kompetensi SDM BBWS C3	Layanan	Kota Serang	1	1	1	1	1	Layanan	1	1	1	1	200	200	250	250	250		



BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU CIUJUNG CIDURIAN
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Ustad Uzair Yahya No.1, Cipare,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117